API & JERUJI

KERUSUHAN ~~M~~PENJARA & PEMBERONTAKAN ~~TAHA~~ TAHANAN DI INDONESIA (2012-2022)

JUNGKIR ~~MX~~ MARUTA

API & JERUJI

KERUSUHAN PENJARA DAN
PEMBERONTAKAN TAHANAN DI INDONESIA
(2012–2022)

Jungkir Maruta

PUSTAKA CATUT

API DAN JERUJI: KERUSUHAN PENJARA DAN PEMBERONTAKAN TAHANAN DI INDONESIA (2012–2022)

Jungkir Maruta

Perancang Sampul
La Nause

Penata Letak
Sabate

Cetakan Pertama, Maret 2023
98 halaman
14 x 21 cm

Hak cipta bebas dan merdeka. Setiap makhluk dianjurkan dan dinasehatkan untuk mengkopi, mencetak, menggandakan, serta menyebar isi serta materi-materi didalamnya. Versi digital buku ini gratis seperti wabah. Dapat diunduh dari:
https://archive.org/details/@arsip_bawah_tanah

Penerbit Pustaka Catut
Facebook: Pustaka Catut
Instagram: @pustakacatut
Surel: pustakacatut@gmail.com

PARA TAHANAN SEMPAT MENGUASAI LAPAS KEROBOKAN, DENPASAR, 2012, MENAIKI MENARA PENGAWAS.

"Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku; Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung."

Yesaya 61:1-2

BUKU INI DIPERSEMBAHKAN UNTUK FANDI TAHER (1991-2021).

DAFTAR ISI

PENGANTAR
Hasutan untuk Membakar 7
BAGIAN 1
Di Balik Tembok Musuh 15
BAGIAN 2
Dari Kerusuhan Menuju Pemberontakan 29
BAGIAN 3
Yang Liar Menghancurkan Kerangkeng dari Dalam 41
BAGIAN 4
Kebencian Terhadap Penjara Telah Ditabur Benihnya 61
BAGIAN 5
Serangan Dua Arah 67

PENUTUP
Menjebol Tembok 81

Narasumber & Kepustakaan 93
Lampiran 1 Hak-Hak Tahanan 93
Lampiran 2 Daftar Kerusuhan Penjara di Indonesia (2012-2022) 96

PENGANTAR

Hasutan untuk Membakar

"Aku sudah berhenti untuk berupaya merubah sesuatu yang tidak dapat aku ubah, aku hanya merubah sesuatu yang tidak dapat aku terima."

- Angela Davis

Sudah jadi rahasia umum bahwa penjara di Indonesia (sebagaimana hampir di seluruh dunia itu) sangat tidak manusiawi: makanan dan tempat tidur yang tidak layak, kelebihan daya tampung, kurangnya air bersih, penganiayaan sipir, perang geng, pemerasan hingga pungutan liar. Bagaimanapun, situasi di lapangan bisa jauh lebih buruk dari yang diketahui khalayak. Setidaknya itu yang saya alami. Sebagian besar masyarakat (dan juga tahanan) menormalisir kondisi semacam ini. Biasanya, karena para tahanan dipandang pantas diperlakukan demikian sebagai konsekuensi dan tanggungjawab atas "kejahatan" dan "kesalahan" yang telah mereka perbuat. Penjara adalah sarana hukuman, nerakanya dunia.

Kondisi penjara dipandang sebagai sesuatu yang harus diterima, yang begitulah-dari-sononya. Pandangan semacam ini bahkan berlaku luas di antara tahanan. Dalam menyikapinya, para tahanan sesungguhnya dibuat tidak berdaya untuk mengubah kondisi yang secara langsung berpengaruh terhadap tubuh dan pikiran mereka. Kondisi penjara itu gelap (baca: nyaris tidak diketahui) pada sebagian pikiran orang, dan upaya tahanan untuk melawan malah lebih gelap lagi. Jadi, jika memang penjara seburuk itu, tahanan dibayangkan sebagai subjek yang pasif, pasrah menerima keadaan, dan membusuk selama bertahun-tahun.

Ini tidak benar.

Para tahanan tidak sebodoh itu untuk tidak menyadari bahwa apa yang mereka hadapi adalah ketidakadilan, kesewenang-wenangan dan pelanggaran hak. Selama dua dekade terakhir, telah terjadi puluhan pemberontakan tahanan dan kerusuhan penjara di berbagai rutan dan lapas di Indonesia. Meski beberapa hanya berupa penyerangan petugas atau perusakan "fasilitas" (yang tidak memfasilitasi tahanan), ada banyak pemberontakan yang membuat bangunan fisik penjara secara harfiah hancur terbakar. Beberapa pemberontakan lagi membuat para tahanan berhasil merebut kembali kebebasan mereka. Berbagai pemberontakan itu kadang bisa dipicu oleh permasalahan sepele. Tetapi sebagian besar lagi berakar dari permasalahan yang lebih akut dan serius dari keberadaan fungsi penjara, salah satu institusi yang jadi sekrup dari kerja mesin eksploitasi kapitalis-industrial.

PEMENJARAAN MASSAL

Saya akan merangkum, membedah dan menganalisis 47 kerusuhan yang berlangsung selama satu dekade (2012-2022). 2012 bukanlah tahun dengan kerusuhan pertama di penjara Indonesia. Saya menemukan bahwa beberapa kerusuhan penjara juga terjadi pada masa Orde Baru. Periode waktu ini saya pilih karena sesuai dengan gelombang terbaru pemenjaraan massal (mass incarceration) di Indonesia.

Berdasarkan pengamatan sekilas, saya membagi pemenjaraan massal yang pernah terjadi sejak masa berdirinya republik ini menjadi tiga periode. Yang pertama dimulai dari penahanan anggota dan simpatisan PKI yang dituduh terlibat dalam Kudeta 1965 oleh rezim militer Soeharto yang didukung oleh Amerika Serikat. Antara 300 ribu hingga 3 juta orang dibunuh selama 1965-1968, dan puluhan ribu lainnya ditahan. Tahanan yang dituduh bertanggungjawab atas kudeta, atau menempati posisi penting dalam organisasi yang terafiliasi dengan PKI, dipenjarakan atau dibuang ke Pulau Buru.

Setelah Orde Baru mapan, orientasi penahanannya berubah dari tahanan politik menjadi tahanan kriminal pada 1980'an. Kadapol IX/Jateng Mayjen Montolalu kepada Kompas, 23 Juni 1983, mengakui bahwa selama tiga bulan operasi penumpasan kejahatan di Semarang dan Solo saja, polisi berhasil menangkap 1.091 "penjahat." Banyak terduga pencuri, preman, pembunuh, penjudi, jambret, bahkan siapapun yang dituduh "mengganggu ketenangan masyarakat", tidak hanya ditangkap dan dipenjara, tetapi dibunuh di luar pengadilan dalam fenomena yang disebut sebagai "penembak misterius" (petrus) atau "mati misterius" (matius).

POLISI DI DEPAN LAPAS TANJUNG GUSTA MEDAN YANG TERBAKAR, 2013.

Pada dekade kedua Abad 21, kita menyaksikan lagi gelombang penahanan yang berorientasi pada penahanan kasus narkotika. Ini dimulai sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo menerapkan kebijakan sangat keras terhadap peredaran narkoba. Mengikuti Amerika Serikat, Filipina, serta negara-negara Amerika Latin, Joko Widodo mengkampanyekan perang terhadap narkoba (war on drugs), yang secara drastis meningkatkan jumlah tahanan sejak 2014. Saat ini, 137 ribu dari 250 ribu tahanan di Indonesia adalah tahanan narkotik.

Saya tidak melihat tiga gelombang pemenjaraan massal ini sebagai sesuatu yang terpisah. Saya bahkan curiga bahwa hal itu bisa jadi terikat secara materiil dengan perkembangan struktur dominasi negara dan kapital, mengikuti kecenderungan yang juga terjadi terutama di negara-negara Dunia Ketiga. Pemenjaraan massal pertama adalah upaya untuk menyingkirkan oposisi paling keras yang menentang kemapanan kapitalisme dalam konteks Perang Dingin, dimana Indonesia bukanlah kasus yang unik. Ia bukan satu-satunya negara dimana pengikut komunis dibantai dan rezim "revolusioner" digulingkan sejak 1950 hingga 1980'an.

Rezim pembangunan yang kemudian berdiri, yang patuh pada agenda neoliberalisme, membutuhkan "stabilitas keamanan" untuk menciptakan iklim ekonomi yang baik, yang pada akhirnya, menciptakan kepatuhan

masyarakat terhadap agenda-agenda pemerintah Orde Baru, sekaligus teror bagi siapapun yang mengancam kepentingan rezim. Oleh karena itu, saat kaum revolusioner disingkirkan, musuh utama negara adalah para "bandit". Para preman yang melihat pembentukan rezim yang baru sebagai peluang, kemudian diorganisir secara tidak langsung sebagai para algojo dan anak buah para penguasa. Yang tersisa, yang tidak mendapat tempat dalam rezim yang baru inilah yang harus disingkirkan.

Bukan berarti kaum revolusioner dan bandit berkurang setelah dua gelombang pemenjaraan tersebut. Kenyataannya, hari ini kaum revolusioner telah tumbuh berkembang, dan katakanlah hal yang sama berlaku pula bagi kriminal. Tetapi, kehancuran gerakan kiri, dan hilangnya kultur premanisme dan perilaku ugal-ugalan untuk menciptakan masyarakat yang pasif dan patuh secara umum, menjadikan alkoholisme, penyalahgunaan obat-obatan dan konsumsi narkoba jenis apapun sebagai pelarian sementara dari kebosanan dan kemuakan di tengah alienasi hidup. Ia secara sekaligus menandai kemana perilaku submisif dan swa-penghancuran manusia modern di bawah kapital akan mengarah.

Apakah berkurangnya tahanan politik secara kualitatif menandai berkurangnya oposisi terhadap tatanan saat ini? Apakah ketika masyarakat kehilangan elemen radikal dan kritisnya (dengan kehancuran gerakan kiri) maka kerusuhan penjara misal, juga berkurang? Ini adalah pertanyaan yang terlampau berani untuk sungguhan dijawab. Tetapi penting bagi kita untuk memahami kecenderungan terbaru pemenjaraan, yang mana saya telah terseret pula ke dalamnya, sebagai persenjataan analitik untuk melihat fenomena kerusuhan penjara dan pemberontakan tahanan sebagai kemungkinan revolusioner di dalam "situasi yang berbeda". Sementara saya tidak benar-benar ingin menjawabnya, teks ini mencoba mengeksplorasi berbagai kemungkinan yang muncul dari perjuangan anarkis demi pembubaran penjara (prison abolition) dan sekaligus serangan terhadap negara dan kapital. Oleh karena itu, meski data-data di dalam teks ini mungkin berguna bagi masyarakat umum, tujuan utama teks ini ditujukan bagi para anarkis.

PENULISAN

Teks ini bukanlah historiografi, tapi proyek yang menganalisis kejadian kontemporer, dengan kondisi baru, yang relevan bagi kehidupan kita saat ini. Kita tidak sedang membicarakan tahanan Yahudi di kamp konsentrasi Jerman, atau tahanan kerja paksa di gulag Sovyet, atau tahanan politik komunis di pembuangan Pulau Buru. Sebagian besar pelaku dalam peristiwa yang saya bahas masih hidup.

Yang akan saya sebut sebagai "para tahanan" itu adalah daging, darah dan tulang yang sama hidupnya dengan kita. Mereka memiliki nama, dan memiliki semangat kebebasan yang sama dengan kita. Hasrat untuk menyerangnya adalah hasrat yang sama dengan kita. Saya menyesalkan diri karena pada sebagian besar halaman, saya hanya akan menggunakan kata "tahanan" (dan sesekali "tahanan perempuan") dengan imbuhan awal "para". Saya sangat jarang menyebutkan nama tahanan kecuali nama itu sangat penting dan mendesak untuk disebut, atau andai nama itu bahkan bisa saya dapatkan. Memang, kekurangan lain dari proyek penulisan ini adalah betapa ia begitu dingin, kurang intim dan impersonal.

Ada beberapa penyebab. Yang utama adalah karena sebagian besar berita yang saya himpun sangat jarang memberikan ruang bagi tahanan, ia juga jarang menyebutkan nama. Ini mereduksi para pejuang di dalam penjara menjadi sekedar statistik. Tapi itulah konsekuensi dari keterbatasan sumber yang dapat saya gunakan. Biasanya, demi alasan keamanan tahanan itu sendiri, inisial mereka disebutkan sekedarnya dalam berita. Ini penting sebab apa yang ditulis dapat mempengaruhi kehidupan sang tahanan bersangkutan selama beberapa tahun ke depan saat ia menjalani masa hukumannya. Kerusuhan baru saja terjadi beberapa bulan lalu, kemarin, hari ini, dan akan terjadi lagi setelah buku ini terbit. Ketika saya baru saja memikirkan tentang proyek ini, sebuah penjara di Sulawesi sedang dibakar. Dan hingga saya memiliki kesempatan untuk menulis di dalam penjara, saya telah melewatkan sebuah kerusuhan lagi di Nusa Tenggara Barat. Penting untuk memastikan tahanan yang bersangkutan tetap aman, sebab, mengincar orang paling mudah melakukannya di penjara, ketika seseorang tidak dapat pergi kemanapun di balik pagar kawat berduri.

Saya bisa saja mengelaborasikan kerusuhan dan pemberontakan tahanan dengan serangkaian sabotase kecil-kecilan, pembangkangan individual, kisah-kisah pelarian yang kurang spektakuler, praktik saling membantu dan gotong royong atau protes-protes yang tidak terhitung dan tidak tercatat. Ini terjadi, asal anda tahu! Hanya karena saya tidak mencatatnya, bukan berarti hal ini tidak ada. Keributan antar tahanan, jika ia tidak berubah menjadi pemberontakan terhadap sipir atau perusakan penjara, juga sengaja tidak saya bahas. Saya tidak melakukannya demi memusatkan perhatian saya hanya pada kerusuhan yang secara fisik berdampak merusak dan bagaimana hal itu mungkin mencerminkan kehendak tahanan yang paling tersembunyi dan samar (lihat Bagian 2).

Saya mewawancarai beberapa tahanan yang pernah terlibat dalam berbagai kerusuhan penjara di Indonesia. Beberapa diantaranya adalah tahanan yang saya temui sendiri selama di dalam penjara. Narasumber

lain saya dapatkan dari jaringan perkawanan antar kota yang terlibat dalam aktivitas solidaritas Palang Hitam Anarkis Indonesia. Meski begitu, sebagian besar datanya berasal dari begitu banyak berita daring di berbagai kanal berita internet, yang sangat tendensius dan dengan terang-terangan kerap menunjukkan keberpihakannya. Banyak sekali berita yang tidak berimbang, yang tidak menyediakan sedikit pun ruang bagi tahanan untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana kerusuhan dan pemberontakan itu terjadi. Hampir seluruh berita yang tersedia hanya mewakili pernyataan resmi dari pejabat rutan dan lapas, kepolisian, hingga Kementerian Hukum dan HAM. Tuntutannya ada, tapi biasanya dari versi polisi. Beberapa hari setelah kerusuhan reda, kita akan kesulitan menemukan jejak apakah tuntutan itu dipenuhi (biasanya tidak). Kalau pun ada beberapa berita susulan, ia melaporkan situasi penjara sudah kondusif, bahwa penjara baru akan dibangun untuk menggantikan penjara yang telah dibakar, bahwa penjagaan akan diperketat dan tahanan yang diduga memprovokasi kerusuhan telah dipindahkan ke penjara lain. Ketika saya berhasil mendapatkan versi alternatif dengan menjadikan tahanan sebagai narasumber, saya tidak terkejut kalau apa yang disampaikan pegawai lapas dan rutan seringkali adalah kebohongan, atau mereka berupaya menutup-nutupi apa yang sebenarnya terjadi.

Melaporkan kerusuhan dan pemberontakan penjara adalah hal yang menantang di tengah kelesuan jurnalisme yang berintegritas. Katakanlah ada jurnalis yang berupaya mendapatkan narasumber tahanan, ia tidak mungkin diberikan akses oleh polisi dan sipir dalam situasi darurat seperti itu. Segera setelah pemberontakan diredam, para tahanan langsung dibekuk dan diawasi penuh, terkadang langsung dipindahkan ke penjara lain di hari yang sama. Para jurnalis akan belepotan untuk melacak tahanan yang telah tersebar. Bahkan dalam situasi normal, jurnalis dilarang meliput ke dalam penjara kecuali setelah mendapat izin. Jelas bahwa setelah jurnalis diizinkan masuk, para tahanan dan penjara telah dikondisikan untuk menghasilkan citra yang baik. Tahanan kadang memiliki akses komunikasi, tetapi tiap informasi yang sampai keluar dari penjara segera memancing perhatian karena ini menunjukkan keberadaan telepon seluler.

Ribetnya prosedur peliputan dan terputusnya komunikasi tahanan dengan dunia luar jelas mengurungkan niat jurnalis lokal yang hendak menyusun laporan mendalam mengenai kerusuhan penjara, memuaskan diri dengan menulis berita kilat yang beberapa jam kemudian sudah tidak relevan. Saya mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan informasi meski berada di balik jeruji. Mohon maklumi keterbatasan saya.

Salah satu cara untuk mengorek informasi yang sesungguhnya adalah dengan berkomunikasi secara ilegal dengan para tahanan, atau saat tahanan itu telah bebas dan menyuarakan apa yang sesungguhnya terjadi. Meski begitu, harus kita ingat bahwa pada sebagian besar waktu, asap yang mengepul dari penjara itu sendiri adalah sinyal bahwa situasinya sudah terlampau darurat.

MENJAGA BARA

Proyek ini, sebenarnya sudah terpikirkan sejak pertengahan 2018, ketika Palang Hitam Anarkis yang pertama di Indonesia dibentuk, dan kesadaran mengenai perlawanan dari dalam penjara adalah kemungkinan yang dapat dilakukan bagi para tahanan aktivis dan tahanan petani yang dikriminalisasi akibat mempertahankan tanahnya. Pada 2021, saya makin bersemangat dan terinspirasi oleh buku Blessed Is the Flame: An Introduction to Concentration Camp Resistance and Anarcho-Nihilism karya Serafinski, yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan judul Dalam Pelukan Api. Jika anda telah membacanya, maka anda akan familiar dengan runtutan argumennya yang sama. Tetapi saya terdorong untuk sungguh memulai penelitian tentang pemberontakan tahanan semenjak saya dipenjara. Di sini saya memiliki kesempatan untuk menggarapnya secara serius.

Lebih dari sekedar pendokumentasian perlawanan tahanan yang ada, saya berupaya menganalisis faktor-faktor apa saja yang memicu pemberontakan, mengaitkannya dengan pembahasan mengenai penghapusan penjara, agar dapat berguna secara praktis. Rencananya, saya hendak menyisipkan topik yang membahas tentang mengapa penjara perlu dihapuskan. Tetapi meski literatur tentang topik itu tidak ada dalam Bahasa Indonesia, saya lebih menyarankan anda untuk membaca sendiri bahan-bahan berikut: Classic Writings in Anarchist Criminology: A Historical Dismantling of Punishment and Domination yang disusun oleh Anthony J. Nocella II, Mark Seis, dan Jeff Shantz. Buku ini adalah kompilasi tulisan pemikir anarkis klasik yang akan membantu pembaca untuk memikirkan kembali sifat teori kriminologi dan sejarah kriminologi sebagai praktik ilmiah sosial. Dua buku lain, yang lebih populer dan secara spesifik jadi andalan literatur pembubaran penjara, adalah Are Prisons Obsolete karya seorang aktivis kulit hitam Amerika Angela Davis; dan satu lagi, yang sangat saya sarankan betul, adalah Instead of Prisons: A Handbook for Abolitionists. Semua buku abolisi ini dapat diunduh gratis di internet.

Saya harap, kita dapat menemukan inspirasi dan pengalaman berharga dari berbagai pemberontakan tersebut, yang membuatnya menjadi materi yang berguna bagi perjuangan para anarkis hari ini, di luar dan di dalam penjara. Sebagai seorang tahanan, anarkis, dan abolisionis yang menghendaki semua penjara hancur, ini sekaligus hasutan bagi para tahanan di Indonesia untuk memberontak menghancurkan penjara yang mengurung tubuh mereka. Ini adalah ajakan untuk membentuk kawanan; seruan bagi tahanan untuk mengorganisir diri. Bahkan andai buku ini tidak menghasut siapapun, menuliskannya saja adalah menyiram bahan bakar ke diri sendiri dalam mengatasi perasaan teralienasi dan tak berdaya. Saya setuju dengan salah satu anggota grup musik anarko-punk Rusia Pussy Riot, Nadezhda Tolokonnikova: "Perlawanan memberi saya kekuatan untuk hidup. Itu memberi saya perasaan bahwa hidup di balik jeruji besi tidak membuang-buang waktu."

Hingga semua penjara rata dengan tanah!

BAGIAN 1

Di Balik Tembok Musuh

"Tembok hanyalah tembok. Ia dapat dihancurkan."

Assata Shakur

HIKAYAT PENJARA

Dalam masyarakat primitif, yang mengandalkan hidupnya dengan berburu-meramu dan berpindah tempat, penjara belum eksis dan tidak dibutuhkan. Konflik yang serius dapat berakhir dengan pembunuhan atau paling baik, perpisahan kelompok menjadi dua. Meski begitu, ada berbagai bentuk penyelesaian sengketa yang mengutamakan resolusi damai demi mencegah eskalasi konflik meningkat. Seiring dengan domestikasi manusia, saat manusia mulai menetap, bercocok tanam dan mengumpulkan kekayaan, sejenis hukuman dan penahanan mulai terjadi. Pada beberapa masyarakat, hukuman seringkali masih berupa perbudakan, kewajiban kerja hingga jangka waktu tertentu, ganti rugi, denda, pengusiran dari kampung hingga hukuman mati. Penahanan masih dalam bentuk yang paling sederhana seperti pemasungan, ikatan tali atau rantai dan kerangkeng. Ia tidak ditujukan sebagai bentuk hukuman, tetapi agar pelanggar aturan, budak, musuh dan tawanan perang tidak melarikan diri.

Seiring dengan bentuk-bentuk kekuasaan yang terinstitusionalisasi, penjara mulai dikenal. Sejarah penjara berjalan seiring dengan kemunculan peradaban dan negara-negara kuno. Salah satu catatan sejarah paling awal yang dapat kita temukan tentang penjara berasal dari Mesopotamia dan Mesir. Pada periode ini, para tahanan ditempatkan

di ruang bawah tanah. Bangunan terisolasi serupa penjara juga dapat kita temukan dalam peradaban Yunani kuno dan kemudian Romawi. Di nusantara, kerajaan Hindu-Buddha mengenal bangunan yang disebut sebagai penjara, yaitu rumah penahanan bagi kriminal atau tahanan politik yang menunggu putusan hukuman mati, denda atau dikutuk.

Hingga periode tersebut, penjara masih tidak dimaksudkan sebagai bentuk penghukuman. Tetapi semenjak akhir abad ke 18, sementara penggunaan hukuman mati mulai menurun, penjara semakin sering digunakan oleh pengadilan menjadi sarana utama untuk menghukum. Pada 1830, Charles Williams menjadi narapidana pertama di Amerika Serikat yang menjalani masa hukumannya di Eastern State Penitentiary yang baru dibangun.

Penggunaan penjara kemudian menyebar ke seluruh dunia, seringkali melalui imperium kolonial yang membawa praktik tersebut ke negeri yang sebenarnya tidak memiliki konsep tentang penjara. Penjara yang kita kenal saat ini diwarisi oleh kolonialisme Eropa untuk menahan pribumi pemberontak dan tahanan yang dihukum kerja paksa. Ini dimulai dari sel khusus penahanan di benteng-benteng Belanda yang sekaligus menjadi tangsi atau barak militer, seperti Benteng Kalisosok yang dibangun oleh VOC dan dijadikan penjara pada masa pemerintahan Daendels. Pemerintah Hindia Belanda kemudian membangun penjara hukuman seperti Huis van Behauring (Penjara Jeil) yang dibangun pada 1883 di Bengkalis, hingga pulau penjara pengasingan Boven Digoel pada 1928 untuk tahanan pemberontakan PKI disusul dengan penjara-penjara yang mulai dibangun di Pulau Nusakambangan sejak 1908 hingga 1935. Hingga awal abad 20, puluhan penjara atau bangunan yang dialihfungsikan sebagai penjara bertebaran di nusantara hingga masa pendudukan Jepang.

Ada berbagai pandangan dan tipe penjara yang selama ini berkembang. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, penjara dipandang sebagai institusi total yang mengendalikan setiap aspek kehidupan seorang tahanan. Baru-baru ini pendekatan yang lebih humanis berkembang, dimana pengawasan dan pengendaliannya tidak perlu seketat itu dan bahwa penjara harus menjadi sarana perubahan untuk mempersiapkannya kembali ke masyarakat. Di bawah Menteri Kehakiman Sahardjo, "lembaga pemasyarakatan" mulai digunakan secara resmi untuk menyebut institusi kepenjaraan Indonesia sejak 1964. Ini menandai trend serupa secara global.

TAHANAN MEMBAWA POSTER KETIKA MENGGELAR UNJUK RASA PASCA TERJADINYA KERUSUHAN DI LAPANGAN LAPAS TANJUNG GUSTA, MEDAN, 2013

MASYARAKAT TAHANAN

"Penjara mencerminkan masyarakat di sekitar mereka. Kecuali kita mengubah keduanya, kita semua akan terjebak dalam semacam penjara."
Nadezhda Tolokonnikova

Secara umum, per 22 Februari 2022 jumlah tahanan di Indonesia mencapai 271.252 orang dengan perincian 226.490 narapidana dan 44.762 tahanan. Mereka tersebar di 526 lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan dan tempat tahanan titipan di pengadilan, kejaksaan dan sel-sel di unit TNI-Polri lainnya. Beberapa penjara yang aktif di bawah pemerintahan Indonesia saat ini, merupakan sisa dari penjara Belanda dan Jepang, dengan tembok dan jerujinya yang persis sama.

Dalam sistem pidana Indonesia, tahanan adalah sebutan bagi terdakwa yang masih menjadi kewenangan pihak kepolisian atau penyidik yang sedang bekerja untuk lebih memperdalam kasusnya. Sedangkan narapidana sepenuhnya menjadi kewenangan lembaga pemasyarakatan, yang sudah menerima keputusan hakim. Tahanan ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) sementara narapidana, atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) ditahan di Lembaga Pemasyarakatan. Kecuali

dalam hal yang spesifik, saya cenderung memukul rata perbedaan ini. Tentu saja, kekuasaan secara linguistik hendak menyamarkan maksud sebenarnya dari mekanisme dominasi dan kontrol. Karena itu, saya tetap akan menyebut narapidana sebagai tahanan, serta menyebut rutan dan lapas sebagai penjara.

Secara fisik, penjara di Indonesia sangat beragam bentuknya dan dibagi berdasarkan kelas-kelas sesuai dengan tingkat kebutuhan pengamanan tahanan mulai dari minimum security hingga super-maximum security. Semua penjara dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM di bawah wewenang Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Ketika saya menuliskan ini, pemerintah mulai membuka wacana tentang penjara yang dikelola oleh swasta.

Di dalam penjara umum, tempat hunian tahanan dibagi berdasarkan jenis tindak pidana, yang disebut blok, seperti narkotik, kriminal dan korupsi, atau terkadang blok khusus perempuan dan tahanan pendamping (tamping) yang bekerja di penjara. Karena pemerintah telah mengesahkan peraturan terkait penanganan tahanan lansia, maka kedepannya kita juga akan lebih banyak menemukan blok lansia. Kamar mandi dan toilet berada di masing-masing kamar, dan di dalam blok biasanya terdapat halaman, taman, lapangan olahraga atau tempat jemur pakaian.

Kamar-kamar di dalam blok biasanya dibuka secara rutin setiap hari kecuali pada hari-hari tertentu yang membutuhkan pengamanan khusus. Pada malam hari, seluruh blok kembali dikunci dan tahanan diminta kembali ke kamar masing-masing. Di penjara dengan tingkat pengamanan maksimum, blok berisi sel-sel yang masing-masing hanya dihuni oleh satu tahanan. Tiap blok dilengkapi oleh satu pos yang dijaga oleh satu atau dua sipir. Pos ini merupakan satu-satunya akses untuk menuju ke area perkantoran penjara yang terdiri dari dapur, klinik, registrasi, perpustakaan, tempat ibadah, lokakarya, gudang senjata serta kantor pegawai, yang dibatasi lagi oleh pos kedua yang lebih besar. Selain pegawai lapas yang bertugas di masing-masing kantor itu, terdapat tamping kebersihan, keamanan dan koperasi serta tamping lain yang berkeliaran di seluruh area penjara yang membantu kerja-kerja perkantoran penjara. Terakhir, akses keluar harus melalui pintu masuk dan pos penjagaan utama yang langsung menghadap keluar penjara. Masing-masing blok kerap dibatasi oleh pagar besi dan kawat, sementara tembok terluar seringkali berlapis, terbuat dari beton dengan ketinggian hingga empat atau lima meter. Di sudut-sudut tembok terluar terdapat menara penjagaan yang ditempati oleh dua hingga empat sipir lagi yang kadang bersenjata api dan lampu sorot.

Masyarakat penjara, dengan populasi yang utamanya terdiri dari tahanan dan sipir ini, dapat ditandai dengan pola hubungan sosial sebagaimana umumnya masyarakat hari ini; pembagian kerja dan tanggung jawab yang jelas; keberadaan stratifikasi atau dominasi dalam subkelompok; serta etika atau budaya yang khas. Hal ini akan sangat menentukan dinamika hubungan antar kelompok di dalam penjara, serta mempengaruhi bagaimana kerusuhan-kerusuhan bakal berlangsung.

Para sipir dan kepala penjara berada dalam hierarki puncak, menikmati banyak keuntungan melalui berbagai pungutan liar. Karena itu, kita akan menemukan kontras perbedaan perlakuan, karena para sipir kerap mengkomersialisasikan blok-blok elit dengan kamar kecil yang lebih privat. Para tahanan elit biasanya dapat memiliki peralatan elektronik yang lebih lengkap, lebih bebas keluar masuk blok tahanan, area blok yang lebih bersih serta terhindar dari penganiayaan sipir. Merampas keistimewaan tahanan elit ini saja dapat memancing kerusuhan, seperti terjadi di Lapas Kelas I A Rajabasa Bandar Lampung pada 11 Oktober 2013. Tahanan non-korupsi yang menempati blok D khusus tahanan korupsi, enggan dipindahkan dari blok elit tersebut. Tuntutannya tidak seperti kebanyakan kerusuhan lain yang kerap memprotes fasilitas yang buruk, melainkan penolakan penertiban rutin telepon seluler, narkotika dan peralatan masak. Setidaknya satu pintu terali dirusak dan kaca-kaca kantor di lantai dua pecah dilempari batu dalam kerusuhan yang berlangsung kurang dari setengah jam itu.

Sementara itu, sebagian besar tahanan lain yang secara finansial lebih lemah, akan hidup berdesak-desakan di kamar dengan jumlah tahanan yang membludak. Total tahanan di Indonesia mencapai 270 ribu orang, sementara penjara yang tersedia hanya dapat menampung 132 ribu orang. Pengadilan lebih mengutamakan hukuman penjara ketimbang alternatif pemidanaan lain, seperti penahanan rumah dan kota, rehabilitasi atau putusan bebas. Sementara over-kapasitas telah terjadi sejak lama, peningkatan jumlah tahanan terjadi secara signifikan sejak 2014 saat Presiden Jokowi membuat kebijakan lebih keras dalam memberantas peredaran narkoba. Saya kesulitan untuk menemukan laporan kerusuhan yang terjadi sebelum 2011. Tetapi saya berani simpulkan bahwa over-kapasitas pada akhirnya juga mempengaruhi tingginya frekuensi kerusuhan di penjara-penjara Indonesia dalam satu dekade terakhir.

Tiap-tiap kamar, pada gilirannya akan dipimpin oleh seorang tahanan senior atau tahanan jagoan, yang sering disebut sebagai kepala kamar (palkam). Ia mendasarkan kekuasaannya secara koersif dengan dukungan dari tahanan jagoan lain di kamar dan hubungan timbal balik dari upeti rutin kepada sipir. Pada gilirannya, sumber pembayaran ini seringkali

dibebankan kepada tahanan lain melalui berbagai "iuran" dan pemerasan. Di atas kepala kamar, terdapat kepala blok, yang seringkali merupakan kepala kamar paling berpengaruh di suatu blok tahanan. Ia tidak ditunjuk dan dipilih, tetapi pengakuan de facto dari kepala kamar yang lain untuk mengakui kekuasaannya. Kepala blok lebih sering berperan dalam menengahi pertikaian antar kamar tahanan, mewakili tahanan blok terhadap sipir. Sangat jarang terjadi, tetapi jika ia ditakuti, ia ikut menarik uang dari kamar-kamar lain. Selebihnya tiap kamar mengelola urusan domestik dan mempertahankan otonomi mereka sendiri dari kepala blok.

Tiap penjara memiliki kebiasaan dan tatanan masing-masing. Di penjara yang ketat, uang dan peralatan elektronik tidak diperbolehkan ada. Tapi sudah jadi rahasia umum bahwa di sebagian penjara, keberadaan telepon seluler selalu disertai dengan penyuapan dan dengan demikian keberadaan warung, kantin, dan tahanan yang menawarkan barang atau jasanya kepada tahanan lain. Tahanan mencoba menghidupi dirinya sendiri, karena jatah makanan yang tidak layak dan kewajiban membayar "urunan" kerap tidak dapat ditanggung oleh anggota keluarga di luar. Tahanan dapat menjual pulsa, aksesoris telepon seluler, bahan makanan dan lauk-pauk hingga narkoba. Jasa yang ditawarkan dapat berupa binatu, pijat urut, tatoo hingga koki. Karena ada jual beli, maka juga ada utang piutang.

Over-kapasitas semakin memperburuk kondisi penjara. Saya pernah menempati kamar berukuran 6x6 meter yang harusnya ditempati 10 tahanan dengan hanya satu toilet, tetapi dihuni hingga 55 tahanan. Hampir separuh dari ruangan itu ditempati oleh kepala kamar dan tahanan kaya yang membayar mahal hanya agar dapat tidur meluruskan kaki. Mereka membatasi diri dengan papan triplek, sehingga saya dan puluhan tahanan lain harus tidur dengan posisi miring dan kaki terlipat. Kami berada di kamar elit, karena tahanan lama telah membangun sendiri kamar mandi yang layak, dengan seluruh lantai dan dipannya tahanan dikeramik, dilengkapi dengan televisi dan delapan kipas angin dinding. Di kamar lain, kondisinya jauh lebih buruk. Akibatnya, hampir seluruh tahanan terkena biang keringat, koreng dan gatal-gatal, belum termasuk gangguan pencernaan.

Berbeda dengan penjara-penjara di Amerika Latin, penjara di Indonesia tidak memiliki kultur perang geng yang kuat, meski ada beberapa kerusuhan yang terjadi karena perkelahian antar kelompok tahanan tertentu. Pengelompokan tahanan biasanya berbasis hubungan kekeluargaan dan kedekatan geografis. Itu sebabnya, tahanan yang berasal dari daerah yang jauh kerap berada di lapisan terbawah stratifikasi tahanan, bersamaan dengan tahanan lain yang secara finansial lemah.

Ini menjelaskan kuatnya rasisme dan xenofobia di antara tahanan. Kultur ini pada dasarnya sama saja di hampir seluruh penjara Indonesia.

Tahanan yang lebih miskin diharapkan dapat menukar tenaga kerjanya oleh para tahanan senior demi makan dan pemenuhan kebutuhan hidup dasar lainnya. Di beberapa penjara, tugas kebersihan kamar akan menjadi tanggung jawab mereka. Meski mereka menjalankan kerja-kerja kotor, mereka mendapatkan banyak keistimewaan karena akses dan kedekatan dengan tahanan senior. Tapi ini tidak menghindarkan mereka dari sasaran penganiayaan dan pelampiasan amarah.

Dapat dikatakan bahwa semakin ketat suatu penjara maka semakin keras pula perilaku sipirnya. Tahanan yang kerap berkelahi, mengkonsumsi narkoba atau terlibat dalam kekerasan dapat dihukum di sel isolasi/karantina/strap (solitary confinement), yang ditujukan untuk dihuni oleh satu orang. Mereka akan diawasi lebih ketat dan dikenai pembatasan terhadap hampir seluruh kegiatan penjara. Bentuk dan ukuran sel hukuman berbeda. Ada yang hanya muat untuk dua orang, dan terkadang dibiarkan tanpa sanitasi yang baik.

Tahanan yang baru saja dipindah dari penjara lain, harus dikarantina atau menjalani masa pengenalan lingkungan (penaling) selama 10-14 hari di dalam sel karantina. Salah satu sel karantina yang saya dan sembilan tahanan lain masuki berukuran 2,5 x 3 meter. Ini kamar penuh sampah dan kecoak, pengap dan gelap, dengan ventilasi yang buruk dan toilet yang tersumbat. Kami membakar sampah dan menggunakan kaleng aluminium untuk memasak air. Kami harus kencing di dalam botol, buang air besar di dalam plastik, dan harus membayar untuk mandi melalui selang di tempat kami tidur. Saat hujan, kamar kami kebanjiran. Agar dapat masuk ke kamar besar, masing-masing tahanan harus membayar Rp 500 ribu.

Secara tidak resmi, kita tahu bahwa tahanan yang dianggap subversif akan dianiaya, dan karena hampir tidak ada pemantauan apa yang terjadi di balik tembok penjara, kita hampir tidak tahu apa yang sebenarnya mereka alami. Tetapi pada akhir 2021, publik di Indonesia geger saat mantan narapidana dari Lapas Narkotika Kelas II A Pakem Yogyakarta melapor ke Ombudsman RI karena penganiayaan oleh sipir. Kommas HAM dalam rilis persnya menyatakan bahwa telah terjadi praktik pemukulan, baik menggunakan tangan kosong maupun menggunakan alat, seperti selang, kabel, alat kelamin sapi, dan kayu, pencambukan menggunakan alat pecut dan penggaris, ditendang, dan diinjak-injak dengan menggunakan sepatu PDL. Komnas HAM juga mencatat delapan tindakan perlakuan buruk yang merendahkan martabat manusia di Lapas Narkotika Yogyakarta, mulai dari memakan muntahan makanan, meminum dan mencuci muka

menggunakan air seni, serta pencukuran atau penggundulan rambut dalam posisi telanjang. LBH Masyarakat mencatat bahwa pada 2016, terdapat empat kasus kematian tahanan di tempat penahanan akibat penyiksaan polisi. Karena angka ini didapatkan dari berita media massa, jelas bahwa angka kematian yang tidak diberitakan lebih tinggi lagi.

KONDISI PERLAWANAN

> *"Penjara-penjara tengah dihancurkan, saat ini juga. Tahanan di seluruh dunia mengambil setiap kesempatan yang tersedia untuk membuat lubang dan memantik api, menyabotase kamera dan menyandera sipir."*
> **August O'Clairre**

Salah satu fakta paling mencolok dari periode 2012-2022 adalah lebih dari separuh kerusuhan (25 dari 47 kasus) di Indonesia terjadi di penjara-penjara Sumatera. Dalam hal ini, Aceh menjadi provinsi dengan jumlah kerusuhan tertinggi (11 kasus), disusul dengan Riau dan Sumatera Utara masing-masing 4 kasus.

Para tahanan akan menggunakan apapun sebagai senjata untuk menyerang sipir dan bala bantuannya, TNI-Polri. Seringkali, itu adalah benda-benda pribadi di kamar tahanan atau benda-benda kecil yang berserak di halaman yang sekiranya cukup ringan untuk dilempar jarak jauh tetapi dapat menimbulkan luka serius. Pada 24 September 2013, tahanan Lapas Kelas II B Sintang, Kalimantan Barat, bahkan sampai melempari sipir dengan gumpalan tanah dan pecahan semen setelah terjadi pemukulan oleh Kepala Lapas terhadap salah satu tahanan. Ini terjadi saat pagi harinya, sipir mengadakan razia dan menemukan telepon seluler dan pipet yang diduga digunakan tahanan untuk mengkonsumsi sabu. Sipir kemudian melakukan tes urine terhadap lima tahanan narkotik. Salah seorang tahanan diantaranya tidak buang air kecil karena mengaku belum bisa mengeluarkannya, yang membuat Kepala Lapas menempelengnya. Ini memancing kemarahan tahanan lain yang segera melakukan pelemparan, meski kemudian kehadiran personil TNI-Polri berhasil meredam suasana. Setidaknya satu polisi terluka di kepala akibat lemparan pecahan semen kering dan ia dilarikan ke rumah sakit.

Batu-batu di halaman, juga menjadi senjata tahanan Lapas Kelas II A Curup Bengkulu saat mereka melakukan perusakan kantor penjara pada 15 April 2016. Saat itu tahanan mengeluhkan maraknya pungutan liar dan porsi makanan dimana tiap orangnya hanya dapat jatah secangkir. Berita lain melaporkan bahwa kerusuhan terjadi karena Kepala Lapas memberikan kebijakan yang semakin ketat terkait pembatasan jam kunjungan, pemasangan CCTV serta menyita telepon seluler tahanan.

Akibatnya ruang kunjungan dan kantor Kepala Lapas serta keamanan menjadi sasaran pelemparan batu.

Pembakaran kerap terjadi, karena sebenarnya minyak tanah dan korek api dapat ditemukan di dalam penjara untuk keperluan dapur atau merokok tahanan. Sipir tidak mengurus dapur umum (mereka hanya mengurus anggarannya). Memasak, mencuci piring dan membagikan jatah makanan sepenuhnya dikerjakan oleh tahanan sendiri. Di beberapa penjara, terdapat kompor di tiap kamar, beberapa bahkan menggunakan kompor gas. Dengan demikian bahan bakar sebenarnya cukup mudah dijangkau tahanan. Selain itu, jenis barang yang ada di kamar biasanya berupa pakaian, kain sarung, dan kasur. Keberadaan bahan bakar minyak yang meluas dan barang mudah terbakar milik tahanan ini bisa menimbulkan kebakaran yang berdampak lebih besar dari yang diperkirakan. Itu sebabnya, kasus pembakaran penjara begitu marak. Salah satu pembakaran penjara paling besar terjadi pada dini hari 11 Mei 2019. Tahanan Rutan Kelas II B Siak Sri Indrapura mengamuk karena penganiayaan terhadap beberapa tahanan yang tertangkap dalam razia narkoba. 34 tahanan kabur, satu pucuk shotgun hilang, dan seluruh bangunan penjara habis terbakar.

Kerusuhan, secara menakjubkan, justru adalah salah satu cara yang mengungkapkan kepada kita betapa banyaknya benda-benda terlarang di penjara. Misal, tahanan Lapas Kelas III Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, melempar tidak hanya batu, tetapi juga botol kaca ke arah sipir, setelah terjadinya penganiayaan terhadap lima tahanan yang terjaring razia pada 7 Oktober 2021. Jika terdapat minyak tanah, kain dan botol kaca, selanjutnya kita bisa tebak apa yang dapat dibuat tahanan: molotov cocktail. Itulah yang diberitakan berbagai media pada kerusuhan 19 Februari 2012 di Lapas Kelas II A Kerobokan Denpasar, salah satu kerusuhan paling lama di penjara Indonesia karena berlangsung selama hampir tiga hari. Beberapa media juga melaporkan lemparan molotov, dan yang agak meragukan, suara kembang api.

Situasinya cukup serius, karena ada berbagai berita yang simpang siur mengenai keberadaan 30 pucuk senjata api beserta amunisinya dari gudang senjata. Beberapa berita melaporkan bahwa senjata-senjata itu hangus terbakar, sementara berita lain menyatakan bahwa sipir berhasil menyelamatkan senjata sebelum gudang terbakar. Hanya BBC Indonesia yang melaporkan bahwa senjata berupa lebih dari selusin shotgun itu sempat dikuasai tahanan. Berita itu pun baru naik setelah 500 personel gabungan TNI-Polri dikerahkan dan berhasil mengambil alih Lapas Kerobokan dengan memberikan beberapa tembakan menggunakan peluru tajam yang menyebabkan tiga tahanan menderita luka tembak

di kaki pada hari ketiga, Kamis, 23 Februari (di Indonesia, biasanya tembakan di kaki dilakukan justru setelah seseorang tertangkap). Hal tersebut menimbulkan kesan bahwa polisi setempat tidak berani meredam kerusuhan oleh tahanan yang mempersenjatai diri, sehingga kerusuhan berlarut selama beberapa hari.

Ini bukan kerusuhan pertama di Lapas Kerobokan, sebagaimana akan saya bahas nanti. Pada 2015, kerusuhan besar kembali terjadi. Setelah berhasil diredam dengan susah payah, sipir melakukan razia dan menemukan ratusan senjata tajam, lima pucuk senjata api jenis revolver dan chees, dua pucuk airsoft gun, puluhan peluru, dan dua jaket anti peluru! Jika senjata semacam ini dapat ditemukan, maka saya tidak perlu jelaskan apa saja dan berapa banyak narkoba yang ditemukan dalam razia tersebut. Media dan pihak berwenang tampak menutup-nutupi kapasitas perlawanan tahanan, tetapi Menteri Hukum dan HAM secara terbuka mengakui buruknya pengelolaan Lapas Kerobokan saat itu. Entah bagaimana, saya juga mendapatkan cerita dari tahanan senior yang mengatakan bahwa dalam suatu razia di penjara di Palembang, sipir menemukan puluhan pedang dan senjata tajam lain. Salah satu laporan mengatakan bahwa dari penggeledahan di penjara Indonesia sepanjang 2018 saja, telah terkumpul 1.700 senjata tajam! Sepanjang buku ini, anda juga akan menemukan beberapa korban luka tusuk, baik tahanan maupun sipir.

Saya telah melihat sendiri beberapa senjata buatan tahanan yang apa adanya. Mereka sering mengasah ujung sendok baja nirkarat (stainless steel) di lantai hingga tajam dan menjadikannya pisau kecil. Terkadang, mereka menggunakan bekas tabung plastik korek gas sebagai gagang. Senjata favorit tahanan yang lain adalah alat tusuk sederhana dari sikat gigi, yang dibuat dengan cara yang sama, karena lebih mudah untuk didapatkan. Meski hampir tidak pernah dipakai kecuali untuk memotong makanan, senjata tajam buatan tahanan terbukti pernah dipakai, seperti dalam kerusuhan Lapas Kelas II B Idi Rayeuk di Aceh Timur pada 13 Februari 2012. Senjata ini kurang efektif digunakan dalam pemberontakan tahanan, dan lebih sering digunakan untuk menyerang tahanan lain. Saya menyaksikan banyak tahanan yang menderita luka tusuk di perut dan dagu, sasaran favorit.

Karena hanya ada sedikit senjata dan hampir tidak ada bantuan dari luar, tahanan sangat menggantungkan kekuatan pemberontakan dari jumlah massa tahanan itu sendiri. Ini berarti mereka yang pertama melakukan konfrontasi dengan sipir, atau mereka yang mengorganisir tahanan untuk memberontak, mesti memastikan bahwa ada banyak tahanan yang terprovokasi, dan mereka harus terkonsentrasi atau tidak terkurung di

sel masing-masing. Di banyak pemberontakan, para tahanan berhasil menyekap sipir atau tahanan pendamping pemegang kunci, lalu membuka kamar tahanan lain. Terkadang kerusuhan spontan terjadi saat tahanan pergi ke ruang kunjungan, atau kegiatan luar kamar lainnya. Kerusuhan kemudian seperti kilat menjalar ke blok-blok tahanan dimana grendel beserta gembok kamar dirusak paksa agar dapat dibuka, dengan batu dan potongan besi apapun.

Waktu paling tepat untuk menyerang dalam berbagai pemberontakan yang dipersiapkan adalah ketika sebagian besar tahanan dikeluarkan dari kamar secara rutin. Tahanan Rutan Kelas II B Sialang Bungkuk, Pekanbaru misalnya, pernah memberontak pada 5 Mei 2017 seusai sholat Jumat. 448 tahanan melarikan diri dan seluruh pegawai, termasuk Kepala Rutan Sialang Bungkuk Teguh Trihatmanto, dicopot. Hingga awal bulan Juni, 133 tahanan masih buron. Para tahanan yang mengikuti sholat memastikan konsentrasi tahanan di satu titik. Jika pemberontakan dibuat lebih awal atau lebih terlambat, jelas hasilnya akan berbeda.

Banyak benda yang dilarang masuk ke dalam penjara, seperti narkoba dan peralatan elektronik, khususnya telepon seluler. Meski begitu, keberadaannya adalah rahasia umum, yang sering lolos berkat bantuan sipir melalui praktik penyuapan. Untuk memastikan kawasan penjara bersih dari benda terlarang, sipir kerap melakukan razia. Apakah ini adalah razia sungguhan atau pura-pura, sangat tergantung pada kebijakan Kepala Lapas dan kultur pungutan liar yang berkembang. Biasanya, praktik ini terbongkar setelah terjadinya kerusuhan, karena setelah kemarahan tahanan berhasil diredam, sering diadakan razia susulan oleh Kemenkumham.

Di penjara dengan kebijakan sangat ketat, razia akan menimbulkan perlawanan serius dari tahanan yang kerap merasa kepentingannya terancam. Seperti pada kerusuhan Lapas Kelas II A Jambi pada 1 Maret 2017. Razia narkoba yang direncanakan pada pukul 19.00 WIB itu gagal setelah tahanan melakukan perlawanan. Bentrokan pecah satu setengah jam kemudian, ketika tahanan melempari sipir dengan batu lalu membakar ruangan aula, kantin, koperasi penjara dan blok tahanan perempuan. Akibatnya, sejumlah tahanan terluka, termasuk yang terkena tembakan peluru karet. 85 tahanan perempuan kemudian dievakuasi ke Kantor Imigrasi Jambi.

Sulit untuk memastikan apakah saat kerusuhan, para tahanan berkomunikasi dengan kerabat dan kawan mereka di luar. Tetapi sudah jadi rahasia umum bahwa telepon seluler beredar diam-diam di kamar tahanan. Seorang tahanan bersaksi bahwa dalam suatu razia dadakan

setelah apel pagi, para sipir berhasil menyita 13 ember berisi telepon seluler. Video-video kerusuhan yang beredar selama ini selalu berasal dari rekaman yang diambil dari luar jeruji, langsung menghadap ke wajah tahanan dan diambil oleh sipir. Dapat disimpulkan bahwa pada detik-detik kerusuhan, para tahanan menyimpan telepon seluler mereka dan tidak mengambil gambar dari sudut pandang apa yang terjadi di balik jeruji. Meski begitu, peredaran telepon seluler sangat tergantung "kebijakan" masing-masing lapas. Secara umum, telepon seluler adalah salah satu benda yang dilarang. Tetapi di beberapa penjara dengan kebiasaan penyuapan terhadap sipir dan pungutan liar secara rutin, tahanan bebas menggunakan telepon seluler mereka.

Ada beberapa penjelasan lain mengapa nyaris tidak ada rekaman kerusuhan dari dalam penjara. Setidaknya hingga awal dekade 2010'an, telepon seluler dengan kamera masih jarang digunakan tahanan. Hingga sekarang, sebagian besar pemilik android adalah tahanan yang secara finansial mampu dan menempati blok-blok elit seperti tindak pidana korupsi. Pemberontakan di penjara Indonesia selalu dilakukan oleh tahanan narkotik, kriminal, dan terkadang tahanan terorisme, yang kerap tidak menikmati kemewahan seperti tahanan koruptor dan secara finansial lebih lemah.

Pendokumentasian kerusuhan oleh tahanan juga terhambat oleh kesadaran budaya keamanan (safety culture). Sebagian besar video dengan jelas menampakkan wajah tahanan yang terlibat, membuat mereka mudah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai provokator. Tampaknya tahanan tidak berani mengambil resiko lebih jauh untuk merekam apa yang tengah terjadi di dalam penjara, mengandaikan kemungkinan buruk bahwa mereka bakal dikalahkan. Untuk mempersulit identifikasi, tahanan sering menjadikan pakaian mereka sendiri untuk menutupi wajahnya.

Situasi jelas akan (dan sedang) berubah sekarang, seiring semakin banyak tahanan umum yang memiliki atau merampas telepon seluler sipir. Seperti terjadi saat pemberontakan tahanan teroris dari kelompok fundamentalis Islam di Rutan Mako Brimob di Depok, Jawa Barat pada 8-10 Mei 2018 yang terkenal itu. Para tahanan menguasai satu blok penjara selama tiga hari, menyandera enam polisi dan mengambil alih 26 senjata api dan 300 butir peluru. Akibat bentrokan itu, lima polisi dan seorang tahanan tewas. Salah seorang tahanan menyiarkan langsung situasi kerusuhan di Rutan Mako Brimob melalui akun Instagram dan Facebook pribadinya. Mereka mengklaim pemberontakan dimulai dari protes terhadap makanan kiriman keluarga yang tidak sampai ke tahanan. Ini juga satu-satunya pemberontakan penjara yang bertahan paling lama,

sekaligus dimana tahanan bernegosiasi pada polisi, merebut senjata api lalu menembaknya, dan mengajukan tuntutan (yang tidak dikabulkan).

Anehnya, meski selama satu dekade terakhir CCTV secara ketat mulai dipasang di seluruh sudut strategis penjara, hampir tidak ada satu pun rekaman kerusuhan yang tersebar. Entah untuk menutupi penyebab kerusuhan yang sebenarnya, atau menghilangkan bukti ketidakbecusan atau respon sipir dan polisi yang terlampau brutal dalam upaya meredam pemberontakan tahanan, rekaman CCTV di penjara tidak tersedia bagi publik. Meski begitu, para tahanan kerap melakukan perlawanan dan memprotes pemasangan CCTV di beberapa penjara. CCTV juga kerap jadi salah satu sasaran perusakan favorit para tahanan.

TAHANAN TERORIS DI RUTAN MAKO BRIMOB BERFOTO SETELAH MERAMPAS SENJATA PETUGAS PASCA KERUSUHAN AKIBAT MAKANAN BESUK DARI KELUARGA TIDAK DIBERIKAN, PADA 2018.

BAGIAN 2

Dari Kerusuhan Menuju Pemberontakan

"Saya tidak menuntut hak apa pun, oleh karena itu saya juga tidak perlu mengakui apa pun."

Max Stirner

Pada Minggu sore, 19 Februari 2012, Made Eriyasa, seorang tahanan di Lapas Kelas II A Kerobokan Denpasar, mengalami luka tusuk setelah terlibat dalam perkelahian akibat masalah hutang piutang dengan tiga tahanan lain. Tahanan yang merupakan kawan-kawan Made tidak terima dengan perbedaan perlakuan pada pelaku pengeroyokan. Para sipir diduga dengan sengaja menyimpan barang bukti berupa pisau yang digunakan untuk menusuk Made. Mereka kemudian mengamuk, merusak sejumlah fasilitas lapas dan menyerang sipir.

Kerusuhan berhasil diredakan, tetapi dua hari kemudian, pada tengah malam, para tahanan yang belum puas dengan langkah yang diambil oleh pihak sipir kembali melakukan kerusuhan yang jauh lebih besar. Tahanan menjebol hampir semua pintu blok dan menyerang sipir yang berlarian keluar lapas. Diberitakan pula bahwa tahanan sampai melempar molotov, yang menunjukkan adanya indikasi untuk dengan sengaja mempersiapkan kerusuhan. Api yang berasal dari ruang kantor depan lapas (termasuk ruang kepala lapas, ruang administrasi dan gudang penyimpanan senjata) merembet ke semua blok tahanan sehingga memaksa tahanan harus mendobrak pintu penjara. Selama hampir dua hari, tahanan menguasai lapas dan melempari polisi yang mendekat dengan batu. Personil Polres Badung dan Denpasar tidak bisa berbuat banyak dan masih menunggu pasukan Brimob dari Polda Bali untuk mengambil alih lapas. 500

personel gabungan TNI-Polri dikerahkan dan berhasil mengambil alih Lapas Kerobokan dengan memberikan beberapa tembakan menggunakan peluru tajam yang menyebabkan tiga tahanan menderita luka tembak di kaki pada hari ketiga, Kamis, 23 Februari.

Ini bukan kerusuhan pertama dan yang terakhir yang pernah terjadi di Lapas Kerobokan. Pada 25 Juni 2011, tahanan Lapas Kerobokan langsung rusuh saat Badan Narkotika Nasional (BNN) meringkus tahanan bernama Riyadi, yang diduga pengedar narkoba di dalam penjara. Tahanan menyerang sipir dan anggota BNN yang bersenjata lalu merusak berbagai fasilitas kantin, tempat ibadah dan ruang Kepala Lapas. Pada 2015, kerusuhan kembali terjadi akibat bentrokan antar tahanan dari dua anggota organisasi masyarakat yang berbeda, yang meluas hingga terjadinya kerusuhan di luar lapas. Empat orang tewas, dua diantaranya adalah tahanan saat kerusuhan di penjara. Jadi ada tiga kerusuhan, yang masing-masing terjadi pada 2011, 2012 dan kemudian 2015. Tetapi hanya dua kerusuhan pertama (2011 dan 2012) yang berubah menjadi pemberontakan.

Kerusuhan (riot) dan pemberontakan (insurrection) adalah dua hal yang berbeda. Kerusuhan, dalam definisi saya, pada dasarnya adalah bentuk konflik yang melibatkan kelompok dengan jenis dan bobot kekuasaan (power) yang relatif seimbang. Kerusuhan adalah konflik yang berlangsung secara horizontal. Sementara itu pemberontakan adalah kebalikannya, antara yang lemah melawan yang kuat, antara yang dikuasai dengan yang menguasai. Jadi, pemberontakan adalah konflik vertikal, melawan otoritas. Yang pertama adalah konflik antar tahanan, yang kedua adalah konflik tahanan melawan sipir dan polisi.

Ketika saya menggunakan kata "kerusuhan", harusnya saya merujuk pada peristiwa yang terjadi di Nusakambangan pada 2017 ketika terjadi keributan antara tahanan teroris dan tahanan anak buah John Kei, yang mengakibatkan satu orang meninggal. Atau yang telah saya bahas telah terjadi di Lapas Kerobokan pada 2015, menyusul Rutan Pemalang pada 2018 dan Rutan Surakarta pada 2019. Kerusuhan tersebut murni konflik antar tahanan. Saya dengan sengaja abai untuk membahas kerusuhan-kerusuhan tersebut, sebab saya ingin memusatkan perhatian pada kerusuhan yang berujung pada serangan ke sipir dan perusakan atau pembakaran penjara. Selain itu, saya juga memutuskan untuk mencampuradukkan penggunaan antara kedua istilah tersebut. Sebab pemberontakan tahanan pasti berwujud dalam kerusuhan penjara, meski kerusuhan belum tentu menjadi pemberontakan.

POLISI MENGAMANKAN TAHANAN LAPAS BANDA ACEH SETELAH KERUSUHAN YANG MEMBAKAR HABIS PENJARA PADA 2018.

Alfredo M. Bonanno, seorang teoretikus anarkis-insureksioner Italia, menggunakan pengertian yang berbeda untuk keduanya. Dalam esai From Riot to Insurrection, ia memandang kerusuhan sebagai gejala dari perkembangan masyarakat post-industrial yang secara efektif telah membagi masyarakat manusia menjadi dua. Dalam sebutannya Bonanno sendiri, yaitu "yang termasuk" (included) dan "yang tersisihkan" (excluded). Yang Tersisihkan, adalah "mereka yang dikeluarkan dari proses produktif dan dihukum karena ketidakmampuan mereka untuk memasukkan diri mereka ke dalam logika persaingan modal yang baru." Revolusi komputer di masa depan adalah jenis mesin yang baru, yang dipersenjatai dengan bahasa yang hanya dapat dipahami oleh segelintir orang yang memiliki hak istimewa. Bukan ketiadaan lapangan pekerjaan yang secara negatif menentukan Yang Tersisihkan, tetapi kurangnya akses terhadap informasi. Yang Tersisihkan, adalah mereka yang terpinggirkan karena model produksi baru akan mengurangi ketersediaan informasi.

Pengantar oleh Jean Weir dalam terjemahan Bahasa Inggris untuk tulisan Bonanno bisa dibilang mewakili penjelasannya dengan lebih baik:

"Jeritannya adalah kekerasan yang tak menuntut apapun. Kerusuhan atau ledakan mungil yang kini sering terjadi, khususnya di negeri ini, tak punya tuntutan rasional untuk dibuat. Mereka bukan sarana untuk mencapai suatu tujuan sebagaimana kerusuhan demi roti [bread riot]

di masa lalu. Mereka telah menjadi sesuatu dalam diri mereka sendiri, dorongan yang irasional, yang kerap menyerang sasaran represi yang mudah dikenali (kantor polisi, kendaraan, sekolah, kantor pemerintah, dll.), tetapi belum tentu demikian. Kekerasan di stadion sepak bola tidak bisa dikesampingkan dari logika ini."

Analisis Bonanno tentang masyarakat post-industrial adalah penyederhanaan yang berlebihan. Tetapi pandangannya tentang kerusuhan irasional mungkin bakal berguna untuk menjelaskan perilaku destruktif tahanan. Dalam pengertian Bonanno diataslah kita akan memulai pembahasan mengenai kerusuhan penjara.

Ketidakjelasan Revolusioner

> *"Kerusuhan adalah suara dari orang-orang yang tak didengarkan."*
> **Martin Luther King Jr.**

Pada pagi hari 1 April 2016, seorang perempuan mengunjungi suaminya di Lapas Kelas II B Kuala Simpang, Aceh Tamiang. Kunjungan ini akan berujung pada pembakaran bangunan lapas karena sang tahanan merasa tersinggung terhadap ucapan Kepala Lapas yang tidak pantas: ia mengatakan agar tahanan mestinya bercinta di rumah, bukan di lapas. Ada dua versi berbeda dari kronologi tersebut. Versi pertama, yang memojokkan tahanan, menjelaskan bahwa ucapan itu terjadi saat tahanan tersebut memohon agar diperbolehkan meminjam kamar milik tahanan korupsi yang akan dijadikan 'bilik asmara' untuk bercinta dengan istrinya. Versi lain menjelaskan bahwa ucapan itu terjadi saat tahanan mengantarkan istrinya ke toilet yang berada di dalam blok tahanan, karena memang tidak ada toilet umum yang tersedia bagi pengunjung.

Bagaimanapun, ucapan ini nantinya memancing kekesalan tahanan lain yang mengamuk saat pembukaan pertandingan olahraga tahanan di hari yang sama. Mulanya para tahanan membakar spanduk pembukaan olahraga, lalu melempar batu ke sipir dan memecahkan kaca di ruangan kepala keamanan. Ketika sipir mundur, tahanan langsung merangsek dan melakukan perusakan dan membakar semua ruangan dinas lapas. Dilaporkan bahwa para tahanan meneriakan yel-yel anti-polisi dan meminta agar Kepala Lapas dicopot. Pemberontakan diredam setelah personel TNI-Polri dikerahkan, tetapi ini bukannya tanpa perlawanan. Tiap kali polisi mendekat, mereka disambut dengan lemparan batu. Baru ketika asap mulai mengepul dari ruang besuk tahanan, polisi menggunakan tameng dan mendobrak paksa ke dalam disusul dengan pemadam kebakaran.

Setelah kunjungan pimpinan daerah dan militer setempat, para tahanan mulai menyampaikan keluhan mereka. Tahanan menuntut penyediaan

bilik asmara, perpanjangan jam kunjungan dari pukul delapan pagi hingga enam sore, penyediaan toilet untuk pengunjung, pengumuman remisi secara transparan, permohonan cuti keluarga dan asimilasi tidak dipersulit, serta diberlakukan kembali peraturan pembebasan bersyarat. Dari yang sebelumnya tersinggung karena ucapan Kepala Lapas, tahanan menyemburkan banyak sekali tuntutan.

Baru-baru ini, kerusuhan juga terjadi di Rutan Kelas II B Raba, Bima, Nusa Tenggara Barat, pada 1 Februari 2022. Seorang tahanan pidana kriminal, memprovokasi tahanan lain untuk memprotes Kejaksaan Negeri Bima karena dianggap sidangnya berlangsung berbelit-belit, padahal ia sudah berdamai dengan korban. Ia mengajak tahanan lain untuk secara paksa menuju Pengadilan Negeri Raba Bima. Mereka kemudian melempar batu, memecahkan kaca-kaca, lalu kabur dengan menerobos keluar sambil menghajar tiga sipir yang berjaga dengan senjata tumpul. Satu kendaraan bermotor milik pengendara yang lewat juga dirampas. 19 tahanan berhasil kabur, meski sembilan diantaranya berhasil ditangkap kembali setelah dikejar dengan bantuan personil TNI-Polri.

Bagaimana kekesalan-kekesalan ini, yang sangat personal ini, bisa berujung pada perusakan penjara dan tahanan melarikan diri? Dalam meninjau berbagai kerusuhan penjara dan pemberontakan tahanan, saya mengenali beberapa pandangan berbeda. Yang pertama seringkali melihatnya sebagai pelepasan liar dan tak terkendali dari energi primal, yang jadi karakter umum tahanan, khususnya kriminal. Apa lagi yang dapat kita katakan mengenai "penjahat" yang melawan sipir? Ini seperti kepercayaan bahwa sudah sifatnya para tahanan yang pada dasarnya susah diatur. Inilah yang membuat mereka dihukum, dan sifat alamiah ini menjelaskan mengapa mereka kerap berbuat onar di dalam penjara.

Yang kedua, kecenderungan untuk memandang kerusuhan sebagai semacam ketidakdewasaan politik, atau kegagalan untuk menjelaskan asal perasaan benci, amarah, muak, atau kebosanan. Menurut Bonanno, kerusuhan merupakan pergerakan orang yang mengandung sifat irasional yang kuat dan karenanya bisa dimulai karena alasan apa pun. Inilah sekat dan jarak yang membedakan antara Yang Termasuk dan Yang Tersisihkan:

"Kehilangan bahasa referensi umum, orang-orang ghetto tidak akan lagi dapat membaca pesan-pesan kekuasaan yang tersirat, dan pada akhirnya tidak akan memiliki jalan keluar lain selain kerusuhan yang spontan, irasional dan destruktif, yang jadi tujuan akhirnya sendiri."

Ia dapat menjadi jelas jika kita mencoba menjawab pertanyaan berikut: Apa yang terjadi ketika struktur dominasi berhasil dihancurkan? Apa yang terjadi jika penjara dibakar? Jika tahanan menginginkan reformasi

untuk mewujudkan kondisi penjara yang lebih baik, mengapa mereka justru membakarnya?

Kerusuhan penjara bisa saja dimulai dengan minat untuk reformasi, tetapi berakhir dengan keinginan untuk sesuatu yang tidak dapat dikabulkan. Kedua kerusuhan ini mewakili tuntutan yang tidak mungkin: penghancuran penjara dan pembebasan tahanan. Mereka memang tidak secara terang-terangan mengatakan menuntut pembubaran penjara dan pembebasan tahanan. Tapi mereka mewakili gairah tak terkatakan, sebuah ekspresi mandul dari pikiran tahanan, yang hanya dapat dipahami bukan dari apa yang mereka katakan, tetapi dari tangan-tangan yang melempar batu, pintu penjara yang dibobol, dan para tahanan melarikan diri.

Saat tahanan menyerang sipir, mereka tahu siapa yang mesti disasar. Saat mereka membakar penjara, mereka tahu apa yang mesti mereka hancurkan. Kerusuhan di Lapas Kuala Simpang dan Rutan Raba Bima adalah perwujudan dari pembubaran diri para tahanan sebagai tahanan dan sekaligus pemusnahan penjara, yang meski tidak tampak secara resmi dalam salah satu tuntutan mereka, tapi muncul dari tindakan dan sasaran perusakan itu sendiri. Ini sama saja dengan yang biasa terjadi saat buruh mogok kerja menuntut reformasi tempat kerja demi upah, jam kerja yang lebih baik atau kondisi kerja layak, tetapi berakhir dengan kerusuhan menyerang bos mereka sendiri dan membakar pabrik-pabrik tempat mereka mendapatkan upah. Mereka tidak mengatakannya. Memang, "tidak ada retorika konkret, tapi ada gestur yang konkret."

Hal serupa juga bisa dikatakan tentang kebencian tahanan terhadap polisi. Sebagai "korban" dari sistem pemidanaan, para tahanan kerap memiliki dendam terhadap polisi yang telah menangkap dan kerap menyiksa mereka. Ketika orang-orang dengan sentimen anti-polisi yang sama berkumpul di satu tempat, ini adalah waktu yang berbahaya bagi polisi. Pada 1 Juni 2016, kebencian ini diekspresikan dalam bentuk kekerasan ketika polisi yang sedang mengawal tahanan kejaksaan yang akan dimasukkan ke Lapas Kelas II Gorontalo terlibat perkelahian dengan seorang tahanan hanya karena tanpa sengaja (?) bersenggolan. Polisi yang tersinggung segera menendang tahanan tersebut, yang justru memantik tahanan lain menyerang polisi. Akibatnya, satu di antara personil polisi itu terkena luka tusuk.

Pengeroyokan itu segera melebar menjadi kerusuhan ketika pada malam harinya polisi hendak menangkap tahanan yang melakukan penusukan. Tahanan menyambut polisi dengan lemparan batu dan molotov, yang menunjukkan bahwa tahanan telah mempersenjatai diri untuk penahanan susulan akibat peristiwa yang terjadi pada siang harinya.

Polisi kemudian memberikan tembakan peringatan dan menembakkan gas air mata ke dalam penjara. Ketika kerusuhan diredam, sipir dan polisi menemukan banyak pisau, parang, tombak dan gunting yang diperkirakan digunakan tahanan selama kerusuhan. Kerusuhan Lapas Gorontalo juga mencerminkan sentimen anti-polisi yang sama dengan kerusuhan Lapas Kelas II Lambaro, Aceh Besar pada 31 April 2012 (lihat Bagian 5).

Kasus-kasus kerusuhan di atas menghadirkan ketidakjelasan revolusioner [revolutionary vagueness] yang sangat menggairahkan bagi para tahanan yang hendak menantang dunia yang mereka kenal. Ketidakjelasan ini tidak mengklaim bahwa mereka tahu jawabannya, tetapi mereka mengklaim tahu apa yang jadi masalahnya. Ini bukan berarti bahwa tahanan terlalu bodoh, atau mereka tidak memiliki kesadaran kelas yang revolusioner. Tetapi jelas, bahwa sementara mereka kerap patuh pada sistem, sebenarnya mereka memiliki semacam…

Kemarahan Akan Segalanya

> *"Kerusuhan tidak menunggu kondisi material."*
> **Lev Zlodey & Jason Radegas**

Ketika tahanan gagal mencapai tujuan penting akibat hambatan dan tekanan kehidupan penjara, tahanan sangat mudah menjadi frustasi. Frustrasinya bukanlah fenomena yang terisolasi. Ketidakpuasannya bukanlah sesuatu yang unik. Itu sama umum terjadi pada sebagian besar tahanan lain yang mengalaminya. Entah itu ketiadaan pelampiasan sarana seksual atau persidangan yang berlarut-larut, pada akhirnya hasrat yang buntu dan ketidakpastian hanya menyebabkan gairah untuk ketidakpatuhan yang semakin besar. Fire to The Prison #7 kembali mengartikulasikan ini dengan baik:

> "Tidak peduli bagaimana Anda melihat situasi ini, mereka semua bertindak sebagai gangguan bagi kedamaian dan kenormalan kehidupan modern sehari-hari; sebuah kendaraan angkut yang bermuatan apatis dan kepatuhan hingga kemudian tumpukan sampah pemaksaan dan dominasi ditelantarkan dan dibakar. Momen-momen ini menghadirkan konteks untuk frustrasi yang dapat diakses yang berupaya menjelajah perwujudannya di luar batas-batas politik."

Sejujurnya, saya tidak membeda-bedakan yang "personal" dengan yang "politis". Hari ini, ketika kekuasaan mendominasi setiap aspek kehidupan, apapun yang personal bisa jadi sangat politis. Meski begitu, apa yang dimaksud "politis" dalam teks ini kembali merujuk pada Bonanno:

"Bahkan sekarang banyak anak muda yang tidak mampu lagi mengevaluasi situasi yang mereka hadapi. Tercabut dari budaya minimum yang pernah disediakan sekolah, dibombardir secara serampangan oleh pesan-pesan yang berisi kekerasan tanpa tujuan, mereka didorong dalam seribu cara menuju pemberontakan yang terburu-buru, irasional dan spontan, dan kehilangan tujuan "politik" yang dapat diterawang dengan jelas oleh generasi sebelumnya."

Kegagalan untuk menyibak akar penderitaan kita, ketiadaan sarana untuk menyampaikannya, atau ketidakmampuan untuk mengubahnya, adalah kondisi ideal untuk rasa frustasi pribadi. Para tahanan tidak akan menjelaskan bahwa pengrusakan yang ia lakukan adalah bentuk perlawanan terhadap instrumen kontrol peradaban kapitalis-industrial. Ia tidak akan mengajukan alasan-alasan yang secara konvensional dapat dikatakan "politis". Ini jauh lebih personal lagi, sesuatu yang kadang bisa dianggap sepele, seperti tersinggung oleh ejekan. Itu sebabnya secara tiba-tiba perusakan penjara bisa dimulai dari perkelahian antar tahanan. Pada 8 Juli 2018, dua tahanan di Rutan Kelas II B Pemalang berkelahi karena saling ejek masalah subsider pidana. Perkelahian itu membuat salah satu tahanan tertusuk, tetapi langsung merembet dan melibatkan tahanan lain, yang segera merusak tiga pintu keamanan, sembilan pintu kamar, serta memecahkan kaca-kaca di ruang kerja sipir.

Bisa jadi, aspirasi tahanan tidak tersampaikan dengan baik di media dan saya hanya menduga-duga, bahwa saya hanya mengutip literatur anarkis untuk mengkontekstualisasikannya dalam kerusuhan penjara di Indonesia. Tetapi, saya tidak mendapatkan penjelasan yang baik bagi fenomena tawuran pelajar, atau geng motor, atau suporter sepak bola, selain bahwa kelompok-kelompok ini, menyalurkan kemarahan mereka dalam amukan di luar lajur politis. Tahanan tidak dapat menyalurkan kemarahan mereka kemana pun selain pada sesama tahanan, sipir dan infrastruktur penjara!

Karena kerusuhan mengandung karakter irasional yang kuat, ia bisa dimulai karena apapun. Dalam hal ini maka kita perlu mempertimbangkan alasan-alasan yang kurang politis. Misal: tahanan mencoba melawan kejenuhan dan kebosanan. Ketika pagar penjara dibangun semakin tinggi, dindingnya dibuat semakin tebal, dan para tahanan dibuat seterasing mungkin dari dunia, telepon seluler adalah bagian dari teknologi dominan yang para tahanan coba perjuangkan aksesnya. Kembali Bonanno menjelaskan bahwa…

"Dalam proyek-proyek kontrol mereka, Yang Termasuk mencoba membentuk konsensus umum dengan mengurangi kesulitan ekonomi

bagi para Yang Tersisihkan. Yang Termasuk dapat menyediakan bagi mereka Yang Tersisihkan bahasa prefabrikasi untuk memungkinkan penggunaan sebagian dan penggunaan tanggung dari beberapa teknologi dominan. Yang Termasuk juga bisa memberi Yang Tersisihkan kualitas hidup yang lebih baik. Tetapi mereka tidak akan mampu mencegah ledakan kekerasan irasional yang muncul dari perasaan tidak berguna, dari kebosanan dan dari suasana ghetto yang mematikan."

Tanpa ruang dan kesempatan untuk pengembangan diri, tahanan jelas adalah kelompok yang paling merasa tidak berguna dari seluruh komposisi masyarakat. Terkurung di dalam sel, menjalani kehidupan harian dalam kemonotonan akut, tahanan juga jadi kelompok yang paling merasakan kebosanan hidup. Fasilitas yang buruk menjadikan penjara sebagai ghetto dengan suasana paling mematikan. Kekerasan struktural akibat penganiayaan sipir, perang geng, atau terjepit di antara para tahanan jagoan, pungutan liar dan pemerasan, tahanan lebih dari sekedar dibombardir oleh kekerasan; kekerasan adalah bagian dari hidup mereka, bagi beberapa tahanan, itu bahkan sarana untuk bertahan hidup. Lebih dari suporter, kaum miskin kota, atau pelajar, para tahanan bisa jadi bagian dari kelompok Yang Sangat Tersisihkan (the most excluded), yang paling memiliki prasyarat lengkap untuk terlibat dalam "pemberontakan yang terburu nafsu, irasional dan spontan, dan kehilangan tujuan 'politik'" sebagaimana dimaksud Bonanno.

Betul bahwa telepon seluler penting bagi tahanan yang membutuhkan komunikasi dengan keluarga, pengacara atau rekan kerjanya. Tetapi smartphone hari ini, bagi tahanan, pada sebagian besar waktunya lebih sering berfungsi sebagai sarana hiburan ketimbang komunikasi. Para tahanan di Indonesia berulang kali melakukan kerusuhan karena menolak razia telepon seluler. Pada 11 November 2015, 23 tahanan Lapas Kelas II B Majalengka yang berasal dari satu kamar melempar dan menumpahkan nasi bekas sarapan mereka, lalu keluar menuju lapangan voli sambil berteriak-teriak setelah tiga telepon seluler ditemukan di kamar mereka. Kerusuhan gagal membesar karena mereka keburu diamankan. Tetapi kerusuhan di Lapas Kelas I Kesambi Cirebon pada 21 Maret 2018 berhasil membuat frekuensi razia telepon seluler dikurangi setelah tahanan mengamuk, melempari sipir dengan batu dan merusak beberapa CCTV. Tahanan perempuan di Lapas Pontianak juga berhasil mendapatkan kembali telepon mereka setelah menghancurkan berbagai peralatan dan fasilitas penjara pada Selasa malam, 28 September 2021, karena menurut pernyataan salah satu tahanan sendiri, "[telepon seluler] itulah satu-satunya hiburan yang mereka miliki."

Pada kasus yang unik, kerusuhan juga bisa berasal dari persoalan cinta. Seorang tahanan Rutan Lhoksukon di Aceh Utara misalnya, nekat mendobrak pintu kamarnya karena hendak membunuh kekasihnya sendiri, yang menjadi tahanan perempuan di rutan yang sama. Keduanya terlibat dalam kasus pembunuhan berencana, dimana suami pertama perempuan tersebut dibunuh sesuai permintaan perempuan agar keduanya bisa menikah. Sebagai akibatnya, sang lelaki dihukum penjara seumur hidup, sementara sang perempuan dihukum penjara 15 tahun. Tetapi ia merasa bahwa perasaan cinta pasangannya perlahan memudar, sampai mencuci pakaian miliknya pun sudah tak mau lagi. Ia juga cemburu dengan tahanan lain, menduganya sebagai penyebab mengapa kekasihnya berperilaku berbeda.

Rasa sakit hati itu berujung pada rencana pembunuhan lain. Pada Minggu, 16 Juni 2019, ia mendobrak pintu pertama sambil membawa sikat gigi yang sudah diruncingkan. Melihat aksinya, tahanan lain yang tak ada hubungannya dengan kisah percintaan keduanya itu ikut membantu mendobrak pintu lapisan kedua dan ketiga. Sipir yang mengetahui kerusuhan segera mengunci blok tahanan perempuan, membuat sang tahanan yang sakit hati tidak dapat melangsungkan rencana pembunuhannya. Kebingungan dengan apa yang harus dilakukan, ia menyusul tahanan lain yang melarikan diri. Tidak dijelaskan apakah ada serangan terhadap sipir, tetapi selain pintu keamanan, kaca-kaca perkantoran rutan juga pecah. 73 tahanan berhasil kabur, meski 29 diantaranya tertangkap keesokan harinya. Satu tahanan meninggal dunia karena tenggelam di sungai saat melarikan diri.

Beberapa kasus di atas mungkin menunjukkan bagaimana kasus yang sifatnya sangat personal, bisa menjadi politis karena kemarahan seorang tahanan yang meledak-ledak mewakili akumulasi kemarahan serupa oleh tahanan lain. Ketika tahanan lain melihat kesempatan untuk melampiaskan kemarahannya, amukan seorang tahanan dapat berubah menjadi kerusuhan penjara. Saat itulah, kerusuhan penjara kerap bekerja dengan cara yang tidak dapat kita duga, sebagaimana dijelaskan lagi dalam majalah Fire to The Prison #7:

"Kerusuhan biasanya dimulai dengan beberapa keluhan, terkadang dengan tuntutan yang jelas. Kerusuhan juga bisa dimulai tanpa tuntutan, tetapi diakhiri dengan tuntutan. Di lain waktu, kerusuhan dimulai dengan tuntutan tertentu, tetapi berakhir dengan ketidakpedulian apakah hal itu dipenuhi atau tidak."

Menuju Pemberontakan

> *"Kerusuhan di masa depan akan menjadi semakin berdarah dan mengerikan. Terlebih lagi ketika kita tahu bagaimana mengubahnya menjadi pemberontakan massal."*
> **Alfredo M. Bonanno**

Tentu saja, jika banyak penjara hancur dan tahanan melarikan diri akibat masalah-masalah sepele, kita bisa bayangkan apa yang terjadi dengan penjara yang memiliki masalah serius dengan tahanannya. Kerusuhan tahanan yang terjadi secara spontan dapat menyebabkan dampak merusak bagi penjara, tetapi masalah yang jauh lebih akut dapat melipatgandakan tegangan-tegangan itu.

Sekarang, kita kembali ke kasus penusukan Made Irayasa pada 2012 di Lapas Kerobokan. Kerusuhan tersebut berpotensi insureksional karena adanya ketidakpuasan terhadap sipir lapas. Benih-benih ketidakpuasan yang lain, yaitu pungutan liar dan kelebihan daya tampung (saat itu, Lapas Kerobokan menampung 1.500 tahanan dari kapasitas 330 tahanan yang sebenarnya), mencuat di saat yang tepat: seorang tahanan baru saja tertusuk dan sipir berperilaku tidak adil. Kerusuhan pada 2012 itu dimulai oleh para tahanan yang menuntut supaya kasus penganiayaan terhadap Made diproses tuntas.

Dengan demikian kerusuhan Lapas Kerobokan pada 2012 menunjukan transformasi bentuk sekaligus eskalasi konflik dari yang sebelumnya adalah kerusuhan, menjadi suatu pemberontakan terbuka. Dari yang semula adalah perkelahian antar tahanan, berubah menjadi pemberontakan yang tampaknya dengan sengaja telah dipersiapkan. Dari yang sebelumnya konflik horizontal, menjadi konflik vertikal. Dari yang sebelumnya irasional, menjadi konflik yang memiliki tujuan untuk dicapai, dengan keluhan dan tuntutan yang jelas.

Kita hanya harus berhenti berpikir bahwa pemberontakan seolah-olah hanya dimonopoli oleh kelompok yang secara politis disebut sebagai "pemberontak": kaum revolusioner kiri, jihadis, kelompok bersenjata separatis, atau oposisi politik. Hanya karena gerakan kiri secara organisasional dihancurkan, dan tidak ada kelompok politik yang secara efektif dapat diandalkan para tahanan di Indonesia saat ini, bukan berarti bentuk-bentuk perlawanan secara alamiah juga hancur. Ini mungkin terdengar kontroversial, tetapi saya mencoba mengklaim bahwa kerusuhan adalah salah satu cara untuk menyalurkan kegeraman bagi mereka yang kehilangan argumentasi politisnya.

Sekarang, mari kita bahas pemberontakan tahanan yang sungguhan.

TAHANAN LAPAS NARKOBA HINAI LANGKAT MENUNTUT AGAR KEPALA LAPAS DIBERHENTIKAN, PADA 2019.

BAGIAN 3

Yang Liar Menghancurkan Kerangkeng dari Dalam

"Hendak mendobrak penjara yang memperbudak kita, penjara adalah salah satu kesamaan yang kita miliki, jadi kita akan berjuang untuk kebebasan kita sampai nafas terakhir kita."
Zerman Elias Valle

Pada Kamis, 16 Juli 2017, kaca-kaca kantor Lapas Narkotika Kelas II B Serong di Palembang pecah akibat lemparan batu. Para tahanan juga membakar piring-piring plastik yang kotor dan tidak layak, membakar kasur dan meja tenis, menjarah bahan makanan dan obat di dapur dan klinik, serta merusak kaca satu mobil tangki air. Ini adalah salah satu pemberontakan tahanan terorganisir yang pernah terjadi di Indonesia, sekaligus pemberontakan yang tuntutannya dipenuhi. Saya mewawancarai Alex, seorang mantan tahanan yang pernah terlibat dalam pemberontakan di Lapas Serong pada 2017, untuk menggali detail perencanaan, perumusan tuntutan, sekaligus kronologi sebenarnya dari pemberontakan tahanan tersebut, mengingat banyak dari laporan media seringkali kurang akurat.

Salah satu masalah utama di Lapas Serong, sebagaimana di penjara lain saat ini, adalah tahanan yang terlampau membludak. Lapas Serong berkapasitas 484 orang, tetapi pada pertengahan 2017 ketika pemberontakan berlangsung, ia sedang dihuni 663 orang. Beberapa bulan sebelum pemberontakan, jumlah tahanan meningkat drastis setelah terjadi pemindahan tahanan secara berkala dari Lapas Kelas I Merah Mata Palembang, yang konon, kondisinya jauh lebih baik. Merasa

terkejut dengan kondisi baru, mereka inilah yang menurut Alex jadi penggerak utama pemberontakan itu. Diantara tahanan itu, terdapat Yudi dan Cili, yang nanti menjadi dua tokoh utama pemberontakan.

Pertama kali berada di Lapas Serong, kurang lebih 30 tahanan yang baru saja dipindahkan harus menjalani masa pengenalan lingkungan (penaling), yang sebenarnya tidak lebih dari penahanan di sel karantina berukuran 3x4 meter selama 15 hari. Dengan kondisi seperti itu, para tahanan baru mesti berdesak-desakan. Alex menjelaskan bahwa untuk dapat keluar dari sel karantina dan turun kamar ke blok tahanan, mereka harus membayar Rp 300 ribu (beberapa media bahkan melaporkan pungutan sebesar Rp 1 juta). Kepala Regu Pengamanan (Karupam), Sofwan, adalah dalang dibalik pungutan liar itu. Tiap kali bertugas, ia dilaporkan kerap meminta uang dan rokok. Para tahanan mesti mengeluarkan satu bungkus rokok bahkan tiap kali keluar kamar untuk mencari udara segar selama 15 menit. Para tahanan menjelaskan Karupam saat itu sebagai "diktator", sebab ia juga sering melakukan penganiayaan terhadap tahanan.

Ada beberapa keluhan lain yang tidak dilaporkan media. Beberapa diantaranya adalah istri Karupam saat itu, juga berdinas di Lapas Serong menjadi Kepala Klinik. Apapun penyakit yang dikeluhkan tahanan, klinik hanya menyediakan Chlorpheniramine (CTM). Tanpa peredaran telepon seluler, tahanan juga mesti memanfaatkan warung telepon dengan biaya Rp 1000/menit. Pungutan liar juga berlaku pada keluarga yang hendak berkunjung, dan makanan yang mereka kirimkan kerap tidak sampai ke tangan tahanan secara utuh. Karena itu, para tahanan bergantung pada makanan jatah yang sangat tidak layak, ditaruh di piring makanan yang kotor.

Kepada media para tahanan menyatakan bahwa ini adalah kerusuhan spontan dan tidak memiliki koordinator. Tapi bukan itu yang sebenarnya terjadi. Tentu saja tahanan saat itu sadar akan konsekuensi yang perlu mereka tanggung, dan mereka sadar dengan kabar nasional yang tengah terjadi. Dua bulan sebelumnya, ratusan tahanan melakukan kerusuhan di Rutan Sialang Bungkuk Pekanbaru dan melarikan diri. Penting bagi tahanan di Lapas Serong untuk memastikan bahwa tindakan mereka tidak dapat disamakan dengan apa yang terjadi di Pekanbaru.

SEJUMLAH TAHANAN MEMBAKAR BAN DAN MELEMPARI KACA SAAT TERJADINYA KERUSUHAN DI LAPAS TUMINTING MANADO PADA 2020.

Sebelum pemberontakan terjadi, para tahanan baru yang berpengaruh di blok Battuta, bersama dengan tahanan dari blok Ibnu Sina, mengorganisir sebuah pertemuan di Battuta. Disepakati bahwa selama pemberontakan berlangsung, tidak boleh ada tahanan yang melarikan diri. Lapas Serong memang dikhususkan untuk menampung tahanan dengan tindak pidana narkotik yang lebih ringan. Sementara itu, tahanan dengan hukuman tinggi di Sumatera Selatan, biasanya di atas delapan tahun, akan ditempatkan di Lapas Kelas I Merah Mata di Palembang. Karena itu, tahanan Serong enggan mengambil resiko terlalu jauh dengan mencoba membakar penjara atau melarikan diri sementara mereka menjalani hukuman yang relatif ringan. Mereka juga menyepakati apa saja tuntutan yang akan diajukan, yaitu dihapuskan praktik pungutan liar, pengadaan televisi, diperbolehkan memiliki telepon seluler serta makan layak dan piring makan yang baru. Mereka sudah menentukan kapan pemberontakan dilakukan: ketika Sofwan bertugas.

Pada pagi hari yang telah ditentukan, para tahanan dari blok Battuta langsung menyandera tamping kunci (di media berinisial TF) yang datang. Dengan menguasai kunci, tahanan memiliki akses untuk membuka seluruh kamar di blok Battuta. Kericuhan segera diketahui,

dan sipir dengan sigap segera mengamankan kunci-kunci kamar blok lain. Pada detik dimana tahanan mengkonfrontasi Sofwan, ia mengeluarkan tembakan peringatan, yang justru membuat tahanan semakin beringas. Mereka melempari sipir dengan batu, membuat sipir kabur dan segera meninggalkan Lapas Serong dengan motor dan mobil menuju pusat kecamatan terdekat. Diketahui bahwa di sepanjang jalan, para sipir memberitakan kepada masyarakat sekitar bahwa tahanan Lapas Serong akan melarikan diri. Hanya beberapa sipir yang bertahan di dalam penjara, secara persuasif mencoba menenangkan tahanan meski gagal. Para tahanan memandang mereka sebagai sipir yang dianggap berperilaku baik, sehingga mereka tidak dianiaya.

Tahanan blok Battuta segera merusak grendel dan pintu kamar di blok Badar dengan batu-batu yang dapat ditemukan di halaman. Mereka meminta seluruh tahanan agar keluar kamar dan berkumpul di halaman penjara. Dari situ, kerusuhan segera menyebar ke blok tahanan lain dan seluruh tahanan membebaskan diri mereka dari kamar, lalu memulai perusakan dan pembakaran properti penjara. Tentu saja, sesuai dengan kesepakatan di awal, para tahanan tidak bermaksud melarikan diri (seorang tahanan lain yang terlibat mengaku pada saya bahwa ia merencanakan pelarian). Mereka berhasil menjebol beberapa pos keamanan dan telah mencapai ke gerbang utama yang langsung menghadap ke luar penjara, tetapi tidak merusaknya.

Pemberontakan berlangsung beberapa jam, tetapi reda dengan sendirinya setelah Kanwil Kemenkumham, serta pejabat TNI-Polri mendatangi lokasi kejadian. Dari situ, negosiasi berlangsung. Para tahanan mengancam bakal memberontak lagi andai tuntutan mereka tidak dipenuhi. Selain itu, Karupam Sofwan dan istrinya dipindahtugaskan. Pintu-pintu kamar yang rusak perlu waktu sehari untuk diperbaiki grendel dan gemboknya. Jadi untuk semalam saja, para tahanan tidur di halaman dan di lorong, bukannya di kamar. Dalam beberapa hari, seluruh tuntutan mereka dipenuhi, kecuali untuk memiliki telepon seluler.

DARI PENJARA KE PENJARA

> *"Pemberontakan, dengan serangan bertubi-tubi, dengan ketiadaan prospek akan masa depan, dengan negasi absolutnya terhadap politik: menciptakan harapan, memutus rantai yang membelenggu."*
>
> **Alfredo M. Bonnano**

Pada bagian sebelumnya, saya telah membedah *kerusuhan* penjara dan menjelaskan perilaku destruktif tahanan. Karena itu bagian ini akan mendeskripsikan *pemberontakan* tahanan, baik yang spontan maupun yang (diduga) terorganisir. Saya menyebutnya sebagai "pemberontakan" karena ia disebabkan oleh berbagai alasan, mulai dari pemerasan dan pungutan liar, kualitas dan porsi jatah makanan, perlawanan terhadap razia dan penangkapan tahanan, penganiayaan oleh sipir, kelebihan daya tampung, buruknya fasilitas penjara, dan sulitnya administrasi dalam mengurus pembebasan tahanan. Saya menyebutnya sebagai pemberontakan karena ia adalah konflik yang vertikal dan memiliki tujuan yang hendak dicapai.

Mereka patut diberikan ruang pembahasan tersendiri karena jika dibandingkan dengan kerusuhan penjara yang lain, tiap pemberontakan yang didorong oleh kegeraman tahanan atas kondisi penjara seringkali memberikan dampak yang jauh lebih besar dan merusak. Setidaknya, pemberontakan ini kerap disertai dengan pembakaran hampir separuh atau seluruh bangunan penjara, kaburnya ratusan tahanan, hingga jatuhnya korban baik di pihak tahanan atau sipir.

Salah satu pemberontakan tahanan terbesar dalam sejarah Indonesia mungkin adalah yang terjadi di Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan, yang terjadi ketika tahanan sedang menjalankan ibadah puasa pada 11 Juli 2013. Ketika tahanan sedang sahur pada pukul lima pagi, aliran listrik mati dan membuat persediaan air habis. Sebagai salah satu penjara dengan masalah over-kapasitas tertinggi di Sumatera Utara, ini dapat menjadi masalah serius. Pada 2013, jumlah seluruh tahanan di provinsi itu saja mencapai 17 ribu orang dari yang sebenarnya hanya berkapasitas 8.700 orang. Lapas Tanjung Gusta yang dibangun pada 1984 sendiri dirancang untuk dapat menampung 1.054 tahanan. Ketika pemberontakan terjadi, jumlahnya mencapai 2.600 tahanan. Ini berarti jumlah tahanan 247% dari kapasitas sebenarnya.

Pemadaman listrik tersebut berlangsung hingga sore hari ketika tahanan harusnya mulai berbuka. Laporan mendalam dari tabloid mahasiswa *Suara USU* menjelaskan bahwa bangunan penjara yang bertingkat membuat pasokan air sering terganggu, khususnya di lantai tiga. Sulitnya pasokan air itu bukanlah yang pertama kali. Hanya saja, gangguan listrik dan ketiadaan pasokan air pada 11 Juli itulah yang paling lama. Tanpa pasokan air, tahanan yang beragama Islam tidak dapat menjalankan shalat atau menyiapkan makanan untuk berbuka puasa, dan kesulitan untuk mandi, mencuci dan buang air. Ini berlangsung seharian!

Karena tak tertahankan lagi, tahanan kemudian mengamuk, menjebol kamar dan mulai membakar ruang kantor sipir. Pemberontakan berlangsung hingga tengah malam, karena tahanan masih melempari polisi dan tentara dengan botol. 15 sipir yang sedang bertugas juga disandera. Di tengah kebakaran besar, sekitar 240 tahanan berhasil melarikan diri. 22 orang diantaranya adalah tahanan teroris. Baru pada dini hari keesokannya kebakaran berhasil dipadamkan. Tiga tahanan tewas karena ledakan gas yang terjadi di dapur. Selain itu, dua sipir lagi diduga tewas terbakar saat hendak menyelamatkan berkas di ruang administrasi. *Tempo* melaporkan bahwa para tahanan sengaja menjebak kedua sipir itu sehingga tetap terbakar di ruang administrasi. Sebulan kemudian, 22 tahanan yang dituduh sebagai pelaku utama kerusuhan dipindahkan ke Nusakambangan.

Kerusuhan ini disusul dengan kerusuhan besar lain sebulan kemudian di Lapas Kelas II A Labuhan Ruku, Kabupaten Batubara, masih di provinsi yang sama. Jelas bahwa pemberontakan Tanjung Gusta telah menginspirasi pemberontakan di Labuhan Ruku. Selain itu diketahui bahwa pada akhir bulan Juli, 117 tahanan Tanjung Gusta yang terlibat dalam kerusuhan dipindahkan ke berbagai penjara di Sumatera Utara demi alasan keamanan. Tidak dijelaskan berapa dan ke penjara mana saja para tahanan dipindahkan, termasuk apakah ada yang dipindahkan ke Labuhan Ruku atau tidak. Ini tidak menihilkan kemungkinan bahwa tahanan yang terlibat dalam pemberontakan Tanjung Gusta kembali buat ulah dan menghasut kerusuhan di Labuhan Ruku. Bagaimanapun, kerusuhan yang terjadi pada 18 Agustus 2013 itu sangat membingungkan. Berbagai media memberikan penyebab dan kronologi kerusuhan yang beragam dan berbeda satu sama lain, tetapi mengerucut pada kekecewaan karena pemberian remisi yang tidak merata dan pungutan liar. Tidak ada satu pun keluhan yang bersumber dari pernyataan tahanan sendiri.

Sehari sebelumnya, 49 tahanan dari Lapas Lubuk Pakam, Deli Serdang juga dipindahkan ke Lapas Labuhan Ruku. Tidak juga jelas mengapa kedatangan tahanan baru ini disebut-sebut, tetapi memberikan kesan bahwa mereka adalah yang bertanggungjawab atas kerusuhan. Hanya di beberapa laporan dijelaskan bahwa Lapas Labuhan Ruku ditujukan untuk menampung 300 tahanan, tetapi saat kerusuhan terjadi, jumlahnya mencapai 867 orang. Ini meningkatkan ketegangan bagi tahanan lama yang sudah kepayahan hidup berjejal. Pada pukul empat sore, terjadi perkelahian antara sipir dengan tahanan. Sumber berbeda menyatakan bahwa sipir langsung dikeroyok oleh para tahanan, dan ada satu laporan yang mengatakan bahwa para tahanan baru lah yang melakukan penyerangan. Satu jam kemudian, kebakaran mulai terjadi, sehingga 82 tahanan berhasil melarikan diri dengan melompati pagar tembok pembatas dengan memanfaatkan kebakaran tersebut.

Pemberontakan yang terjadi di Lapas Kelas II B Piru di Maluku pada 2015 menunjukkan keributan tidak melulu terjadi di penjara berukuran besar yang dihuni ribuan tahanan. Lapas ini berukuran kecil, terletak di kota Piru yang juga mungil, yang menjadi ibukota Kabupaten Seram Bagian Barat di Pulau Seram. Saat pemberontakan terjadi, hanya terdapat 89 tahanan. Pada 17 Desember 2015, para tahanan kesal karena pengajuan cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat maupun asimilasi sejumlah tahanan tidak ditanggapi dan ditolak Lapas. Dari laporan lain diketahui bahwa terjadi perbedaan perlakuan sipir, dimana pemberian izin hanya dipermudah ke beberapa tahanan. Diduga dalam keadaan mabuk *sopi*, minuman alkohol tradisional Maluku, beberapa tahanan kemudian memprovokasi tahanan lain untuk menyerang sipir (beberapa media melaporkan bahwa ini bermula dari perkelahian antar tahanan). Mereka melempari sipir dengan batu, lalu dalam waktu cepat berhasil menguasai lapas dan membakar blok tahanan dan bagian depan kantor penjara. Sementara personel polisi dikerahkan, mereka dihujani batu dari dalam penjara. Polisi menembakkan gas air mata dan mengeluarkan tembakan peringatan untuk meredam pemberontakan.

Tahanan Lapas Kelas II B Sigli, Aceh Utara, juga pernah memberontak pada 3 Juni 2019. Saat itu sipir mengambil paksa seluruh dispenser di kamar tahanan yang sebelumnya telah diberikan oleh Kepala Lapas untuk persiapan lebaran. Para napi mengamuk, menyerang sipir dengan batu, besi dan benda keras lainnya, lalu membakar bangunan depan kantor

lapas. Untuk sementara, polisi dan pemadam kebakaran tetap berada di luar penjara di bawah hujan batu. Dari hasil negosiasi, dimana polisi dilarang masuk, tahanan meminta agar sipir yang telah mengambil dispenser dipindahtugaskan. Tahanan juga meminta agar saat lebaran nanti, keluarga tetap dapat bisa berkunjung dan mengirimkan makanan.

Kurang dari sebulan kemudian, tahanan Lapas Kelas II B Polewali Mandar, Sulawesi Barat juga rusuh karena memprotes kebijakan Kepala Lapas yang mewajibkan tahanan agar dapat membaca 10 surat Al-Qur'an supaya dapat bebas. Akibatnya, seorang tahanan yang harusnya bisa cuti bersyarat, merasa pembebasannya dipersulit. Pada pagi hari 22 Juni 2019, ia mengumpulkan para tahanan dan menerangkan kesulitannya tersebut. Seorang sipir yang merekam para tahanan yang sedang menggerutu, memancing amarah tahanan. Mereka mengamuk, melempari kantor sipir dengan batu dan merusak sejumlah fasilitas penjara. Tidak butuh waktu lama sampai Kepala Lapas datang dan mendengarkan keluhan tahanan.

Kedua pemberontakan berikut menunjukkan bagaimana tahanan nampaknya memilih kapan waktu yang tepat untuk menyerang: ketika sipir berada di titik paling lengah. Pada 15 Februari 2014, seorang tahanan Lapas Kelas II A Lhokseumawe yang sakit tidak mendapatkan perawatan medis yang semestinya. Keluarga tahanan yang bersangkutan bahkan sampai datang ke penjara untuk meminta izin agar tahanan tersebut diperbolehkan dirawat di rumah sakit. Karena izin tidak diberikan, ini memancing kekesalan tahanan lain. Pada tengah malam, tahanan yang tidur di musholla (satu laporan menyatakan tahanan berhasil menerobos pagar) melakukan pelemparan batu ke sejumlah kantor lapas. Kerusuhan terjadi hingga pagi hari dimana 70% bangunan penjara, termasuk kantor sipir, terbakar. Sipir yang panik memanggil bantuan, tetapi personil polisi yang datang disambut dengan lemparan batu. Untuk meredam kerusuhan, polisi memberikan tembakan peringatan dan gas air mata.

Pemberontakan lain dilakukan tengah hari, saat tahanan dan sipir Rutan Kelas II B Sialang Bungkuk di Pekanbaru sama-sama baru menyelesaikan shalat Jumat. Pada 5 Mei 2017 itu, sebagian besar tahanan blok B dan C langsung menyerang petugas dan mendobrak pintu setinggi tiga meter di bagian samping kanan rutan, lalu kabur. 448 tahanan melarikan diri dan seluruh pegawai, termasuk Kepala Rutan Sialang Bungkuk Teguh Trihatmanto, dicopot. Hingga awal bulan Juni, 133 tahanan masih buron. Dari tahanan lain, dilaporkan bahwa mereka memprotes

pungutan liar saat pengurusan cuti bersyarat atau pada keluarga yang menjenguk. Selain itu, tahanan mengeluhkan masalah over-kapasitas. Saat pembobolan penjara terjadi, rutan yang memiliki daya tampung 369 orang itu telah kepayahan dihuni lebih dari 1.800 tahanan.

Dalam beberapa bagian berikut, saya akan membahas lebih banyak pemberontakan tahanan yang terjadi dalam beragam konteks.

PEMBERONTAKAN TAHANAN PEREMPUAN

> *"Harapan akan kesempatan dan kebebasan adalah satu-satunya pendorong untuk tetap hidup, terutama kehidupan para tahanan."*
> **Emma Goldman**

Sebagian besar imaji kita tentang penjara dibangun dari bayangan yang sangat maskulin tentang tahanan laki-laki bertato, perang geng dan para jagoan. Karena itu, cakrawala penjara perempuan nyaris luput dari perhatian publik. Sebagaimana penjara laki-laki, kondisi penjara perempuan tidak berada dalam kondisi yang lebih baik. Meski sangat jarang terjadi, ketidakpuasan atas kondisi penjara juga jadi pendorong beberapa pemberontakan tahanan perempuan di Indonesia.

Ada beberapa penyebab mengapa pemberontakan tahanan perempuan jarang terjadi. *Pertama*, ini sesuai dengan rasio dari keseluruhan jumlah tahanan di Indonesia, dengan asumsi bahwa semakin sedikit jumlah tahanan, semakin kecil kemungkinan pemberontakan. Populasi tahanan perempuan (dewasa dan anak-anak) cenderung kecil, tetapi secara global jumlahnya cenderung mengalami peningkatan drastis. Bersamaan dengan El Salvador, Brasil, dan Kamboja, tahanan perempuan di Indonesia mengalami peningkatan dua kali lipat dalam kurun waktu empat tahun, dari sebelumnya 7 ribu tahanan pada 2014 menjadi sekitar 13 ribu pada 2018.

Kedua, karena rotasi tahanan perempuan di Indonesia begitu tinggi. Biasanya, pelanggaran hukum yang dilakukan oleh tahanan perempuan adalah tindak pidana ringan tanpa kekerasan yang terkait kemiskinan, seperti pencurian dan penipuan, dan beberapa tahun terakhir, paling banyak terkait narkoba. Kecuali teroris, sangat sedikit tahanan perempuan di Indonesia yang dikategorikan sebagai tahanan berisiko tinggi, dan di Nusakambangan tidak terdapat blok tahanan perempuan. Karena sebagian

TAHANAN DI LAPAS PEREMPUAN PALANGKARAYA MEMBAKAR KASUR DI HALAMAN, 2019

besar tahanan menjalani hukuman yang singkat, angka pergantian tahanan perempuan tinggi sekali. Apalagi jika mempertimbangkan kenyataan bahwa sejak 2018 hingga 2022, jumlah tahanan perempuan kurang lebih selalu di angka 13 ribu orang. Tahanan perempuan keluar dan masuk penjara di jumlah yang relatif stabil dan menjalani hukuman dalam waktu singkat, membuat tahanan perempuan, mungkin, lebih enggan untuk melakukan upaya perlawanan yang beresiko. Masa hukuman yang singkat juga membuat solidaritas tahanan lebih lemah.

Terdapat 34 Lapas dan 4 Rutan yang dikhususkan untuk tahanan perempuan, yang pada umumnya berada di ibukota provinsi. Di kabupaten dan daerah, tahanan perempuan dicampur di penjara umum dengan keberadaan blok atau kamar khusus perempuan. Di lapas dan rutan umum, tahanan perempuan juga kerap terlibat dalam pemberontakan bersama tahanan laki-laki, sebagaimana nampaknya ini terjadi dalam pemberontakan di Rutan Kelas II B Kabanjahe di Karo, Sumatera Utara, ketika blok tahanan perempuan dibakar. Atau dalam pemberontakan Rutan Kelas II B Sri Indrapura Riau yang dipancing saat seorang tahanan perempuan terkena razia narkoba. Lapas Perempuan Kelas III Sigi di Palu, tampaknya juga dengan sengaja dibakar oleh tahanannya pada 29 September 2019. Tahanan perempuan menjebol pintu samping rutan

dan 46 di antaranya melarikan diri, meskipun belasan di antaranya berhasil ditangkap beberapa jam kemudian.

Tapi ada dua pemberontakan yang patut dibahas di sini. Keduanya di Kalimantan. Berbagai ketidakpuasan tahanan yang keluhannya tidak didengarkan berujung pada pemberontakan yang berlangsung selama sepuluh jam di Lapas Perempuan Kelas II A Palangkaraya, Kalimantan Tengah. 44 tahanan yang menghuni lapas tersebut mengeluhkan distribusi makanan yang sering terlambat dan mengusulkan pembangunan masjid dan gereja. Meski begitu, Kepala Lapas kepada media massa menyangkalnya, mengatakan bahwa tuntutan para tahanan adalah kelonggaran peraturan terkait penggunaan telepon seluler. Karena keluhan mereka tidak digubris, pada Jumat malam, 1 Februari 2019, tahanan mulai melemparkan barang-barang milik mereka kepada sipir. Mereka juga mengeluarkan kasur-kasur dan membakarnya di halaman depan kamar. Karena merasa situasi tidak terkendali, ratusan personel TNI dan Polres Palangkaraya dikerahkan untuk menertibkan tahanan dan melakukan mediasi pada pagi harinya. Dalam mediasi itu tahanan juga menuntut agar Kepala Lapas diganti demi peningkatan pelayanan. Tidak diketahui apakah tuntutan mereka dipenuhi.

Pemberontakan serupa terjadi pada Selasa malam, 28 September 2021 di Lapas Perempuan Kelas II A Pontianak, Kalimantan Barat, kali ini terkait razia telepon seluler yang dilakukan sejak sore hari. Para tahanan menyatakan bahwa telepon seluler itu adalah satu-satunya hiburan yang mereka miliki, dan menuntut agar telepon seluler yang ditahan saat razia dikembalikan. Karena tuntutan tidak dipenuhi, selama satu setengah jam para tahanan merusak berbagai perabotan, televisi, CCTV, wartel, televisi dan membakar pakaian. Saat itu juga, beredar berita bahwa tiga sipir disandera tahanan, tetapi itu dibantah sipir lapas yang mengakui bahwa tahanan sebenarnya hanya memblokade lorong masuk sehingga membuat petugas jaga tertahan di dalam. Polisi langsung diterjunkan untuk menenangkan situasi dan melakukan mediasi, dimana telepon seluler dikembalikan pada para pemiliknya.

> *"'Perang Melawan Narkoba' menjadi alasan untuk memenjarakan jutaan orang saat mereka kehilangan pekerjaan dan, yang dalam beberapa kasus, beralih ke bentuk perdagangan ilegal untuk memenuhi kebutuhan."*
>
> **CrimethInc.**

Pada pagi dini hari 23 April 2016, Undang Kosim ditemukan tewas gantung diri di dalam sel isolasi Lapas Kelas II A Banceuy Bandung. Undang adalah salah satu tahanan narkotik yang beberapa bulan lagi bebas. Karena itu, ia dipercaya untuk menjadi tamping. Tetapi ia, beserta satu tahanan lagi, diberikan sanksi di dalam sel isolasi karena dituduh menyebarkan narkoba di dalam penjara. Para tahanan, yang sempat diwawancarai media, menyatakan bahwa mereka tidak percaya jika Undang akan berbuat sebodoh itu. Mereka tahu bahwa tuduhan itu juga tidak disertai barang bukti, kecuali plastik hitam tanpa narkoba yang ia bawa. Akibat tuduhan itu, beberapa tahanan lain dites dan seorang diantaranya ternyata positif menggunakan narkoba. Ia inilah yang kemudian bersama Undang dimasukkan ke dalam sel isolasi.

Tidak ada satu pun laporan yang coba mengusut tuntas penyebab pemberontakan itu. Padahal, seorang tahanan lain yang sama-sama dihukum di sel bersama Undang, dapat menjadi saksi kunci mengenai adanya dugaan penganiayaan oleh sipir. Kabar kematian Undang Kosim menyebar sehingga pada pukul enam pagi, para tahanan langsung mengamuk, melempari para sipir dengan batu dan kayu disertai perusakan beberapa fasilitas lapas. Saat itu, hanya 10 sipir yang sedang bertugas. Kalah jumlah, para sipir mundur, dan gedung bagian depan Lapas Banceuy terbakar habis, berikut dua mobil ambulans di parkiran. Para tahanan bahkan masih memberikan perlawanan terhadap personil kepolisian yang dikerahkan untuk meredam pemberontakan. Korban luka ada di kedua belah pihak. Hanya bertahan dua jam, empat orang tahanan kemudian diamankan kepolisian dan keesokan harinya para tahanan dipindahkan ke gedung penjara baru, yang masih berada di Banceuy.

Kenyataan bahwa narkoba masih beredar dan dikendalikan dari dalam penjara menunjukkan kegagalan pendekatan pemidanaan untuk memberantasnya. Ini menjadi bukti bahwa hukuman penjara tidak akan menghentikan konsumsi narkotika seseorang. Setelah dihukum penjara, seorang tahanan kerap tidak dapat mencari penghasilan, padahal ia

tetap punya kewajiban untuk menafkahi anggota keluarganya. Ini belum memperhitungkan bahwa sang tahanan itu sendiri harus menghadapi biaya hidup yang mahal di penjara. Berada di sekitar bandar dan pengedar narkotika, sangat besar kemungkinan bagi seorang tahanan untuk kembali mengedarkan narkotika dari dalam penjara melalui telepon seluler. Itu sebabnya, penjara justru adalah tempat terbaik dan teraman untuk mengendalikan peredaran narkoba. Sebuah studi dari Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) menunjukkan bahwa pada 2018 saja, telah terjadi 154 kasus peredaran, penyelundupan, dan penggunaan narkotika di dalam penjara.

Saya tidak memiliki data jumlah tahanan residivis narkotika saat ini. Tetapi saya juga yakin bahwa tahanan kasus peredaran narkotika yang telah dibebaskan, kerap kembali terjun ke profesi yang sama. Setidaknya berdasarkan pengalaman saya sendiri, saya banyak mengenal tahanan residivis semacam ini. Selain itu, banyak pengguna yang menjadi pengedar setelah dipenjara.

Saat ini, hampir separuh dari jumlah tahanan, atau sekitar 137 ribu dari 269 ribu tahanan (termasuk narapidana) di Indonesia, adalah tahanan narkotik. Ini meningkat drastis dari jumlah tahanan narkotik yang sebelumnya masih 81 ribu orang pada 2016. Karena kegagalan kebijakan punitif untuk kasus narkotika, maka tingginya jumlah tahanan narkotika menyebabkan tingginya jumlah pemberontakan akibat perlawanan terhadap razia narkoba dan penangkapan tahanan. Kita akan menemukan bahwa setidaknya sejak 2011 telah terjadi delapan kerusuhan dengan alasan ini. Dengan rata-rata satu kali kerusuhan tiap tahunnya sejak 2016.

Ada beberapa alasan mengapa razia penjara dan penangkapan tahanan akibat narkoba bisa menimbulkan masalah serius. *Pertama*, alasan yang lebih pragmatis. Seringkali, para tahanan yang terjaring razia karena memiliki narkoba atau mengedarkan narkoba dari dalam penjara, adalah para bos yang karena kekayaan finansialnya, menunjang banyak kebutuhan dasar para tahanan lain. Terkadang, ini berarti mengancam sumber distribusi narkoba di dalam, yang membuat tahanan terputus aksesnya untuk mendapatkan narkoba. *Kedua*, hukuman pidana narkotika jauh lebih besar dan tinggi ketimbang tindak pidana umum, seperti pencurian, judi atau kasus penggelapan dana. Bahkan seringkali kasus pengedar narkoba bisa lebih berat ketimbang kasus pembunuhan.

Seorang tahanan narkotika yang harus menjalani masa hukuman yang lebih panjang, tidak akan membiarkan dirinya (atau kawannya) dihukum lagi untuk kedua kalinya. Dalam hal ini para tahanan secara alamiah telah mengembangkan solidaritas dan sentimen anti-polisi, BNN, kejaksaan dan pengadilan, karena sama-sama merasa menjadi korban hukum pidana narkotika di Indonesia.

Salah satu kerusuhan akibat hal ini pertama kali muncul pada 25 Juni 2011, saat BNN meringkus tahanan Lapas Kerobokan Denpasar bernama Riyadi yang diduga pengedar narkoba di dalam penjara. Tahanan menyerang sipir dan anggota BNN yang bersenjata lalu merusak berbagai fasilitas kantin, tempat ibadah dan ruang Kepala Lapas. Pada 25 Maret 2016, Lapas Kelas II A Malabero Bengkulu juga rusuh setelah tahanan dari Blok A ditangkap oleh BNN. Mulanya, para tahanan memukul jeruji. Tetapi kemudian sekelompok tahanan berhasil keluar dari kamarnya, diduga dengan merusak gembok. Mereka melempari sipir dengan batu dan kayu, yang membuat sipir dan petugas BNN melarikan diri sambil membawa barang bukti dan tahanan yang mereka tangkap. Di saat itulah tahanan lain berhasil membebaskan diri, sambil terus melakukan pelemparan batu dan memecahkan kaca-kaca. Tembakan peringatan dari personil polisi yang datang justru membuat tahanan semakin mengamuk. Asap mulai mengepul dari Blok A pada pukul setengah sepuluh malam. Baru dua jam kerusuhan berhasil diredam, dengan lima tahanan di Blok A yang sejak awal tidak membobol kamarnya dan tidak terlihat kerusuhan, mati karena terbakar hidup-hidup. Seluruh tahanan Malabero kemudian dipindahkan ke Lapas Kelas II A Bentiring Bengkulu malam itu juga.

Dalam banyak kasus, penangkapan dan razia seringkali disertai dengan penganiayaan terhadap tahanan. Undang Kosim bukan satu-satunya tahanan yang dianiaya sipir karena dituduh mengedarkan narkoba. Penangkapan Ferry, tahanan Lapas Narkotika Kelas II A Hinai Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, berujung pada kerusuhan besar pada 16 Mei 2019. Kerusuhan dimulai ketika pada siang hari sipir menemukan narkoba saat sedang melakukan razia. Ferry, pemilik narkoba tersebut, kemudian mencoba melarikan diri. Ketika berhasil ditangkap, ia dianiaya oleh sipir. Mereka memukuli dan menendangnya. *Tempo* bahkan melaporkan bahwa Ferry dianiaya hingga kotorannya keluar. Tahanan lain yang tersulut kemarahannya segera mendobrak kamar dan menyerang sipir. Kerusuhan berhasil membesar sehingga ratusan tahanan memecahkan

kaca-kaca, membakar satu ambulans, 11 sepeda motor dan sejumlah ruangan kantor sipir. Mereka juga berhasil menjebol lapas, sehingga 154 tahanan melarikan diri (hingga akhir bulan Mei, 103 diantaranya berhasil ditangkap atau menyerahkan diri).

Kerusuhan berhasil diredam ketika 500 personel TNI-Polri dikerahkan, dan negosiasi berlangsung. Dari yang semula perlawanan terhadap penangkapan dan penganiayaan tahanan, berbagai keluhan dan tuntutan bermunculan. Para tahanan mengaku bahwa Kepala Lapas kerap memperjualbelikan makanan dan pulsa, mengenakan biaya untuk perpindahan ruangan, serta tak memperjelas remisi dan pengurusan pembebasan bersyarat. Istri kepala Lapas pun disebut kerap merecoki urusan lapas dengan memiliki usaha di dalam lapas dan menginstruksikan pemeriksaan tahanan. Tahanan menuntut agar Kepala Lapas dicopot, dan agar sipir yang melakukan penganiayaan dihukum. Dua hari kemudian, Kepala Lapas Hinai Langkat dinonaktifkan.

Kerusuhan serupa terjadi lagi di Rutan Kelas II B Sri Indrapura, Kabupaten Siak, Riau pada Sabtu, 11 Mei 2019. Saat itu, sipir menemukan sabu di salah satu lipatan baju milik YL di blok perempuan yang dihuni 26 tahanan. YL diduga menjadi salah satu pemasok narkoba di penjara yang dihuni 648 orang dari kapasitas yang sebenarnya adalah 165 orang. Polres Siak kemudian dipanggil untuk menyidik kejadian tersebut, dan menangkap tiga tahanan lain, IM, ZP dan DI. Tiga tahanan yang diduga sebagai pengguna itu, dikeluarkan dari kamarnya pada tengah malam dan dianiaya oleh sipir. Kronologi kejadian selanjutnya kemudian menjadi kabur. Tetapi pada pukul satu dini hari, sekitar setengah jam kemudian, para tahanan melempari sipir dengan batu, lalu berhasil menjebol pintu blok. Beberapa laporan menyebut tentang suara tembakan (atau penggunaan mercon untuk menyerang sipir). Jadi dapat diketahui bahwa pemberontakan itu cukup sengit sehingga mengakibatkan Kasat Narkoba Polres Siak Jailani diketahui tertembak oleh peluru karet dan sepucuk shotgun milik sipir dilaporkan telah hilang.

Hampir separuh dari bangunan rutan terbakar dan 153 tahanan, termasuk YL, melarikan diri. Banyak dari tahanan yang kabur kemudian tertangkap kembali atau menyerahkan diri. Hingga pertengahan Mei, masih terdapat enam orang yang masih buron. Pemberontakan ini dianggap serius sehingga Menkumham Yasonna Laoly turun langsung memeriksa penjara pasca-kerusuhan itu. Kepala Rutan dicopot dan

tiga sipir yang diduga melakukan penganiayaan diperiksa. YL sendiri diberitakan akan dipindahkan ke Lapas Nusakambangan.

Setahun kemudian, kerusuhan akibat razia narkoba juga terjadi di Rutan Kelas II B Kabanjahe, Kabupaten Tanah Karo, Sumatera Utara pada 12 Februari 2020. Saat itu, empat tahanan yang kembali ditangkap oleh polisi karena kasus narkoba melakukan provokasi kepada tahanan lain. Para tahanan berteriak-teriak, lalu menyerang sipir dan membakar rutan. Akibatnya, seluruh bangunan penjara tidak dapat terpakai lagi. 191 tahanan dipindahkan ke lima penjara berbeda, sementara 20 tahanan lain ditetapkan sebagai tersangka kerusuhan. Kepala Rutan Simson Bangun juga dicopot dari jabatannya.

Kerusuhan terakhir terjadi di Lapas Kelas III Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, saat tahanan melempar tidak hanya batu, tetapi juga botol kaca ke arah sipir, setelah terjadinya penganiayaan terhadap lima tahanan yang terjaring razia. Kerusuhan yang terjadi pada 7 Oktober 2021 itu juga disertai upaya penerobosan pintu Lapas, mengindikasikan bahwa ada beberapa tahanan yang mencoba melarikan diri. Akhirnya, sebagian besar ruangan kantor dikuasai ratusan tahanan, yang membakar kasur dan kursi kayu di luar blok mereka. 180 personil TNI-Polri dikerahkan sambil melepas tembakan peringatan untuk meredam kerusuhan yang berlangsung hingga malam hari. Para tahanan menuntut agar lima sipir yang diduga melakukan penganiayaan dihukum.

KLASTER PENJARA

Pada akhir 2019, sayup-sayup mulai terdengar kabar tentang kemunculan suatu virus baru asal Cina yang mematikan. Media ramai menyiarkan video amatir tentang orang-orang yang sesak nafas terkapar di jalanan. Di Indonesia, kabar tersebut dianggap sebagai lelucon oleh banyak politikus, termasuk Presiden Joko Widodo. Baru pada 2 Maret 2022, Presiden Jokowi mengumumkan dua kasus pertama Covid-19 di Indonesia, diikuti oleh serangkaian kebijakan yang lebih "serius" untuk menanggulanginya.

Bagaimanapun, pandemi Covid-19 di awal 2020 kadung menciptakan kepanikan di antara tahanan karena terciptanya beberapa klaster penjara. Di tengah kondisi over-kapasitas, penyebaran Covid-19 memicu kekhawatiran tahanan yang mustahil untuk dapat menjaga jarak. Di

Jakarta saja, hingga 30 September 2020, sekurangnya ada 96 kasus positif ditemukan di tujuh penjara berbeda. Sementara di luar Jakarta, terdapat 120 penghuni dan 18 petugas yang terinfeksi di tujuh penjara pula.

Untuk mengatasi persebaran lebih jauh dan terciptanya lebih banyak klaster penjara, Kemenkumham membebaskan hampir 35 ribu tahanan di penjara yang over-kapasitas melalui Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 yang mengatur syarat asimilasi dan integrasi tahanan. Hanya saja, Permenkumham 10/2020 hanya berlaku bagi tahanan tindak pidana umum. Ini kondisi ideal lain untuk terciptanya kerusuhan penjara karena muncul kecemburuan bagi tahanan narkotik yang tidak dibebaskan.

Di saat bersamaan, ketakutan akan Covid-19 menular lebih cepat daripada persebaran virus itu sendiri. Paranoia itu kadung menghinggapi tahanan Lapas Kelas II A Tuminting Manado yang rusuh pada 11 April 2020. Tahanan khawatir diri mereka terinfeksi, apalagi setelah seorang sipir dikabarkan positif Covid-19. Lutfi, seorang tahanan Lapas Tuminting yang saya wawancarai, menyatakan bahwa pihak Lapas Tuminting cenderung menutup-nutupi kasus tersebut.

Berbagai berita di media juga mengabarkan bahwa tahanan narkotik merasa dianaktirikan karena banyak yang tidak dibebaskan dalam rangka asimilasi sesuai Permenkumham 10/2020. Saat itu, 115 tahanan pidana umum telah dibebaskan. Beberapa perwakilan tahanan narkotika kemudian memprotes dan menuntut pembebasan serupa. Tetapi Lutfi menyangkalnya, sebab para tahanan sebenarnya justru sedang memperjuangkan agar tahanan pidana umum dapat dibebaskan lebih cepat. Menurut Lutfi, kemarahan utama justru muncul ketika seorang tahanan dilarang melayat orang tuanya yang meninggal dunia, karena dikhawatirkan akan terinfeksi Covid-19.

Rupanya, sebelum pemberontakan terjadi, tahanan telah melakukan demonstrasi. Dalam negosiasi tersebut, keluhan-keluhan di atas disampaikan, termasuk tentang kualitas makanan. Ketika tuntutan tahanan tidak ditanggapi, segelintir tahanan merencanakan pemberontakan. Pada siang hari 11 April 2020, tahanan mengamuk. Mereka memecahkan kaca-kaca, melempari sipir dengan batu, botol kaca hingga molotov, lalu membakar blok tahanan narkoba, tipikor dan kantin. Mereka berhasil mengambil alih lapas seharian, sebelum kemudian personil TNI-Polri menyerbu pada malam hari termasuk dengan menggunakan gas air mata.

KERUSUHAN DI LAPAS TUMINTING MANADO PADA 2020.

Seminggu kemudian, 19 tahanan Lapas Tuminting dipindahkan ke Nusakambangan. Dilaporkan pula dari berbagai media bahwa seorang tahanan terkena luka tembak peluru karet dan satu tahanan lain meninggal dalam perawatan di rumah sakit. Satu laporan dari *Kompas* menyatakan bahwa ia syok, sedang tensi tinggi dan mengalami gejala sesak nafas. Kakanwil Kemenkumham Sulawesi Utara Edi Hardoyo menyatakan bahwa kematian tahanan itu tidak ada kaitannya dengan kerusuhan penjara. Semua ini, sekali lagi, dibantah oleh Lutfi:

"Saya yang berada di garis depan kerusuhan, dan jadi yang paling terakhir mundur pula. Polisi tidak hanya menembakkan peluru karet, tetapi juga peluru tajam. Saya melihatnya sendiri di depan mata saya ketika kami disuruh tiarap. Ukurannya [peluru] sepanjang kelingking saya. Saat itulah saya istighfar. Hari itu, polisi mengatakan kepada kami bahwa hak asasi kami dicabut. Kami disuruh telanjang bulat dan dipukuli. Babak belur semua."

Lutfi juga membantah bahwa tahanan WNA tersebut meninggal dunia karena sakit. Tahanan tersebut, menurutnya, adalah warga negara Filipina yang tidak fasih dengan Bahasa Indonesia. Ia tidak paham ketika diperintah untuk tiarap, sehingga membuat petugas memukulnya. Tahanan tersebut meninggal karena dianiaya.

Kurang dari sebulan, kerusuhan dengan alasan serupa terjadi di Lapas Sorong Papua pada 22 April 2020. Tampaknya, pemberontakan yang terjadi di Lapas Sorong setahun sebelumnya, telah memancing keberanian tahanan untuk mengulanginya (lihat Bagian 5). Saat itu, tahanan Lapas Sorong menuntut pembebasan bersyarat karena kecemburuan terhadap rencana pembebasan 50 tahanan dalam rangka asimilasi semasa pandemi Covid-19. Mereka merusak dan membakar sejumlah fasilitas penjara, tetapi berhasil dibujuk secara persuasif untuk kembali ke sel masing-masing pada malam harinya setelah 300 personel polisi dikerahkan.

Meski hanya terjadi dua pemberontakan di Indonesia, ia mengikuti gelombang pemberontakan tahanan yang terjadi bersamaan secara global pada 2020. Para tahanan di berbagai penjara di dunia menuntut pembebasan lebih awal dan penanganan kesehatan penjara yang lebih baik. Setidaknya 27 penjara rusuh di seluruh penjuru Amerika Latin (Venezuela, Ekuador, Meksiko, Peru, Belize, Paraguay, Panama, Kolombia, Nikaragua, Uruguay, Argentina, Guatemala, Brazil, Kosta Rika, Chile, Bolivia, Honduras, dan Republik Dominika). Kerusuhan juga terjadi di Eropa (Italia dan Skotlandia), Afrika (Sierra Leone) dan Asia (Iran, Sri Lanka, Filipina, Vietnam, Thailand dan Indonesia) hingga Amerika Serikat dan Australia. Tahanan yang tewas dalam berbagai pemberontakan ini begitu banyak: Sri Lanka (8), Meksiko (8), Peru (9) dan paling banyak di Kolombia (23). Di Italia, 50 tahanan melarikan diri.

DITAKDIRKAN UNTUK DIHANCURKAN

> *"Kita yang tidak memiliki kekayaan, kenyamanan, kontrol, kepuasan, dan sebagainya, harus menghibur ketidaknyamanan kita dengan kesadaran bahwa frustrasi ada di mana-mana, dan itu tumbuh semakin ganas."*
>
> **Fire to The Prisons #7**

Kecuali dalam kasus ekstrim, keinginan terbesar bagi hampir seluruh tahanan adalah untuk keluar dari penjara. Setidaknya, selama mereka menjalani hukuman, mereka ingin menjalani standar kehidupan yang lebih baik. Negara mungkin tidak dapat *secara resmi* memenuhi banyak tuntutan tahanan untuk beberapa jenis kebebasan, seperti penggunaan telepon seluler atau lebih banyak kegiatan dan fasilitas, sebab penjara sepenuhnya dirancang untuk membatasi kemerdekaan dan memantau

aktivitas tahanan. Penjara harus mampu untuk menciptakan isolasi, memisahkannya dari masyarakat di luar. Penjara dengan kebebasan yang terlampau besar tidak dapat lagi disebut sebagai "penjara" (dalam pengertian paling harfiahnya). Oleh karena itu, penjara harus menetapkan ukuran sejauh mana mereka dapat memberikan secuil kebebasan bagi tahanan. Ini berarti antara keinginan tahanan dan mekanisme kerja penjara, terdapat jurang yang sulit untuk dijembatani.

Meski begitu, jurang ini bukannya tidak dapat diseberangi. *Secara tidak resmi*, pelanggaran aturan dan para sipir indisipliner dapat menjadi jalan, atau celah, yang tersedia untuk peningkatan fasilitas atau kebebasan yang lebih besar bagi tahanan. Tetapi ia tersambung oleh sehelai benang tipis, yang terlalu rapuh dan dapat hancur sewaktu-waktu, sebab ini bergantung pada penyuapan, pembagian kelas bagi tahanan, dan pada akhirnya membudayanya praktik pemerasan dan pungutan liar. Tidak semua tahanan dapat menikmati fasilitas istimewa yang tersedia. Sehelai benang itu tidak dapat menahan beban bagi seluruh tahanan. Ini adalah bom waktu yang dapat meledak sewaktu-waktu.

Di sini kita sampai pada jalan buntu. Penjara dengan kebijakan ketat dan kondisi yang buruk tentu akan membuat tahanan melakukan perlawanan. Sementara itu, penjara dengan kebijakan yang lebih longgar dan "lebih bebas" tetap menghasilkan rasa frustasi yang terpendam bagi tahanan, sehingga walau tidak banyak alasan politis yang dapat dijadikan alasan bagi tahanan untuk memberontak, semua hal lain, yang lebih personal, dapat menyediakan jalan bagi kerusuhan yang juga sama destruktifnya. Satu-satunya cara untuk menjembatani keinginan tahanan dan cara kerja penjara (*yang tidak resmi*), juga mengandung potensi ketegangan tersendiri.

Apakah ia sungguh dapat hancur, itu sudah beda soal. Yang jelas, entah apakah itu penjara yang kumuh atau yang dipenuhi bunga, sipir yang ramah atau sipir yang ganas, selama dunia tidak kehabisan para pemberani, kutukan kehancuran membayangi penjara sepanjang waktu melalui berbagai kerusuhan dan pemberontakan.

BAGIAN 4

Kebencian Terhadap Penjara Telah Ditabur Benihnya

Jika kami bunga
Engkau adalah tembok itu
Tapi di tubuh tembok itu
Telah kami sebar biji-biji
Suatu saat kami akan tumbuh bersama
Dengan keyakinan: engkau harus hancur!
Bunga dan Tembok - **Wiji Thukul**

Di beberapa penjara, telah terjadi dua hingga tiga kali pemberontakan besar, membuat bangunan penjara berulang kali terbakar dalam jangka waktu kurang dari satu dekade. Dalam kasus langka, kadang terdapat rangkaian kerusuhan yang hanya berselang beberapa bulan. Ada beberapa penjara yang dapat menjadi subyek pembahasan kita di sini. Salah satunya adalah Lapas Kerobokan Denpasar yang telah saya ulas pada bagian sebelumnya dan juga Lapas Sorong (lihat Bagian 5). Jadi, saya akan beralih pada penjara lain dengan fenomena kerusuhan berulang yang tidak kalah ekstrim: Lapas Kelas II Lambaro di Aceh Besar.

Laporan paling awal menunjukkan bahwa kerusuhan di Lapas Lambaro pernah terjadi pada 31 April 2012 antara tahanan dengan anggota kepolisian. Sekitar sebulan sebelumnya, beberapa polisi yang menjadi tahanan di penjara itu dipanggil oleh petugas administrasi untuk mengurus perpanjangan masa hukuman. Tetapi ia tidak merespon dan malah mengadu pada saudaranya yang juga polisi, bahwa dirinya kerap mendapatkan perlakukan yang tidak menyenangkan dari sipir. Saudaranya bersama beberapa polisi akhirnya mendatangi penjara di luar jam besuk dan memasukan senjata ke dalam. Para tahanan yang mengetahui hal itu kemudian mengamuk dan melempar barang-barang yang ada di sekitar mereka kepada polisi, termasuk pagar bagian dalam penjara. Mereka juga membakar barang-barang milik polisi yang berstatus tahanan itu.

Tahanan Lapas Lambaro juga memberontak pada 6 November 2015, kali ini berhubungan dengan kurangnya pasokan air bersih selama sepekan. Menjelang maghrib, saat dimana tahanan membutuhkan air untuk shalat, para tahanan mengamuk dan merusak tiga pintu penjagaan. Tiga mobil tangki air dikirim untuk meredam tahanan yang mengamuk. Tetapi setelah mobil tangki pergi, dan air yang diberikan masih belum cukup, tahanan kembali melempari sipir dengan batu, membuat mereka berlarian keluar penjara. Tembakan peringatan dari sipir tidak digubris, sehingga personil kepolisian diterjunkan. Kepala Lapas Lambaro saat itu, Ahmad Faedhoni, langsung dicopot, karena lalai memperbaiki mesin pompa air.

Salah satu penjelasan tentang maraknya kerusuhan di Lapas Lambaro tampak dari sentimen anti-polisi yang kuat, karena banyak dari tahanan di dalam penjara Aceh adalah mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Ini yang mungkin dapat menjelaskan semacam semangat kedaerahannya, seperti terbukti dengan kemunculan solidaritas tahanan dalam pemberontakan yang terjadi pada 4 Januari 2018. Saat itu, tiga tahanan narkoba Lambaro akan dipindahkan ke penjara di Medan. Ketiganya dipindahkan karena mendapatkan hukuman antara 10 hingga 15 tahun penjara. Kemenkumham telah berkoordinasi dengan Polres Kota Banda Aceh yang mengerahkan beberapa personil untuk mengawal pemindahan itu. Tapi para tahanan menolak rencana tersebut. Pada tengah hari, para tahanan bergerak dan telah menghancurkan kaca-kaca di ruang administrasi di bagian depan lalu membakar tiga diantaranya. Para tahanan nekat menerobos pintu penjagaan dan membakar lagi satu unit mobil milik polisi yang masuk ke pekarangan penjara untuk mengendalikan massa. Untuk meredamnya, personil TNI-Polri menembakkan gas air mata ke dalam penjara. Sebanyak 11 tahanan dijadikan tersangka utama dalam kasus pemberontakan tersebut. Setelah kerusuhan diredam dan situasi kembali kondusif, penjara dirazia.

Bagaimanapun, tampaknya kerusuhan yang sudah-sudah masih segar di ingatan tahanan, karena di akhir tahun, pemberontakan besar lain terjadi di Lambaro. Para pelakunya mungkin masih merupakan tahanan yang sama yang terlibat dalam kerusuhan tersebut. Kita tidak dapat mengetahui apakah buruknya kondisi penjara memaksa para tahanan untuk melakukan kerusuhan, sebab tidak ada satu pun laporan yang menerangkannya. Tetapi pada 29 November 2018, tahanan kembali melakukan pemberontakan. Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham memperkirakan bahwa penerapan peraturan yang lebih ketat lah yang jadi penyebab utamanya. Meski begitu, saya yakin bahwa satu-satunya serangan dan perusakan bertujuan agar para tahanan dapat melarikan

ANGGOTA TNI DI DEPAN LAPAS NARKOBA HINAI, LANGKAT, SETELAH KERUSUHAN DAN PELARIAN MASSAL 170 TAHANAN PADA 2019

diri, karena walau dimulai dari penolakan pemindahan tahanan, pemberontakan bulan Januari tidak berujung pada tuntutan apapun.

Provokasi dimulai oleh beberapa tahanan seusai shalat maghrib. Mereka mulai menyerang sipir, lalu membobol kawat yang terpasang di depan klinik penjara. Setelah itu, mereka beramai-ramai menerobos pintu penjagaan utama, dan kabur dengan merusak terali besi jendela ruang aula yang langsung mengarah keluar penjara dengan menggunakan barbel. Sepuluh sipir yang berjaga tidak mampu menghalau 113 tahanan yang berhasil melarikan diri. 26 tahanan diantaranya tertangkap kembali saat bersembunyi di rumah, kebun, dan di atas atap rumah warga di sekitar Lapas Lambaro. Satu sipir terluka karena dikeroyok tahanan di parkiran penjara.

Ini akan menjadi kerusuhan terakhir di Lapas Lambaro. Kepala Lapas yang baru, Abdul Karim, ditunjuk pada awal tahun 2019. Ia menerapkan kebijakan yang lebih ketat terkait peredaran narkoba di dalam penjara. Meski begitu ia menggunakan pendekatan yang lebih persuasif, dan dipanggil "ayah" oleh para tahanan. Para tahanan berhasil dipasifikasi dengan berbagai program pemberdayaan dan keterampilan yang baru, seperti pabrik roti, binatu dan menjahit.

Kerusuhan berulang yang intens juga terjadi di Lapas Kelas II A Palopo, Sulsel, pada 14 Desember 2013. Saat itu, Kepala Lapas sedang melakukan pemeriksaan bersama Kepala Keamanan terhadap seorang tahanan kasus pencurian di sel khusus. Berdasarkan suatu laporan, ia sudah dua bulan dimasukan ke dalam sel khusus karena sering mengganggu tahanan perempuan. Ketika dikeluarkan, ia langsung menyerang Kepala Lapas. Ia memprovokasi tahanan lain yang juga berada di luar sel karena sedang dilakukan pengecekan, dan secara beramai-ramai mereka memukuli Kepala Lapas hingga pingsan. Nantinya juga diketahui bahwa Kepala Lapas mengalami luka tusuk. Setelah memukul mundur sipir, tahanan membakar hampir seluruh ruang kantor di bagian lapas, antara lain gudang senjata, aula, gudang beras, ruang Kepala Lapas, ruang besuk dan 15 kamar tahanan. Tahanan mengunci pintu masuk dari dalam, membuat personil TNI-Polri yang diterjunkan tidak dapat masuk. Mereka menyandera Kepala Lapas dan Kepala Keamanan, serta tujuh pengunjung.

Dari mediasi dengan pemerintah daerah, tahanan mengeluh karena sebagian besar toilet yang ada tersumbat. Satu media melaporkan adanya "dugaan kuat" (berdasarkan berita) pungutan liar dan diskriminasi tahanan oleh sipir. Setelah berlangsung selama tiga jam, kerusuhan berhasil diredam secara persuasif. Empat tahanan ditetapkan sebagai provokator kerusuhan dan diancam hukuman di atas lima tahun penjara.

Rupanya ada beberapa laporan yang menyebut bahwa kerusuhan yang lebih kecil telah terjadi pada April dan September di tahun yang sama tanpa menjelaskan kronologinya lebih lanjut. Anehnya, tidak ada satu pun berita yang melaporkan bahwa pada bulan-bulan itu telah terjadi kerusuhan di Lapas Palopo, kecuali beberapa razia rutin. Bisa jadi, tahanan telah membuat sedikit onar saat penolakan razia sebagaimana kerap terjadi di penjara lain di Indonesia, dan kerusuhan di bulan Desember hanyalah puncak dari kegeraman tahanan yang tak bisa ditahan lagi.

Rutan Kelas II A Sialang Bungkuk di Pekanbaru juga disebut sebagai "langganan rusuh" di banyak media saking seringnya kerusuhan berulang di tempat itu. Yang paling besar, terjadi pada 5 Mei 2017, saat tahanan berhasil menguasai penjara dan 448 tahanan melarikan diri. Hanya berselang dua bulan, terjadi penolakan rencana pemindahan 17 tahanan pada 14 Juli 2017. Tidak terjadi apapun kecuali teriakan-teriakan dari kamar tahanan. Tetapi 600 personil polisi kadung diterjunkan untuk mencegah kerusuhan besar seperti sebelumnya. Akibat dari keributan itu, jumlah tahanan yang dipindahkan menjadi 58 tahanan, termasuk tahanan

yang diduga menjadi provokator. Sekali lagi pada 10 Desember 2018, terjadi keributan kecil karena beberapa tahanan yang betah menjalani hukuman di rutan menolak dipindahkan ke berbagai lapas di Riau. Tidak ada kronologi yang jelas bagaimana "keributan" itu berlangsung. Tetapi suara sirine yang membuat masyarakat sekitar khawatir, menunjukkan keseriusan status siaga para sipir.

Berbeda dengan penjara lain, Lapas Kelas II B Idi Rayeuk di Aceh Timur mengalami kerusuhan dalam selang waktu yang lebih lama. Pada 13 Februari 2012, dua tahanan berkelahi saat jam besuk. Ini memprovokasi tahanan lain yang segera menerobos pintu penjagaan dan melawan sipir. Tidak dijelaskan penyebab perkelahian tersebut, tapi tahanan menyiram cairan cabai rebus ke wajah sipir dan menyiapkan pisau-pisau buatan sendiri. Itu sebabnya, sipir kepada media menduga bahwa ini adalah pemberontakan yang telah direncanakan. Tahanan lain yang terprovokasi dengan perkelahian tersebut, segera membuat sipir melarikan diri dan tahanan menguasai lapas pada pukul 12.30 WIB. Mereka mulai melempari kaca kantor dan membakar pos pemantau, lalu membakar gudang beras, dapur, kantin dan ruang registrasi. Lemparan batu juga mengenai satu mobil polisi di luar penjara yang baru saja datang untuk mengamankan situasi.

Polisi yang datang langsung menembak tahanan secara membabi buta. Dua tahanan ditembak, satu diantaranya, Hasim bin Samin, meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Kepala Lapas menyatakan di media massa bahwa kematian Hasim diakibatkan luka sayat di leher dan bahwa polisi telah memberikan tembakan peringatan yang tidak digubris sebelumnya. Tetapi Ilham, salah satu mantan tahanan Lapas Idi Rayeuk yang saya wawancarai menyangkalnya:

"Polisi awalnya menembak melalui lubang tangan dekat gagang pintu gerbang. Hasim itu teman saya, dia terkena luka tembak di leher. Saya melihatnya dengan mata saya sendiri darah muncrat dari lehernya akibat tembakan. Kami langsung berlindung di masjid. Apa yang disampaikan Kepala Lapas itu bohong."

Para tahanan mengeluh mengenai jatah makanan yang sangat buruk di Lapas Idi Rayeuk, yang seringkali hanya berupa secuil ikan asin dan sambal (yang mereka gunakan sebagai senjata cair untuk menyiram sipir). Setelah kerusuhan itu, Ilham mengakui bahwa kualitas makanan jauh lebih baik, termasuk pelayanan kesehatan dan keluhan tahanan yang semakin cepat ditindaklanjuti. Anehnya, kerusuhan yang sama terkait makanan tidak layak kembali terjadi beberapa tahun kemudian di Lapas Idi Rayeuk pada 24 Maret 2017. Tahanan dilaporkan mengamuk dan

memukul tembok beton dengan kayu. 400 personel polisi dikerahkan untuk meredakan kerusuhan, dimana tahanan menuntut agar Kepala Lapas dicopot, penyediaan air dan makanan layak, serta perubahan beberapa staf lapas yang dianggap mempersulit pengurusan remisi dan pembebasan bersyarat. Ilham sudah tidak berada di Lapas Idi Rayeuk saat pemberontakan 2015. Tetapi ia menyatakan bahwa tahanan di sana benar-benar mencontoh pemberontakan pada 2012.

Kerusuhan berulang di satu penjara yang sama menarik perhatian saya dan patut diberikan ruang pembahasan tersendiri, sebab ini mengasumsikan kultur pembangkangan tampaknya mendarah daging di sejumlah penjara. Bisa jadi, ingatan-ingatan protes telah diwariskan dari tahanan senior, meski tampaknya lebih mungkin bahwa pelaku kerusuhan yang sama kembali memancing huru hara untuk masalah berbeda. Karena sulitnya melacak tahanan yang bersedia menjadi narasumber, saya tidak banyak memberikan analisis kali ini, dan tidak dapat menjabarkan situasi spesifik macam apa yang memungkinkan kerusuhan bisa kembali berulang kecuali sekedar asumsi tak berdasar di sana sini. Apa yang bisa saya berikan adalah penekanan bahwa seberapapun kerasnya represi pasca-kerusuhan, ia tidak mampu sepenuhnya memberantas potensi insureksional penjara di lain waktu. Potensi-potensi ledakan itu riil, dan ia bisa menjelaskan pada kita mengapa tahanan sering tidak jera untuk melakukan kerusuhan, atau bahwa bara api di dalam penjara sering kali tidak pernah berhasil dipadamkan betul.

BAGIAN 5

Serangan Dua Arah

"Kami tidak ingin membuat penjara menjadi lebih nyaman. Kami ingin membuatnya menjadi tidak dapat dikuasai, tidak dapat diatur, dan tidak dapat dihuni, sembari menyabotase dan menyerang operasi kompleks industri penjara di kedua sisi pagar kawat berduri."

Frank Talk

Amerika Serikat memiliki sejarah panjang kerusuhan penjara dan pemberontakan tahanan. Dekade 70'an dan 80'an menunjukkan salah satu babak paling berdarah dalam kerusuhan penjara di AS. Beberapa kerusuhan yang paling terkenal misalnya saat 33 tahanan dan 10 sipir mati dalam kerusuhan penjara Attica pada 1971, termasuk juga kerusuhan di New Mexico State Penitentiary pada 1980, yang menelan korban dengan jumlah yang sama di pihak tahanan. Pada tahun 1973 saja, terjadi 93 kerusuhan untuk setiap 1 juta tahanan di AS. Tetapi jumlah tersebut terus menurun hingga pada 2003, hanya terjadi tiga kerusuhan. Kekerasan di penjara secara keseluruhan juga turun drastis. Pada tahun 1973, terdapat 63 pembunuhan per 100 ribu tahanan; pada tahun 2000, terjadi kurang dari lima pembunuhan. Hal serupa dapat dikatakan pada serangan tahanan terhadap sipir selama periode yang sama.

Mengapa?

Joseph Bernstein, dalam sebuah artikel di *The Atlantic* berpendapat bahwa perubahan demografi penjara jelas mempengaruhi frekuensi kerusuhan di AS. Saat ini persentase tahanan pidana non-kekerasan lebih banyak daripada sebelumnya. Sementara itu, sebagian besar narapidana "paling berbahaya" sekarang ditempatkan di penjara dengan keamanan super-maksimum. Taktik pengawasan baru dan pembatasan pergerakan tahanan juga telah diperkenalkan. Dan penjara sekarang dikelola dengan "lebih baik" atau lebih manusiawi. Faktor lainnya adalah pengembangan pasukan keamanan elit yang dilatih untuk mencegah dan mengatasi segala jenis gangguan dan kekerasan penjara di AS selama 30 tahun terakhir,

yang berhasil meredam kerusuhan lebih cepat dan lebih awal ketimbang sebelumnya. Bukan berarti kerusuhan tidak terjadi lagi saat ini, tetapi faktor-faktor di atas berhasil meminimalisir dan mengantisipasi ledakan-ledakan spontan di antara tahanan.

Tanpa menutup kemungkinan, kita juga harus bersiap untuk masa depan dimana jumlah kerusuhan dan pemberontakan tahanan semakin berkurang, tahanan yang terlibat semakin sedikit dan kerusuhan dengan durasi yang lebih singkat, seperti sekarang terjadi di AS. Penurunan ini sebenarnya sudah mulai terjadi pada akhir periode 2012-2022. Mulanya, seiring peningkatan jumlah tahanan narkotika sejak 2014, jumlah kerusuhan juga meningkat. Pada 2012, hanya terjadi tiga kasus kerusuhan. Jumlah ini meningkat sejak 2015 (4 kasus), 2016 (5 kasus), 2017 (6 kasus), 2018 (7 kasus) dan mencapai puncaknya pada 2019 (10 kasus). Pada 2020, jumlah ini kembali menurun seperti ke awal periode dengan hanya 3 kasus, dimana 2 kasus diantaranya terjadi karena protes tahanan narkoba terhadap penerapan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 yang ditujukan untuk pengurangan jumlah tahanan dalam menanggulangi pandemi Covid-19. Ketika saya sedang menuliskan ini pada 2022, baru terjadi sekali kerusuhan saja hingga pertengahan tahun. Saya tidak yakin apa yang menyebabkan penurunan drastis jumlah kerusuhan penjara ini, dan apakah penjelasan Joseph Bernstein tentang kondisi kepenjaraan di AS juga berlaku di Indonesia. Tetapi kita menemukan kondisi yang sama: kerusuhan penjara menurun di saat jumlah tahanan meningkat.

Menariknya, sementara kerusuhan penjara di Amerika Serikat menurun, serangan fisik terhadap penjara yang dilakukan dari luar semakin meningkat. Ini fenomena yang khususnya terjadi di Amerika dan Eropa yang memiliki "penjara" khusus untuk menahan imigran seiring negara mereka jadi tujuan pengungsi yang menghindar dari perang sipil dan krisis di Timur Tengah. Serangan ke penjara ini, mendapatkan gaung khususnya di antara gerakan anarkis dan anti-fasis dalam beberapa tahun terakhir, yang sejak lama telah menekankan solidaritas internasional bagi para imigran.

Pada Juli hingga Mei 2019 misalnya, terdapat lebih dari delapan serangan terhadap penjara dan pusat penahanan imigrasi di AS. Yang paling heroik, terjadi setelah video makanan tahanan yang berjamur di Dekalb County Jail di Atlanta tersebar. Ini mendorong sekitar 50 demonstran, yang sebagian besar bertopeng, memaksa masuk ke atrium penjara, bentrok dengan polisi di luar, melemparkan petasan, bom asap dan pembatas lalu lintas, sembari mencoret-coret lapisan luar penjara dengan cat semprot. Polisi melakukan beberapa penangkapan, tetapi para

POLISI DI DEPAN LAPAS KEROBOKAN DENPASAR YANG TERBAKAR, 2012.

demonstran mengepung kendaraan polisi dan mencegahnya. Willem van Spronsen, seorang anarkis dan anti-fasis, pada Juli 2019 juga menyerang pusat penahanan imigran (ICE) di Tacoma, Washington. Spronsen yang dilaporkan membawa ransel dan suar, ditembak mati oleh polisi karena diduga hendak meledakkan tangki gas propana di fasilitas tersebut. Dalam komunike yang ia tulis sebelum melancarkan serangannya, Spronsen menghasut bahwa "sudah saatnya untuk mengambil tindakan melawan kekuatan jahat", serta menyerang "kamp penahanan/konsentrasi yang ditujukan demi mencari profit melimpah."

Ini belum termasuk puluhan demo bising (*noise demo*) yang terjadi secara serempak di banyak kota di Amerika, dimana demonstran berkemah di sekitar fasilitas penjara sambil membawa peralatan bunyi-bunyian, hanya untuk menunjukkan pada tahanan di dalam bahwa mereka masih diingat dan didukung. Di beberapa penjara, tahanan yang mengetahui bahwa ada solidaritas dari luar, membakar pakaian mereka keluar dari terali besi, menunjukkan karton bertuliskan "terima kasih!" atau ikut memukulkan jeruji mereka. Beberapa kamp itu bahkan ditujukan sebagai aksi langsung untuk mencegah bus yang mengangkut imigran anak agar tidak masuk ke pusat penahanan.

Serangan-serangan ke penjara akan menjadi topik yang relevan untuk kita bahas sebagai suatu kemungkinan yang dapat terjadi di masa depan

kepenjaraan Indonesia. Sebab, semakin penjara berhasil membatasi kekuatan tahanan, maka semakin besar tahanan menggantungkan diri pada bantuan dan solidaritas dari luar penjara. Hal ini bahkan tampak dari ekspresinya yang paling jelas di AS. Saat kerusuhan di St. Louis Jail pada 6 April 2021, para tahanan membentangkan spanduk di antara jendela-jendela yang mereka pecahkan. Spanduk itu ditujukan untuk siapapun yang ada di jalanan kota itu. Bunyinya miris: "Tolong kami". Ini semakin miris jika kita tahu bahwa tahanan Mission Institution di British Columbia pada 2020 juga membentangkan karton dengan tulisan yang persis sama! Kekuatan tahanan yang semakin melemah di tengah penjara yang semakin ketat, mungkin juga semakin mendorong gerakan abolisionis untuk mengambil bentuk aksi yang lebih langsung dalam penghancurannya.

Sementara LSM yang bergerak di bidang reformasi hukum dan pemidanaan mengusulkan pemisahan tahanan politik dari tahanan sosial, permohonan amnesti, dekriminalisasi, menekankan bentuk pemidanaan alternatif dan menghindari diri untuk terlibat dengan tahanan yang sebenarnya sedang memberontak di dalam penjara, pemerintah Indonesia menunjukkan arah yang tidak kalah buruknya. Untuk mencegah kerusuhan kembali terjadi, dimana-mana kita tahu bahwa penjara-penjara baru yang lebih ketat sedang dibangun. Pada pertengahan 2021, Menkumham Yasonna Laoly mengumumkan akan membangun tiga penjara baru dengan keamanan super-maksimum di Nusakambangan. Di dalam penjara dengan keamanan maksimum, tahanan tidak dapat berkomunikasi dengan mudah satu sama lain, yang mencegah kemungkinan pengorganisiran. Keberadaan sel-sel individual juga mengisolir kemungkinan perlawanan secara kolektif.

Hal ini sekarang hanya berlaku di penjara khusus. Tetapi kita tahu bahwa peningkatan keamanan juga diberlakukan di banyak penjara di Indonesia dengan penambahan jumlah sipir serta pengenalan teknologi pengawasan dan keamanan terkini. Tindakan pemerintah mungkin memang membantu memadamkan gangguan dan mengurangi kekerasan di penjara, tetapi secara bersamaan juga meredam suara-suara tahanan yang mencoba menyampaikan protes dan aspirasinya. Semakin tebal tembok penjara, semakin senyap jeritan tahanan yang dapat kita dengar.

SOLIDARITAS BERARTI MENYERANG

"Gerakan revolusioner harus dengan penuh semangat mengarahkan kegiatannya ke arah penghapusan perbudakan/penjara dan penghapusan segala bentuk penahanan. Perang melawan lembaga-lembaga ini dan pelengkap politik mereka yang lebih luas tidak dapat dilihat sebagai perjuangan yang berbeda dari konflik revolusioner yang lebih besar."
Revolutionary Abolitionist Movement

Ketika kita membicarakan penghancuran penjara, kita melihat beberapa metode yang memungkinkan.

Pertama, adalah sejenis reformasi untuk beberapa kebijakan yang mengarah pada penghapusan penjara secara bertahap dan menggantikannya dengan sistem rehabilitasi yang tidak menitikberatkan pada penghukuman dan pelembagaan pemerintah. Cara ini mungkin akan menghabiskan sebagian besar waktu untuk kampanye; perubahan kebijakan publik dan pengalihan anggaran dari institusi kepolisian, pengadilan dan penjara untuk peningkatan penyediaan kesejahteraan (pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat); yang disusul dengan pembebasan massal tahanan (dekarserasi). Model ini biasa diusung para liberal progresif, yang bertujuan membayangkan kembali bagaimana masyarakat saat ini dapat menangani masalah sosial tanpa keberadaan penjara. Itu artinya, mereka tidak berniat untuk mengubah masyarakat secara keseluruhan, karena hanya mencopot satu aspek yang dipandang buruk tetapi mempertahankan mekanisme negara dan kapital bekerja. Pada dasarnya, model ini berdasar pada argumentasi bahwa keberadaan kriminalitas erat kaitannya dengan kemiskinan; menghapus kemiskinan berarti mengurangi tingkat kriminalitas, suatu kondisi ideal dimana penjara menjadi tidak dibutuhkan.

Gerakan anarkis telah sejak lama mengkritisi baik wacana dan metode dari gerakan penghapusan penjara semacam ini. Biasanya, ini terutama ketika kita sedang berbicara tentang capaian jangka pendek macam apa yang hendak kita raih. Kita memiliki dua pilihan untuk membebaskan tahanan dari penjara. Ketika kita tidak benar-benar memiliki kapasitas untuk secara langsung menghancurkannya sendiri, kita dapat, seperti dikatakan Layne Mullett, "meyakinkan, menekan, atau memaksa negara untuk membiarkan mereka keluar." Kita dapat menuntut agar pemerintah menerapkan pemidanaan alternatif selain pemenjaraan (seperti tahanan rumah/kota, rehabilitasi, dst).

Perjuangan semacam ini mungkin memberikan tahanan kondisi penjara yang lebih baik untuk dijalani, atau berhasil menyeret keluar beberapa tahanan. Tetapi perjuangan untuk reformasi tidak boleh menyeret kita menjadi seorang reformis. Alasan utama mengapa abolisionis penjara

dari gerakan anarkis harus menolak pandangan abolisionis yang lebih moderat semacam ini adalah karena para revolusioner harus mencoba menghancurkan penjara sebagai bagian dari upaya penghancuran yang lebih luas terhadap lembaga peradilan, kepolisian, negara, patriarki dan kapital. Kita juga perlu mengingat Bonanno saat ia menyatakan bahwa:

"Penjara adalah ekspresi kekuasaan yang paling langsung dan brutal, dan seperti halnya kekuasaan, ia harus dihancurkan, ia tidak dapat dihapuskan secara bertahap. Siapapun yang berpikir mereka dapat memperbaikinya sekarang untuk menghancurkannya di masa depan akan menjadi tawanannya untuk selamanya."

Gerakan abolisionis yang setengah-setengah, yang menuntut penghapusan penjara tanpa penghapusan negara, berarti mengakui negara sebagai sumber pemberi kewenangan untuk memenuhi tuntutan itu. Itu sebabnya, berjuang di arena yang telah disediakan negara pertama-tama sudah menjadi sebuah kekalahan. Satu-satunya kemungkinan ketika negara membubarkan penjara adalah ketika perkembangan teknologi pengawasan, pembatasan pergerakan dan perbatasan yang lebih ketat mampu menggantikan penjara.

Negara tanpa penjara bisa jadi eksis. Novel *1984* karya George Orwell misal, menggambarkan masyarakat tanpa penjara, karena masyarakat yang ada adalah satu penjara besar. Ini skenario distopia yang tengah berlangsung hari ini, dan bisa jadi akan terus memburuk. Ini adalah kondisi ketika kontrol sosial tidak dikonsentrasikan lagi ke dalam penjara, tetapi melalui perkembangan teknologi pengawasan, pemolisian dan arsitektur. Mekanisme penjara, dengan demikian menyebar ke semua sektor kehidupan. Perkembangan telepon seluler bahkan telah mengubah cara kerja pengawasan yang tidak lagi pemantauan terpusat terhadap seluruh populasi, tetapi bagaimana populasi itu melaporkan dirinya secara sukarela.

Kedua, pemberontakan atau pemogokan tahanan yang membuat penjara berhenti beroperasi (yang berarti aparaturnya kehilangan wewenang dan tahanan mengambil alih penjara), bangunan penjara secara fisik hancur dan terbakar, dan tahanan membebaskan dirinya. Kasus semacam ini sering terjadi, termasuk di Indonesia sebagaimana telah saya jabarkan pada bagian yang sudah-sudah. Ini berarti gerakan tahanan untuk menghancurkan sendiri penjara yang mengerangkeng mereka. Meski begitu, penekanan berlebihan terhadap "tidak ada yang dapat membebaskan suatu kaum daripada kaum itu sendiri" menjadi kurang pantas dalam konteks gerakan anti-penjara. Situs web 11 Juni yang didedikasikan untuk menggemakan Hari Solidaritas untuk Marius Mason & Seluruh Tahanan Anarkis Jangka Panjang, baru-baru ini meminta kita

untuk berhati-hati agar tidak menempatkan beban perjuangan anti-penjara kepada para tahanan:

"Mereka yang berada di penjara —yang berada dalam kondisi kontrol, pengawasan, dan pembatasan yang ekstrim— dalam banyak hal paling tidak mampu secara aktif melawan pertempuran yang dapat dimenangkan melawan institusi penjara. Kita yang hidup dalam kebebasan relatif adalah yang dapat paling banyak melakukan pekerjaan untuk membongkar sistem penjara dan yang memiliki kesempatan untuk berpikir secara strategis tentang tindakan dan tempat perjuangan apa yang akan memiliki dampak paling positif bagi kehidupan orang-orang di penjara."

Karena itu, kita memiliki kemungkinan yang *terakhir*, yaitu ketika intensitas krisis yang meningkat di luar penjara berujung pada terciptanya peluang untuk menyerang penjara dan membebaskan tahanan. Situasi ini bisa berwujud dalam sangat banyak situasi, seperti perang sipil, revolusi dan pemberontakan bersenjata, krisis ekonomi, kerusakan ekologi dan bencana alam, atau huru-hara besar. Ketika kita menyadari keterbatasan tahanan dan kapasitas kita, maka ini sudah saatnya bagi kita untuk memulai pembahasan untuk kasus-kasus serangan ke penjara dalam konteks pergolakan yang terjadi di luarnya. Di Indonesia, hal ini dapat kita tengok di Papua.

KERUSUHAN, DI LUAR DAN DI DALAM

"Tidak mungkin revolusi terjadi di dalam penjara, tetapi pemberontakan dan perlawanan bisa terjadi dengan dukungan kritis dan sumber daya material dari gerakan di luar penjara."
Frank Talk

Bersama dengan Maluku, Aceh dan Timor Leste, Papua adalah salah satu basis gerakan pembebasan nasional yang eksis memberontak melawan pemerintahan Indonesia dalam tiga dekade terakhir. Papua adalah wilayah yang relatif tidak stabil hingga hari ini, dipenuhi dengan pembunuhan masyarakat sipil oleh militer di luar pengadilan dan gerilyawan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang kerap melakukan serangan bersenjata. Kampanye untuk referendum, dilakukan baik secara internasional oleh para tokoh politik yang diasingkan, dan di tingkat nasional khususnya oleh mahasiswa yang berkuliah di Jawa. Para mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), aktif menggelar berbagai demonstrasi di kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya dan Malang. Tetapi demonstrasi yang berlangsung pada 2019 di Surabaya dan Malang, berujung pada serangkaian kerusuhan yang membuat asap mengepul di berbagai kota di Papua, hingga ke dalam penjara.

TAHANAN LAPAS TANJUNG GUSTA MEDAN SAAT KERUSUHAN YANG MEMBUAT 212 TAHANAN MELARIKAN DIRI PADA 2013.

Semua dimulai oleh aksi serentak mahasiswa Papua yang mengecam penandatanganan Kesepakatan New York antara Pemerintah Indonesia dan Belanda pada 15 Agustus 1962 tentang pemindahan kekuasaan atas Papua barat dari Belanda ke Indonesia. Para pendukung referendum memandang bahwa kesepakatan ini tidak sah karena tidak melibatkan elemen masyarakat Papua, dan bahwa Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang diadakan pada 1969, proses dan hasilnya dimanipulasi agar Papua Barat diintegrasikan secara paksa pada Indonesia. Polisi dan ormas anti-separatisme melakukan serangkaian kekerasan rasial sebagai respon atas aksi para mahasiswa Papua, menyebut mereka dengan "monyet", hingga mengevakuasi paksa mahasiswa dari asramanya. Walikota Malang bahkan menyatakan bahwa para mahasiswa Papua dapat dipulangkan ke daerah asalnya.

Ini menyulut kemarahan berujung kerusuhan di berbagai kota di Papua (serta berbagai demonstrasi di banyak kota besar di Indonesia) yang mengakibatkan hingga 30 orang tewas. Di Manokwari, demonstrasi yang dilakukan pada 19 Agustus 2019, berubah menjadi kerusuhan. Tiga polisi terluka akibat lemparan batu dan gedung DPRD Manokwari dibakar habis. Salah seorang demonstran, Billy Wairara, ditangkap karena tuduhan pembakaran properti dan ditahan di Lapas Kelas II B Manokwari dengan hukuman satu tahun sepuluh bulan. Ia kabur

dari penjara itu pada akhir 2020 dan ditangkap tidak lama kemudian. Saat penangkapan, Billy melakukan perlawanan dan ditembak di kaki (pernyataan resmi menyatakan itu peluru karet), sementara keluarga dan masyarakat sekitar melakukan pemblokiran jalan, yang berujung pada kericuhan kecil sebelum kemudian mereka dibubarkan secara paksa oleh polisi.

Wujud solidaritas yang sama dapat kita temukan di dua kota lain. Di Sorong, di hari yang sama dengan kerusuhan secara serempak, massa menyerbu Bandar Udara Domine Eduard Osok, merusak berbagai properti dan melempari polisi dengan batu. Berbagai gejolak yang terjadi di luar penjara, bagaimanapun sampai di telinga para tahanan Lapas Kelas II B Sorong. Pada tengah hari, para tahanan membuat keributan tetapi berhasil diredam. Tiba-tiba, terdapat lemparan batu ke dalam penjara dari luar. Mulanya tahanan melempar balik ke arah sumber lemparan batu, tetapi kemudian sasarannya mengarah ke sipir. Saat sore hari, salah satu ruangan kantor mulai terbakar, menunjukkan bahwa para tahanan berhasil keluar dari blok tahanan. Salah satu sudut ruangan registrasi kemudian dijebol (entah dari dalam atau dari luar), yang dijadikan sarana bagi tahanan untuk melarikan diri. Mengingat bahwa penjebolan berada tepat di titik lemah penjara, jelas bahwa penjebolan dilakukan dari dalam oleh tahanan yang mengetahuinya. Pemberontakan berlangsung seharian, sebagian besar bangunan penjara terbakar, dan sipir melarikan diri dari penjara (termasuk juga pada akhirnya 258 tahanan yang harusnya mereka jaga). Pemberontakan dan kaburnya ratusan tahanan Lapas Sorong pada 2019 nampaknya menginspirasi pemberontakan yang terjadi setahun kemudian di lapas yang sama pada 22 April 2020 ketika tahanan menuntut pembebasan bersyarat karena kecemburuan terhadap rencana pembebasan 50 tahanan dalam rangka asimilasi semasa pandemi Covid-19 (lihat kembali Bagian 3).

Seminggu setelah kerusuhan di Lapas Sorong, pada 29 Agustus 2019, Lapas Kelas II A Abepura di Jayapura giliran terbakar. Ini dimulai dari konsentrasi massa yang membawa bendera bintang kejora dan berteriak-teriak, "merdeka!" Ketika pergerakan massa mulai mengarah ke penjara, polisi melaporkan hal ini kepada sipir. Jelas bahwa polisi telah belajar dari kerusuhan di Lapas Sorong dan mencoba mengantisipasinya. Polisi berhasil menghalau massa yang menuju penjara dan menggiring mereka ke arah lain, sementara di dalam, sipir menghentikan kunjungan keluarga tahanan. Para tahanan akhirnya disuruh kembali ke dalam blok masing-masing. Tetapi beberapa tahanan menolak perintah itu, menyatakan bahwa mereka ingin menonton televisi agar dapat memantau keadaan di luar yang sedang rusuh. Di saat itulah kerusuhan dimulai

oleh beberapa tahanan yang melempari batu ke sipir. Bengkel penjara dibakar dan empat tahanan yang nekat, menaiki pos penjagaan dan melawan petugas bersenjata di sana. Sipir yang kalang kabut kemudian lompat dari pos, satu orang diantaranya patah tulang, dan empat tahanan tersebut melarikan diri. Pemberontakan gagal meluas karena personel TNI-Polri keburu datang meredam situasi dan sebagian besar tahanan terkurung di kamar mereka masing-masing. Kelak pada Agustus 2021, seorang tahanan yang bergabung dengan OPM berhasil melarikan diri dari lapas ini.

Kisah pemberontakan di penjara-penjara Papua Barat mengilhami kita mengenai solidaritas yang melampaui jeruji dan kawat berduri. Batu-batu masih dapat dilempar ke dalam penjara dan kabar pemberontakan tiba ke telinga tahanan. Semangat tahanan untuk membebaskan diri dari penjara dan membumihanguskannya menggemakan perjuangan yang sama dari demonstrasi di luar tembok penjara yang tinggi: menentang kolonialisme Indonesia. Solidaritas semacam ini, sulit kita temukan dalam kasus-kasus kerusuhan dan pemberontakan penjara lain di Indonesia. Ia berasal dari akumulasi kemarahan kolektif, situasi unik yang dirasakan baik oleh "masyarakat tahanan" yang berada di luar atau di dalam penjara. Dalam hal ini, penjara atau gedung DPRD di Papua mewakili simbol dari institusi penjajahan yang sama, yang perlu sama-sama dihancurkan. Terlepas dari apakah serangan ke penjara direncanakan atau tidak, hal inilah yang menghubungkan tahanan dengan masyarakat yang berada di luar penjara.

MENYERBU GERBANG

> *"Sekarang, masalah penjara harus pula menjadi masalah kita dan kita harus memikirkannya selama kita berjuang, jika kita memang berjuang. Semua ini, tentu saja, sambil menunggu pemberontakan selanjutnya. Karena pemberontakan akan cukup untuk membuka penjara dan menghancurkannya untuk selama-lamanya."*
>
> **Alfredo M. Bonanno**

Pada larut malam 20 Januari 2022, sebuah bom mobil melakukan serangan bunuh diri ke penjara Al-Sina'a di Suriah, yang berada di bawah kendali Administrasi Otonom Suriah Utara dan Timur (dikenal sebagai Rojava). Serangan tersebut segera disusul dengan tembakan senjata berat ke arah penjara, yang memancing kerusuhan penjara dimana tahanan berhasil mengambil alih gudang senjata, menyandera sipir dan menguasai penjara. Al-Sina'a saat itu, telah menampung 3.500 tawanan perang ISIS. Oleh karena itu, kelompok fundamentalis Islam paling kuat dalam dekade ini, berupaya keras untuk membebaskan tahanan didalamnya.

Selama sepuluh hari, pertempuran berlangsung antara SDF dan ISIS. Serangan pembobolan penjara ini menjadi pertempuran terbesar dan paling mematikan yang melibatkan ISIS di wilayah tersebut sejak awal 2019, ketika mereka kehilangan benteng terakhir mereka. Pada akhir pertempuran, ratusan tahanan berhasil melarikan diri.

Serangan ke penjara jauh lebih sering terjadi dari yang kita kira. Sepanjang sejarah, banyak kelompok dari berbagai spektrum politik telah menjadikan penjara sebagai target serangan mereka. Termasuk serangan bersenjata ke Distrik Penjara Cotabato di Filipina oleh terduga Bangsamoro Islamic Freedom Fighters pada 2017. Hal ini juga pernah dilakukan oleh para anarkis. Memanfaatkan kekuatan bersenjata, kelumpuhan militer, dan kekosongan kekuasaan, kekuatan anarkis mengambil kesempatan baik yang tersedia untuk menghancurkan penjara dengan tangan mereka sendiri.

Pada pertengahan 1917, militer Kekaisaran Rusia mengalami kerugian besar selama Perang Dunia I, di saat bersamaan ketika terjadi kelaparan dan krisis ekonomi akut yang sering berujung pada kerusuhan di penjuru negeri. Para pemimpin tentara dan pejabat tinggi yakin bahwa jika Tsar Nicholas II turun tahta, kerusuhan yang tengah merebak akan mereda. Banyak dari tentara yang melakukan pembelotan dan desersi, ikut menumbangkan Tsar. Tetapi pemerintahan yang baru segera dikudeta dan kekuasaan diambil alih oleh Bolshevik pada November 1917. Di tengah krisis politik itu, pintu-pintu penjara dibuka dan banyak anarkis yang dibebaskan.

Setelah mendekam selama delapan tahun di penjara, Nestor Makhno, seorang anarkis dari Ukraina, dengan terhuyung-huyung melangkah keluar dari penjara akibat terbiasa dengan beban rantai yang telah mengikatnya. Ia dibebaskan sambil menggunakan kacamata hitam karena terbiasa hidup dalam kegelapan penjara Butyrskaya di Moskow yang saat itu dihuni oleh tiga ribu tahanan politik, termasuk para komunis dan anarkis. Segera setelah ia dibebaskan, Makhno kembali ke Ukraina selatan dan mengorganisir milisi anarkisnya sendiri, Tentara Hitam (*Chjornaya Gvardiya*).

Di dalam milisi tersebut, ikut serta Maria Nikiforova, satu-satunya komandan perempuan dari kekuatan revolusioner besar di Ukraina -seorang *atamansha*. Dikenal sebagai, "Marusya", ia memimpin pasukan khusus Druzhina yang melintasi dataran Rusia menggunakan banyak kereta api yang dihiasi spanduk-spanduk bertuliskan "Pembebasan Para Pekerja adalah Urusan Para Pekerja Sendiri", "Panjang Umur Anarki", "Kekuasaan adalah Parasit", dan "Anarki adalah Ibu Keteraturan." Pada

Desember 1918, saat pasukan itu terlibat dalam pertempuran di Odessa melawan Tentara Putih, Maria menyerang penjara di sana. Tidak ada kronologi detail yang mencatatnya, tetapi penjara tersebut terbakar rata dengan tanah, termasuk kepala sipir Pereleshin. Saat kediktatoran Merah semakin berkuasa, pembakaran penjara ini menjadi salah satu dakwaan untuk tuntutan eksekusi mati Maria Nikiforova setahun sesudahnya, mengakhiri petualangan heroiknya yang singkat.

Dua dekade setelah revolusi Rusia, kita akan beralih ke Spanyol pada 17 Juli 1936, ketika militer Spanyol melakukan kudeta terhadap pemerintahan Republik yang saat itu para anarkis juga terlibat didalamnya. Sementara militer melakukan pemberontakan, keesokan harinya Spanyol mengalami rotasi empat pemerintahan yang saling menggantikan satu sama lain hanya dalam satu hari. Ini menyebabkan struktur koersif negara dibubarkan atau lumpuh di banyak tempat di mana komplotan kudeta tidak merebut kekuasaan. Saat itulah, serikat buruh anarko-sindikalis CNT yang memiliki sekitar 1.577.000 anggota, bersamaan dengan organisasi kiri lain, mengangkat senjata, menyerbu barak, mendirikan barikade dan akhirnya mengalahkan militer. Pintu penjara banyak yang dibuka dan beberapa penjara dihancurkan. Baik itu tahanan politik dan kriminal banyak yang dibebaskan. Salah satu serangan penjara dilakukan oleh milisi anarkis Valensia *Columna de Hierro* [Kolom Besi] yang membakar arsip peradilan dan membebaskan tahanan kriminal dari penjara San Miguel de los Reyes. Banyak dari tahanan yang dibebaskan itu kemudian menjadi simpatik dan memutuskan bergabung dengan milisi anarkis. Mereka juga menyerang penjara di Castellón dan Vinaroz dan menembak mati tahanan fasis di sana.

Kisah semacam ini berulang lagi di seluruh dunia, seolah jadi sesuatu yang direncanakan dan menjadi *bagian* dalam rangkaian revolusi dan pemberontakan. Di Indonesia, gerombolan bersenjata yang terlibat dalam pemberontakan PKI (dengan adanya indikasi pengaruh anarkis yang kuat pada masanya) pada awal November 1926 juga mencoba menyerang penjara Glodok dan Cipinang. Sayang mereka gagal.

Pada sebagian besar kerusuhan, sebenarnya sipir hampir selalu dibuat tidak berdaya oleh tahanan. Mereka dipukul mundur keluar sementara tahanan secara praktis mengambil alih penjara. Tanpa bala bantuan tentara-polisi yang memadai selama ini, hampir mustahil bagi sipir untuk meredam pemberontakan dengan kekuatannya sendiri yang sangat terbatas. Sayangnya, bala bantuan itu selalu hadir di tiap momen kerusuhan penjara yang telah saya bahas. Meski begitu, serangan dan dukungan dari luar penjara di momen-momen kritis pergolakan sosial seperti telah saya jelaskan dalam kasus-kasus dari Papua, Rusia dan Spanyol, mampu

secara sekaligus membebaskan tahanan dan menghancurkan penjara. Bagi Bonanno, persis ketika struktur kekuasaan negara tidak berfungsi secara normal, inilah kesempatan bagi pembubaran penjara.

"...ada kondisi khusus dari karakter revolusioner yang dapat memungkinkan penghancuran penjara. Mereka dapat menciptakan pergolakan sosial dan politik yang akan membuat utopia ini menjadi kenyataan, karena kekuasaan, yang dibutuhkan penjara untuk tetap eksis, tiba-tiba tidak ada..."

SALAH SEORANG TAHANAN LAPAS NARKOBA HINAI LANGKAT BERJUMPA DENGAN KELUARGA SETELAH KERUSUHAN, PADA 2019.

PENUTUP

Menjebol Tembok

"Ingatan-ingatan insureksioner adalah senjata kita."

Baeden, Vol. I

Saya telah menganalisis 47 kasus kerusuhan penjara di Indonesia, yang berlangsung selama persis satu dekade (2012-2022). Lebih dari separuh kerusuhan (25 dari 47 kasus) di Indonesia terjadi di penjara-penjara Sumatera, dimana Aceh menjadi provinsi jumlah kerusuhan tertinggi (11 kasus), disusul dengan Riau dan Sumatera Utara masing-masing 4 kasus. Pada 2012, hanya terjadi tiga kasus kerusuhan. Jumlah ini meningkat sejak 2015 (4 kasus), 2016 (5 kasus), 2017 (6 kasus), 2018 (7 kasus) dan mencapai puncaknya pada 2019 (10 kasus). Pada 2020, jumlah ini kembali menurun seperti ke awal periode dengan hanya 3 kasus.

Kerusuhan yang terjadi dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan penyebab atau pemantiknya, antara lain: protes atas layanan administrasi, diskriminasi, pungutan liar dan fasilitas penjara (18 kasus); penolakan razia, baik narkoba dan telepon seluler (11 kasus); penganiayaan oleh sipir (2 kasus); perkelahian antar tahanan (5 kasus); dan penyebab lainnya, seperti perkelahian dengan pengunjung, protes pemindahan tahanan atau tidak jelas/tidak diketahui (11 kasus).

Sejujurnya, ada beberapa kerusuhan yang, saya curiga, tampaknya sengaja ditujukan untuk melarikan diri, meski kemudian tahanan mengajukan tuntutan untuk mengaburkan motif sebenarnya. Atas permintaan narasumber, saya sengaja tidak jelaskan kerusuhan mana yang sesungguhnya dirancang untuk pelarian massal. Kerusuhan tersebut pada akhirnya saya masukkan pada salah satu dari kategori di atas.

Selain itu, beberapa kerusuhan lagi mungkin dapat dimasukkan dalam dua atau tiga kategori sekaligus. Penjara begitu bermasalah sehingga seluruh kategori itu sebenarnya dapat terjadi secara konstan. Makanya, saya membedakan antara *penyebab* dan *pemantik*. Tahanan dapat memberontak karena beragam sebab, tetapi ia hanya butuh satu pemantik. Ketika suatu kerusuhan memiliki banyak keluhan dan aspirasi, saya tidak akan menggabungkannya dalam beberapa kategori selain pada kategori yang jadi pemantik kerusuhan itu.

Sekarang, apa yang dapat dipahami dari angka-angka ini? Saya tampaknya menemukan beberapa petunjuk.

Pertama, tahanan jelas tidak dapat mentolerir tekanan yang terlampau ekstrim atas tubuh dan jiwa mereka, khususnya terkait kebutuhan dasar seperti makan dan minum, pasokan air dan listrik, akses pada kesehatan, ibadah dan seksual. Mungkin, ini kenapa pemberontakan yang diakibatkan oleh keluhan terhadap pelayanan administrasi dan fasilitas penjara menempati posisi pertama penyebab kerusuhan. Hingga batas tertentu, ini seperti cerminan dari masyarakat kita sendiri, yang berada di luar penjara. Penolakan atas razia jadi pemantik kedua karena narkoba dan telepon seluler seringkali jadi medium pemenuhan hidup. "Pengguna jadi pengedar karena dipenjara." Banyak tahanan tetap mengedarkan narkoba di luar atau di dalam penjara, dengan bantuan sipir yang korup dan keberadaan telepon seluler yang dilarang. Razia penjara layaknya perampasan tanah bagi para petani.

Kedua, saya bertanya-tanya mengapa perkelahian antar tahanan jauh lebih mudah memancing kerusuhan ketimbang penganiayaan oleh sipir. Tidak ada data yang akurat mengenai penyiksaan dan penganiayaan di penjara, tetapi saya pastikan bahwa jumlahnya jauh lebih tinggi dari yang pernah dicantumkan oleh laporan penelitian manapun. Tentu saja, saya curiga bahwa para tahanan telah dibuat, atau terpaksa, untuk menormalisasi penyiksaan dan kekerasan fisik. Kecuali ada tahanan yang meninggal secara tidak adil dan tidak wajar saja maka ini dapat memancing kerusuhan seperti di Lapas Banceuy Bandung. Mungkin, para tahanan menganggap kekerasan oleh sipir adalah hal yang sah oleh hukum, seperti masyarakat di luar penjara menganggap monopoli kekerasan oleh polisi adalah hal yang sah pula.

Ketiga, saya curiga bahwa Aceh jadi provinsi dengan jumlah kerusuhan penjara tertinggi karena ini ada hubungannya dengan kultur Aceh sebagai salah satu titik pemberontakan separatis. Baru-baru ini, ada berita mengenai penggagalan penyelundupan senjata api dari luar di Lapas Idi Rayeuk Aceh. Jelas, jika terjadi krisis politik, penjara-penjara

PETUGAS MEMADAMKAN API YANG MENGHANGUSKAN LAPAS BANCEUY, BANDUNG, PADA 2016.

Aceh akan jadi yang pertama dibakar. Tapi saya juga tidak bisa menjawab mengapa pemberontakan di Papua jauh lebih sedikit, padahal ini adalah titik pemberontakan separatis lain di Indonesia. Bisa jadi, polisi dan militer kita lebih suka mengeksekusi mati orang Papua ketimbang memenjarakannya, atau bahwa orang Papua lebih memilih mati ketimbang dipenjarakan penjajahnya. Yang kita ketahui, jumlah tahanan di Papua memang sedikit. Memang, semakin ke timur, semakin jarang terjadi kerusuhan penjara.

Keempat, mengapa penjara-penjara di Jawa lebih jarang rusuh, dan kalau pun ada, ia berasal dari perkelahian antar tahanan? Hanya ada dua kemungkinan. Mungkin ini ada hubungannya dengan tradisi kepatuhan dalam kultur Jawa tradisional. Atau, apakah kondisi penjara di Jawa lebih baik, atau tahanan dan sipir telah mencapai kesepakatan dan keseimbangan tertentu (peredaran yang lebih bebas untuk narkoba dan telepon seluler) yang mencegah konflik? Apakah masyarakat kita juga tidak akan memberontak selama kebutuhan dasar mereka terpenuhi, bahkan walaupun kebebasan mereka direnggut?

Saya harap, olahan kuantitatif di atas sedikit banyak bakal berguna untuk kita memahami corak gerakan (?) pengorganisiran tahanan dan memahami masyarakat kita sendiri. Meski saya harus akui dengan

kerendahan hati, bahwa pada akhirnya saya hanya dapat memberikan lebih banyak pertanyaan. Setidaknya, sebagai bagian dari penutup, saya bisa berikan beberapa materi reflektif, karena kita tidak dapat melupakan kisah pemberontakan di dalam penjara. Berbuat demikian malah menjadikan kita lupa akan kapasitas kita sendiri untuk melawan. Selain itu, saya pikir ada berbagai pelajaran berarti yang dapat kita pahami untuk perjuangan kita saat ini.

MEMAKNAI PERLAWANAN

> *"Baik kemenangan atau kekalahan itu tidaklah penting, yang terpenting memastikan mata kita berbinar-binar di dalam pertempuran."*
>
> **Konspirasi Sel Api (CCF)**

Yang paling pertama adalah tentang inspirasi, tentang keinginan kuat untuk melawan di tengah situasi yang sulit. Para tahanan memiliki sumber daya, akses informasi, dan kemungkinan pengorganisiran yang lebih kecil ketimbang kita. Tetapi ini tidak meniadakan peluang untuk menyerang, secara spontan atau terorganisir. Para tahanan memanfaatkan kesempatan terbaik yang mereka miliki untuk melawan di tengah keterbatasan. Coba perhatikan kembali: batu-batu di halaman, barang pribadi di dalam sel, hingga merampas senjata sipir, para tahanan mencoba mengambil apapun yang dapat mereka pegang di sekitar mereka sebagai alat untuk menyerang.

Pemberontakan tahanan adalah momen tentang mereka yang ditundukkan tetapi terus melawan meski ia punya sangat kecil harapan dan kemungkinan untuk diraih. Setiap penjara yang terbakar dibangun kembali, lebih kokoh dan dengan penambahan personil dan kebijakan lebih ketat dari sebelumnya. Sebagian tahanan yang berhasil kabur, tetap menyerahkan diri atau tertangkap kembali. Tidak ada jaminan bahwa tuntutan tahanan dipenuhi. Tidak ada jaminan bahwa kondisi penjara menjadi lebih baik. Tidak ada jaminan bahwa tahanan yang berhasil melarikan diri meninggalkan kompleks penjara akan segera menemukan kehidupan yang lebih baik dan lebih bahagia ketimbang sebelumnya.

Tingginya frekuensi kerusuhan spontan ketimbang pemberontakan yang terorganisir menunjukkan bahwa bagi tahanan, saat yang tepat untuk menyerang adalah sekarang, dan bahwa dorongan emosional yang terlampau kuat mencegah penundaan. Sebagian besar bermula tanpa tuntutan (beberapa kerusuhan tetap tanpa tuntutan sampai ia dipadamkan), para tahanan tidak fokus pada tujuan akhir, tetapi pada

proses, pada kerusuhan dan pemberontakan itu sendiri. Ini mungkin mengingatkan kita pada pernyataan yang lebih puitis oleh para kombatan CCF.

Saat melawan sudah menjadi tujuan bagi pemberontakan itu sendiri, mereka telah menang, sebab mereka melawan di tempat yang dengan sengaja dirancang untuk menciptakan kepatuhan dan perilaku pasif. Kemenangan tidak diukur dari apa yang mereka peroleh pasca pemberontakan, tetapi sensasi bahwa tahanan telah menang karena berhasil menggagalkan kerja dan fungsi penjara, bahkan meski itu untuk sementara waktu. Apakah tuntutan mereka dipenuhi (jika mereka punya tuntutan), itu adalah soal lain. Itu adalah kemenangan lain. Yang terutama adalah melawan.

Tahanan belajar bahwa pemberontakan adalah mungkin, bahwa mereka bukannya tidak berdaya dan bahwa musuh ternyata tidak sekuat yang mereka pikirkan. Ada banyak senjata, ada banyak celah dan kelemahan-kelemahan kecil. Ini menghancurkan mantra sosial tentang apa yang ada di balik kawat berduri. Ini menghancurkan ambisi besar instrumen kontrol peradaban modern. Kerusuhan berulang di satu penjara dalam jangka waktu yang relatif berdekatan menunjukkan bahwa represi, razia dan kebijakan pengamanan yang lebih ketat pasca-kerusuhan tidak menjadi jaminan untuk mencegah ledakan-ledakan spontan kembali terjadi di masa depan.

Sean Swain, seorang tahanan anarkis yang saat ini mendekam di penjara Buckingham Virginia, yang memberikan serangkaian saran bagi kita untuk lebih kuat lagi bertahan hidup dan melawan rasa terisolasi saat masa karantina, menulis: "jika kamu berhasil selamat, kamu sendiri adalah perlawanan." Ketidakmungkinan, kesulitan dan rasa tidak berdaya membuat kita harus mulai memperhitungkan untuk memaknai perlawanan dalam cakupan yang lebih kecil, personal dan karena itu, yang tampak lebih remeh. Dalam kasus penjara, karena hampir tiap hal dilarang, maka hampir setiap hal adalah perlawanan. Hal ini dengan sangat tepat diekspresikan dalam surat yang ditulis oleh anarkis Chile yang dipenjara karena kasus pemboman (*caso bombas*):

"Konfrontasi itu rutin, setiap hari, menit demi menit, ruang dan posisi bertarung terus-menerus, terkadang secara simbolis dan terkadang dengan terang-terangan. Menolak larangan, melanggar beberapa kode disiplin, menjaga komunikasi agar tidak ketahuan sipir, menjaga martabat dalam hubungan sosial… Di penjara, mungkin lebih eksplisit daripada di jalanan, sikap antara tahanan dan sipir menandai konfrontasi posisi di dalam penjara."

SEORANG TAHANAN MENGACUNGKAN JARI TENGAH SAAT KERUSUHAN DI LAPAS BANCEUY, BANDUNG PADA 2016.

KRISIS YANG MENJELANG

> *"Solidaritas revolusioner yang kami tekankan ini adalah aksi untuk menuntut perang yang telah diperjuangkan rekan-rekan kami yang ditahan di dalam sistem penjara, dan ini bertujuan untuk mengacaukan kepentingan Negara/Kapital, yang paling bertanggung jawab atas keberadaan penjara."*
>
> **Federasi Anarkis Informal (FAI)**

Serangan terhadap penjara secara integral adalah serangan terhadap negara dan kapital. Itulah karakter revolusioner dari gerakan penghapusan penjara. Seorang anarkis, tidak mungkin tidak menjadi abolisionis, sebab masyarakat di bawah kondisi produksi saat ini, dengan hubungan budaya dan politik yang ada, tidak dapat hidup tanpa penjara. Jadi ketika kita membicarakan penghancuran penjara, akan menjadi tidak relevan jika kita tidak mengikutsertakan pembahasan untuk menghancurkan sistem eksploitasi yang lebih luas.

"...perjuangan revolusioner yang dilakukan dalam bentuk penyerangan dan yang ingin saya definisikan dalam garis-garis ini, haruslah tanpa mediasi atau dialog dengan para penindas. Harus diketahui bahwa pisau kita bukan ditujukan pada reformasi atau penghapusan, tetapi pada penghancuran penjara sebagai institusi, konsep, dan bahkan hubungan sosial. Bahkan ketika kita berbicara

tentang penghancuran penjara sebagai konsep dan hubungan, kita harus memperluas perspektif kita dan berbicara tentang penghancuran penjara, penjara apa pun yang menyangkal kebebasan individu dan hewan. Maksud saya bahwa pengasingan dan perampasan kebebasan juga datang dari rumah sakit jiwa dan sirkus, dan tentu saja dari kota-kota, penjara-penjara besar yang menghilangkan aliran alami kehidupan. Seluruh peradaban adalah penjara besar yang pantas dihancurkan."

Kerusuhan penjara tidak dimulai sejak 2012, dan tidak berakhir pada 2022 saja. Selama penjara eksis, upaya perlawanan (entah apakah ia akan melemah atau semakin kuat) untuk menentangnya akan tetap ada; dan kehendak untuk penghancuran penjara tidak hanya secara tersirat ada dari dalam, tetapi juga lebih kuat lagi dari luar penjara. Ini membawa kemungkinan bagi para anarkis dan mereka yang mengklaim diri sebagai revolusioner untuk mempertanyakan kemungkinan tentang apa yang dapat kita lakukan.

Kita tahu bahwa tahanan berada dalam situasi terbatas, ini berarti kita perlu melengkapi apa yang menjadi kekurangan dan kebutuhan dari perjuangan tahanan. Sementara ada banyak cara untuk bersolidaritas (sebagaimana akan saya sampaikan di akhir bagian penutup nanti), solidaritas dalam bentuk serangan langsung terhadap penjara adalah suatu kemungkinan. Hingga revolusi dan pemberontakan yang selanjutnya akan datang, dan hanya saat tatanan saat ini kolaps, maka penjara juga ikut bagian dalam kehancurannya. Itulah satu-satunya pembubaran penjara yang sejati.

Ada banyak momen besar pergolakan sosial yang menjadi kontradiksi dari perkembangan peradaban kapitalis-industrial. Mesin-mesin terus menghancurkan hutan hujan, memperluas ladang dan kebun sembari menghancurkan keanekaragaman hayati yang jadi syarat keberlanjutan ekosistem. Hal ini hanya akan menyeret kita dalam kehancuran besar. Krisis air dan gagal panen akan menjadi pertimbangan bagi kekuasaan yang gagal memberi makan populasinya untuk membebaskan tahanan, salah satu kelompok yang tidak akan mendapatkan prioritas untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas.

Gelombang pemberontakan tahanan yang terjadi pada 2020 di tengah pandemi Covid-19, menunjukan bahwa krisis yang sifatnya global menghasilkan kerusuhan penjara yang global pula. Eskalasinya begitu mengejutkan, tetapi saya percaya bahwa ini hanyalah gelombang awal. Apa yang terjadi ketika listrik padam dan jutaan tahanan tidur dalam gelap? Apa yang terjadi ketika suhu bumi meningkat sementara tahanan terpanggang? Apa yang terjadi pada tahanan di negara tropis ketika wabah nyamuk melanda, bagi tahanan di negara kepulauan Pasifik saat

kenaikan permukaan laut, dan konsekuensi ekologi lain dari dampak industrialisasi kita? Di Amerika, para tahanan telah dikerahkan untuk memadamkan kebakaran hutan.

Perang sipil dan revolusi dapat menghasilkan kekosongan kekuasaan dan kelumpuhan institusional di beberapa tempat, sebab mereka tidak bisa menjaga tentakel kekuasaannya berlangsung di tiap jengkal tanah. Militer harus memusatkan perhatian di wilayah paling rentan; kecuali terdapat tahanan politik dan tawanan perang, sebagian besar penjara tidak akan menjadi prioritasnya. Saat tidak ada bala bantuan bersenjata yang akan meredam kerusuhan penjara, jelas, ini saja menjadi satu kesempatan yang tepat bagi tahanan untuk menyerang. Pergolakan di luar akan menular sama cepatnya dengan wabah hingga ke balik jeruji besi. Kita harus memastikan bahwa kekuatan kita akan dapat membantu tahanan menjebol tembok, membebaskan mereka dan membakar penjara rata dengan tanah. Tetapi sementara momen-momen besar, entah itu sejenis krisis ekologi atau pergolakan sosial-politik akan datang, kita akan mempersiapkan diri.

POTENSI-POTENSI KETEGANGAN

> *"Kita yang tidak memiliki kekayaan, kenyamanan, kontrol, kepuasan, dan sebagainya, harus menghibur ketidaknyamanan kita dengan kesadaran bahwa frustrasi ada di mana-mana, dan itu tumbuh semakin ganas."*
>
> **Fire to The Prison #7**

Karena kerusuhan dapat disebabkan oleh apa saja di luar batas-batas yang secara tradisional kerap kita kategorikan sebagai sesuatu yang "politis", maka dengan demikian tidak hanya kerusuhan penjara saja, tetapi juga kekerasan suporter sepak bola, tawuran pelajar dan perang geng dapat dikategorikan dalam jenis kekerasan irasional. Sekali lagi, seperti tertulis dalam *Fire to The Prisons*:

"Dengan ini kita harus menyadari bahwa ada perang sosial yang konstan. Dengan bertahannya apa yang ada sebagai realitas kebiasaan kita saat ini, akan selalu ada konflik, akan selalu ada perpecahan, akan selalu ada kerentanan, akan selalu ada potensi; dalam setiap konflik, setiap saat. Apakah perang ini terwujud dalam kerusuhan dan huru hara yang beringas, atau pembunuhan dan penjara, selama dunia seperti itu ada, ada potensi bawaan bahwa ketegangan dapat meningkat setiap saat."

Jika kita pikirkan kembali, ternyata ini membuka begitu banyak kemungkinan. Sebagai seorang anarkis, kita percaya bahwa penjara hanyalah salah satu instrumen kekuasaan yang harus dihancurkan.

Sementara kita sadar bahwa hal itu tidak dapat diwujudkan hari ini, para tahanan terkadang tertarik dengan tuntutan reformasi untuk perbaikan kondisi penjara: makan lebih layak, upah atas hasil kerja paksa, air yang mencukupi, lebih banyak waktu bebas atau ruangan khusus untuk berhubungan seks dengan kekasih yang menjenguk mereka. Tetapi Bonanno menyatakan sikap bahwa, seperti kekuasaan, penjara tidak dapat dibubarkan secara bertahap. Ia harus dihancurkan: "siapapun yang berpikir bahwa mereka saat ini dapat memperbaiki penjara demi menghancurkannya di masa depan akan selamanya menjadi tawanannya."

Situasi ini akan membawa tahanan pada keadaan layaknya soda di dalam botol kaca yang telah dikocok. Saat tidak ada lagi tuntutan yang bisa dibuat di dalam penjara yang lebih bebas, lebih layak dan lebih bersih, satu-satunya tuntutan adalah merebut kebebasan mereka sendiri dan pembubaran penjara. Penjara tetaplah penjara, dan potensi ledakannya bisa jadi lebih beringas di penjara masa depan dimana tahanannya merasa tak ada lagi yang perlu direformasi.

Kerusuhan penjara juga menunjukkan bagaimana satu percikan api dapat menjalar begitu cepat. Setiap tahanan seolah telah menyiram dirinya dengan minyak tanah sebelumnya; semua jadi lebih mudah tersulut. Kebencian, kebosanan dan kemuakan yang sama adalah pijakan yang kuat untuk tindakan pemberontakan kolektif. Inilah yang memastikan provokasi oleh satu atau segelintir tahanan secara seketika mampu menggerakan ratusan tahanan lain untuk memecahkan kaca jendela, menjungkirbalikkan meja-meja, menghancurkan kamera pengawas dan menjebol tembok penjara. Keberanian menular sama cepatnya dengan rasa takut.

Bonanno yakin bahwa kelak, situasi kerusuhan subversif yang tidak rasional dan tidak bermotivasi ini akan semakin banyak terjadi. Tahanan punya potensi revolusioner sebagaimana kerusuhan penjara punya potensi insureksional. Ia tidak secara spesifik menjurus pada kerusuhan penjara, tetapi pada segala macam kerusuhan. Ini berarti potensi ketegangan ada dimana saja dan kapan saja. Menjadi tanggung jawab anarkis, bagaimanapun juga, untuk mengingat jalur perkembangan ini dan mempersiapkan diri kita sendiri saat ini untuk mengubah kerusuhan irasional menjadi kenyataan revolusioner, dengan menunjukkan arah tujuan, sarana dan kesimpulan yang konstruktif. Ini seperti seorang peselancar mengendarai papannya saat gelombang laut datang. Gelombang demi gelombang. Tiap gelombang memiliki potensi ketegangan tersendiri.

Sekarang…

Kita Harus Mulai Darimana?

Para revolusioner harus terlibat dalam jaringan solidaritas tahanan untuk membantu kebutuhan atau sekedar agar dapat mempertahankan moral tahanan terjaga. Ini berarti kerja-kerja Palang Hitam Anarkis (*Anarchist Black Cross*) perlu menjadi lebih giat lagi. Menyediakan infrastruktur dan dukungan yang memadai mulai sekarang berarti mempersiapkan diri untuk menghadapi momen represi saat lebih banyak kombatan yang akan dipenjarakan. Kita tidak berharap akan ada lebih banyak kawan kita yang dipenjara di masa depan. Tetapi setiap revolusioner harus menyadari bahwa itu resiko yang harus mereka tanggung di pundak mereka ketika mereka memutuskan untuk terlibat di dalam gerakan yang hendak menumbangkan tatanan berkarakter totalitarian saat ini.

Saran saya adalah, yang paling pertama, jangan sampai tertangkap. Mencegah diri kita tertangkap berarti membangun budaya dan jaring keamanan yang lebih baik. Rumah aman, titik dan jalur evakuasi, penyediaan dana darurat. Memang, kita akan punya lebih banyak kapasitas untuk melawan saat berada di luar penjara. Sementara kawan yang tertangkap dapat mengalihkan kita untuk menaruh perhatian dan tenaga terutama untuk membangun infrastruktur sosial dan kekuatan perlawanan yang lebih baik, hal ini jangan sampai membuat kawan-kawan yang berada di luar untuk melakukan solidaritas revolusioner berdasarkan dorongan rasa bersalah dan merasa ikut bertanggungjawab. Kita harus mengingat kembali bahwa penjara perlu diserang dan dibubarkan tidak semata karena kawan kita berada didalamnya, tetapi itu adalah salah satu institusi yang menjadi bagian dari mekanisme kekuasaan yang lebih besar yang menjadi target penghancuran kita.

Kita sudah mencoba jaring pengaman yang terbaik, tetapi tetap ada kawan-kawan kita yang tetap tertangkap. Segera setelah mengetahui kawan-kawan kita tertangkap (kurang dari tiga hari), kita juga harus memobilisasi massa menuntut pembebasan mereka, sebelum berkas mereka dilimpahkan ke pengadilan. Bersama dengan bantuan hukum dari pengacara, atau tekanan dari tokoh publik tertentu yang berpengaruh, aksi langsung dengan mengepung kantor polisi tempat kawan kita ditahan terbukti berhasil dalam kasus-kasus ringan, seperti penahanan massal yang kerap terjadi saat demonstrasi atau pemogokan. Ini lebih berlaku pada kasus dugaan vandalisme, perusakan barang, memasuki properti orang lain tanpa izin atau menyerang polisi.

Saya harap ini dilakukan bukan sebagai tindakan reaktif, tetapi preventif, yang telah dipersiapkan sebelumnya. Titik aksi atau tiap cabang

organisasi di masing-masing kota perlu memiliki pusat pengaduan dan bantuan hukum yang kontaknya dapat diakses terbuka oleh publik. Ini juga mensyaratkan afinitas dan jaringannya tetap terhubung satu sama lain untuk mobilisasi ulang. Tokoh-tokoh publik tertentu mungkin tidak sepandangan dengan pandangan politik kita, tetapi bisa jadi mereka punya simpati dengan tujuan dan aksi kita. Selama tidak melibatkan tokoh kontra-revolusioner, orang-orang ini tetap kita butuhkan selama mereka tidak merugikan kampanye kita.

Sementara tekanan dari luar digencarkan, para tahanan yang tertangkap harus kompak bersikap non-kooperatif terhadap polisi. Ini termasuk sikap agar lebih baik bebas semua atau tidak sama sekali. Bagaimanapun, polisi mungkin akan tetap memilih beberapa orang sebagai kambing hitam, khususnya jika ada bukti dan saksi kuat untuk meneruskan penahanan. Ini akan membutuhkan pertimbangan sesuai dengan situasi dan kebutuhan tiap kasus.

Serafinski mempelajari bahwa "orang lebih cenderung bergerak maksimal jika mereka tahu bahwa publik akan tahu tentang tindakan mereka." Saya sangat menganjurkan agar para tahanan dapat menulis, dan mempersiapkan jurnalisme penjara (*prison journalism*) dengan memproduksi majalah (atau webzine) seperti *Anarchist Black Dragon.* Ini penting untuk mencegah perasaan terisolasi, menjaga kewarasan, menguak kondisi penjara dan membangun jaringan solidaritas tahanan. Tetapi tindakan ini memiliki resiko, sebagaimana salah satu kontributor majalah itu, Carl Harp, mati dibunuh di dalam selnya di Washington State Penitentiary pada 1981.

Hanya sedikit pemberontakan tahanan yang berlangsung lebih dari sehari, seperti di Rutan Mako Brimob dan Lapas Kerobokan. Jika tahanan yang melakukan kerusuhan memiliki tuntutan, ia harus membuat kerusuhan berlangsung lama. Pemberontakan yang bertahan lama memiliki banyak keuntungan. *Pertama*, ia menyediakan waktu bagi tahanan lain yang tidak terlibat dalam perencanaan (jika itu adalah pemberontakan yang terorganisir) untuk ikut serta merumuskan tuntutan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. *Kedua*, ini dapat memancing perhatian, sebuah kesempatan penting agar tahanan mendapatkan dukungan dan pihak berwenang mendapatkan tekanan publik yang lebih besar. *Ketiga,* ini akan meningkatkan moral dan semangat tahanan untuk sadar bahwa mereka jauh lebih kuat dari yang selama ini mereka kira.

Ini bakal butuh semangat dan daya tahan yang tinggi, sebab pasukan bersenjata tidak akan membiarkan penjara mereka dikuasai tahanan terlalu lama. Semakin lama pemberontakan, maka semakin banyak

pula logistik yang dibutuhkan. Bahan makanan kantin dan dapur harus dijarah, dan jika pemberontakan berlangsung lebih lama, maka tahanan perlu menuntut supaya logistik dapat dimasukkan selama proses negosiasi berlangsung. Sejauh mana pemberontakan bertahan seringkali juga bergantung pada keberhasilan menyandera sipir, melucuti sipir dan menguasai gudang senjata, mengambil alih seluruh kompleks penjara dan kemudian mengundang media massa.

Sejauh ini, kerusuhan penjara belum mencapai tingkatan serius dimana pasukan pengamanan sampai diturunkan melalui helikopter. Jadi, untuk mengambil alih penjara, polisi akan menggunakan jalur darat. Akses masuk ke penjara harus dikuasai tahanan, memastikan barikade dibangun kuat, tetapi tetap memungkinkan terjadinya komunikasi.

Penghapusan penjara secara bersamaan menyaratkan kapasitas kita untuk menyelesaikan masalah di tangan kita sendiri tanpa intervensi atau bersandar pada instrumen hukum (polisi, pengadilan, dan penjara). Ted Kaczynski dalam esainya *Morality and Revolution* menyatakan bahwa:

"Di Amerika, hingga abad kesembilan belas, sikap publik terhadap polisi adalah negatif, dan pasukan polisi tetap lemah dan tidak efisien karena dianggap mengancam kebebasan. Orang-orang lebih memilih untuk membela diri mereka sendiri dan menerima tingkat kekerasan yang cukup tinggi di masyarakat daripada mempertaruhkan kebebasan pribadi mereka."

Kenyataannya, kita memang jarang melibatkan polisi dalam masalah karena kita tahu bahwa biasanya laporan kita kerap tidak ditindaklanjuti, dan sebagian besar ini akan membawa lebih banyak masalah daripada menyelesaikannya. Masyarakat di Rojava telah membangun lembaga mediasi yang ditujukan untuk menyelesaikan sengketa, sebagai alternatif dari pengadilan yang sekedar menentukan siapa yang salah dan benar dan menjatuhkan hukuman. Saya pikir kita perlu belajar lebih banyak dari Rojava karena apa yang terlintas di kepala orang tiap mendengar usulan penghapusan penjara adalah bagaimana mengatasi orang-orang "yang bermasalah" di dalam masyarakat. Tentang ini, seorang penulis pernah pula membahasnya dalam *Dayak Mardaheka: Sejarah Masyarakat Tanpa Negara di Pedalaman Kalimantan*. Dalam waktu dekat saya berencana untuk menulis satu esai khusus tentang bagaimana masyarakat tanpa polisi, pengadilan dan penjara itu berjalan.

Pada akhirnya, di tengah momen pergolakan sosial, kita harus bersiap untuk menyerang di saat paling mematikan: ketika struktur negara keropos. Ketika negara angkat kaki atau berhasil diusir dari suatu wilayah, demikian pula penjara bakal hancur.

NARASUMBER

Alex, tahanan yang terlibat dalam kerusuhan di Lapas Narkotika Serong Palembang pada 2017.

Lutfi, tahanan yang terlibat dalam kerusuhan di Lapas Tuminting Manado pada 2020.

Ilham, tahanan yang terlibat dalam kerusuhan di Lapas Idi Rayeuk Aceh pada 2012.

KEPUSTAKAAN

Anonim. 2012. *A Few Notes on Anarchist Revolutionary Solidarity and The Struggle against Prison*. Diakses dari feartosleep.espivblogs.net pada 2022.

Anonim. 2014. *Bædan 2: A Queer Journal of Heresy*. Vol II. Seattle.

Bernstein, Joseph. *Why Are Prison Riots Declining While Prison Populations Explode?*. Diakses dari theatlantic.com pada 2022.

Bonanno, Alfredo M. 1988. *From Riot to Insurrection*. Elephant Editions.

Bonanno, Alfredo M. 2008. *Locked Up*. Elephant Editions.

Conspiracy of Cells of Fire. 2012. *Mapping the Fire: International Words of Solidarity with the Conspiracy of Cells of Fire*. Diakses dari theanarchistlibrary.org pada 2022.

Goldstone, Jack A., dan Bert Useem. "Prison Riots as Microrevolutions: An Extension of State-Centered Theories of Revolution," dalam *American Journal of Sociology*, vol. 104, no. 4, 1999, hlm 985–1029.

Gibson, Mary. "Global Perspectives on the Birth of the Prison," dalam *The American Historical Review*, vol. 116, no. 4, 2011, hlm 1040–63.

Fire to the Prisons, no. 7, berkala triwulan Anarkis 2009.

Ikhtiar, Hisyam. 2019. *Pasar Gelap Narkotika di Penjara: Imbas Kebijakan Punitif*. Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat. Jakarta Selatan.

Kaczynski, Ted. *Morality and Revolution*. Diakses dari theanarchistlibrary.org pada 2022.

Koesnoen, R.A. 1961. *Sistem Pendjara Nasional*. Penerbit Sumur Bandung.

LBH Masyarakat. 2017. *Kematian Tahanan, Kegagalan Pemidanaan*.

Mullet, Layne. "Brick by Brick: Creating A World Without Prisons." *Perspectives on Anarchist Theory,* No. 28, 2015.

O'Clairre, August. *3 Positions Against Prison*. Diakses dari theanarchistlibrary.org pada 2022.

Swain, Sean. *Coming Out of Isolation Stronger*. Diakses dari seanswain.noblogs.org pada 2022.

Radical Resistance for Prison Abolition by Comrade Frank Talk, a Captive New Afrikan Revolutionary. Filler Distro. 2021.

Rully Novian, dkk. 2018. *Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia: Penyebab, Dampak Dan Penyelesaiannya*. Institute for Criminal Justice Reform. Jakarta.

Tolokonnikova, Nadezhda. *Read & Riot: A Pussy Riot guide to activism*. Diunduh dari theanarchistlibrary.org pada 2022.

Lev Zlodey & Jason Radegas. *Here at the Center of a World in Revolt.* Diunduh dari theanarchistlibrary.org pada 2022.

Lampiran 1 *Hak-Hak Narapidana*

Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

(1) Narapidana berhak:

a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;

b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;

c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;

d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;

e. menyampaikan keluhan;

f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;

g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;

h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;

i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);

j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;

k. mendapatkan pembebasan bersyarat;

l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan

m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lampiran 2 *Daftar Kerusuhan Penjara di Indonesia, 2012–2022*

1. Lapas Kelas II B Idi Rayeuk, Aceh Timur, 12 Februari 2012 (keluhan atas layanan dan fasilitas penjara)
2. Lapas Kelas II A Kerobokan, Denpasar, Bali, 19-23 Februari 2012 (perkelahian antar tahanan)
3. Lapas Kelas II A Lambaro, Aceh Besar, 31 April 2012 (penyebab lainnya)
4. Lapas Kelas I Tanjung Gusta, Medan, 11 Juli 2013 (keluhan atas layanan dan fasilitas penjara)
5. Lapas Kelas II A Labuhan Ruku, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, 18 Agustus 2013 (keluhan atas layanan dan fasilitas penjara)
6. Lapas Kelas II B Sintang, Kalbar, 25 September 2013 (razia)
7. Lapas Kelas II A Palopo, Sulsel, 14 Desember 2013 (keluhan atas layanan dan fasilitas penjara)
8. Lapas Kelas I A Rajabasa, Bandar Lampung, 11 Oktober 2013 (razia)
9. Lapas Kelas II A Lhokseumawe, 15 Februari 2014 (keluhan atas layanan dan fasilitas penjara)
10. Lapas Kelas II A Lambaro, Aceh Besar, 6 November 2015 (keluhan atas layanan dan fasilitas penjara)
11. Lapas Kelas II B Majalengka, 11 November 2015 (razia)
12. Lapas Kelas II B Piru, Seram Bagian Barat, Maluku, 17 Desember 2015 (keluhan atas layanan dan fasilitas penjara)
13. Lapas Kelas II A Kerobokan, Denpasar , 17 Desember 2015 (perkelahian antar tahanan)
14. Lapas Kelas II B Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, 1 April 2016 (keluhan atas layanan dan fasilitas penjara)
15. Lapas Kelas II A Curup, Rejang Lebong, Bengkulu, 15 April 2016 (keluhan atas layanan dan fasilitas penjara)
16. Lapas Malabero, Bengkulu, 25 Maret 2016 (razia)
17. Lapas Kelas II A Banceuy Bandung, 23 April 2016 (penganiayaan oleh sipir)
18. Lapas Kelas II A Gorontalo, 1 Juni 2016 (penyebab lainnya)
19. Lapas Kelas II A Jambi, 1 Maret 2017 (razia)
20. Lapas Kelas II B Idi Rayeuk, Aceh Timur, 24 Maret 2017 (keluhan atas layanan dan fasilitas penjara)
21. Lapas Kelas III Narkotika Serong, Banyuasin, 6 Juli 2017

(keluhan atas layanan dan fasilitas penjara)

22. Rutan Kelas II A Sialang Bungkuk Pekanbaru, 14 Juli 2017 (penyebab lainnya)
23. Rutan Kelas II A Sialang Bungkuk Pekanbaru, 5 Mei 2017 (keluhan atas layanan dan fasilitas penjara)
24. Lapas Kelas II Permisan, Nusakambangan, 7 November 2017 (perkelahian antar tahanan)
25. Lapas Kelas II B Banda Aceh, Aceh Besar, 4 Januari 2018 (penyebab lainnya)
26. Lapas Kelas II A Lambaro, Aceh Besar, 4 Januari 2018 (penyebab lainnya)
27. Lapas Kesambi Cirebon, 21 Maret 2018 (razia)
28. Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, 9 Mei 2018 (keluhan atas layanan dan fasilitas penjara)
29. Rutan Kelas II B Pemalang, 9 Juli 2018 (perkelahian antar tahanan)
30. Lapas Kelas II A Lambaro, Aceh Besar, 29 November 2018 (penyebab lainnya)
31. Rutan Kelas II A Sialang Bungkuk Pekanbaru, 10 Desember 2018 (penyebab lainnya)
32. Rutan Kelas I Surakarta, 10 Januari 2019 (perkelahian antar tahanan)
33. Lapas Perempuan Kelas II A Palangkaraya, 1-2 Februari 2019 (razia)
34. Rutan Kelas II B Siak Sri Indrapura, 11 Mei 2019 (razia)
35. Lapas Narkotika Kelas II A Hinai Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, 16 Mei 2019 (razia)
36. Lapas Kelas II B Sigli, Aceh Utara, 3 Juni 2019 (keluhan atas layanan dan fasilitas penjara)
37. Rutan Lhoksukon, Aceh Utara, 16 Juni 2019 (penyebab lainnya)
38. Lapas Kelas II B Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, 22 Juni 2019 (keluhan atas layanan dan fasilitas penjara)
39. Lapas Kelas II B Sorong, Papua Barat, 19 Agustus 2019 (keluhan atas layanan dan fasilitas penjara)
40. Lapas Kelas II A Abepura, Jayapura, 29 Agustus 2019 (penyebab lainnya)
41. Lapas Perempuan Kelas III Sigi Palu, 29 September 2019

(penyebab lainnya)

42. Rutan Kelas II B Kabanjahe, Kabupaten Tanah Karo, Sumatera Utara, 12 Februari 2020 (razia)
43. Lapas Kelas II A Tuminting Manado, 11 April 2020 (keluhan atas layanan dan fasilitas penjara)
44. Lapas Kelas II B Sorong, Papua Barat, 22 April 2020 (penyebab lainnya)
45. Lapas Perempuan Kelas II A Pontianak, 28 September 2021 (razia)
46. Lapas Kelas III Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, 7 Oktober 2021 (penganiayaan oleh sipir)
47. Rutan Kelas II B Raba, Bima, NTB, 1 Februari 2022 (keluhan atas layanan dan fasilitas penjara)

Notabene

R.A. Koesnoen, seorang kriminolog yang pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Bina Tuna Warga Departemen Kehakiman Indonesia dalam wawancara dengan majalah *Tempo* pada 1971 mengatakan bahwa berdasarkan pengalamannya, para "penjahat" yang telah masuk penjara biasanya malah akan menjadi lebih jahat daripada pertama kali ia masuk. Ia telah menerjemahkan dan menulis beberapa buku tentang sistem pidana. Di dalam bukunya, *Sistem Pendjara Nasional* (1961), kita dapat temukan Koesnoen telah konsisten dengan pernyataan tersebut lebih awal. Ia menulis:

"Biarpun polisi telah menangkapnya [penjahat] dengan membanting tulang dan jika perlu dengan korban jiwa, pihak Kejaksaan sudah mengusutnya dengan susah payah, dan pihak Pengadilan sudah mengadilinya dengan memeras otak, tetapi jika sesudah masuk penjara dan bebas lagi masih tetap jahat, apalagi jika menjadi lebih jahat karena pergaulannya dalam penjara, semua rentetan tugas yang sudah dilaksanakan tidak ada artinya sama sekali. Biaya Negara yang dikeluarkan untuk rentetan instansi-instansi tersebut yang berjumlah jutaan rupiah tiap harinya tidak berguna sama sekali. Malahan dapat dikatakan, bahwa biaya yang sebesar itu digunakan justru untuk memprodusir penjahat-penjahat yang lebih ulung dan berbahaya. Jadi rentetan instansi-instansi tersebut bukanya bertugas memberantas kejahatan tetapi mendidik penjahat-penjahat. Jika demikian keadaannya- lebih baik semua instansi tersebut dibubarkan. Tenaga-tenaga pegawainya dapat digunakan untuk tugas lain dan biayanya demikian juga."

Pernyataan kontroversial semacam ini mengingatkan kita dengan pendapat yang sama yang diajukan oleh para abolisionis. Ia tetap relevan untuk mempertanyakan fungsi penjara dan hukum pidana yang masih berjalan lebih dari separuh abad sejak Koesnoen pertamakali menulis buku itu. Apakah ada seorang dari pejabat Kementrian Hukum dan HAM hari ini yang dengan rendah hati mengakui kegagalan institusinya? Apakah penjara sungguh berhasil mengurangi terjadinya kejahatan di dalam masyarakat?

Pemberontakan tahanan adalah momen tentang mereka yang ditundukkan tetapi terus melawan meski ia punya sangat kecil harapan dan kemungkinan untuk diraih. Setiap penjara yang terbakar dibangun kembali, lebih kokoh dan ketat dari sebelumnya. Sebagian tahanan yang berhasil kabur, tetap menyerahkan diri atau tertangkap kembali. Tidak ada jaminan bahwa tuntutan tahanan dipenuhi. Tidak ada jaminan bahwa tahanan yang berhasil melarikan diri meninggalkan kompleks penjara akan segera menemukan kehidupan yang lebih baik dan lebih bahagia ketimbang sebelumnya. Sebagai bagian dari "masyarakat tahanan" yang sama, bagaimana kita memahami ledakan-ledakan spontan dan perjuangan tahanan dengan perjuangan kita saat ini?

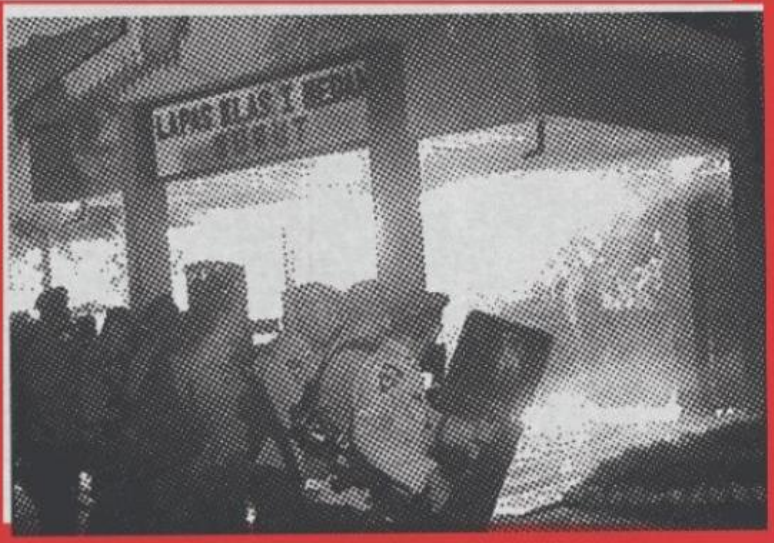

PUSTAKA CATUT
FACEBOOK: PUSTAKA CATUT
INSTAGRAM: @PUSTAKACATUT
SUREL: PUSTAKACATUT@GMAIL.COM